



MAJALAH

Parlementaria

DPR Berhasil Turunkan Biaya Haji



EDISI 218
TH. 2023





Parlementaria

PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos (Kasubag Media Cetak dan Website)

Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)

Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiaryah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom,
Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh
Pawestri, S.I.Kom, Nadhen Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane
Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne
Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli,
Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimbani, Siti Nadiah, Nafisa Hanum
Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso
Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Devi Iriandi, Runi Sari Budiati, Arief Rachman,
R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari,
Friederick Munchen

ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Pihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti
Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nu-
graha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widyowati, Rosnita, Yoga Achmad
Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah,
Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiowati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Ria Damayanti

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DI LUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

LAPORAN UTAMA

DPR Berhasil Turunkan Biaya Haji



4

4

PROLOG

DPR Berhasil Turunkan Biaya Haji

8

LAPORAN UTAMA

- Urgensi Revisi UU Haji dan Umrah
- "Pekerjaan Rumah" Setelah Dana Haji Diketuk
- Tiga Babak Penentuan Biaya Haji

16

SUMBANG SARAN

Mengembangkan Dana Haji ke Sektor Riil

18

PENGAWASAN

Dilematis BRIN: Tata Kelola Buruk di Tengah Harapan yang Besar

20

ANGGARAN

Insentif Kendaraan Listrik, Bijakkah?

22

LEGISLASI

Pengesahan RUU Minol Akan Jadi Kado Akhir Masa Periode

24

FOTO BERITA

28

FOTO STORY

Pale Fun Bike 2023- PCC Launching Jersey Baru

30

PROFIL

Cucun Ahmad Syamsurijal Santri yang Mengabdikan

34

KUNKER



PENGAWASAN

**Dilematis
BRIN:
Tata Kelola
Buruk
di Tengah
Harapan
yang Besar**

18

ANGGARAN

**Insentif
Kendaraan
Listrik,
Bijakkah?**

20

LEGISLASI

**Pengesahan
RUU Minol
Akan Jadi Kado
Akhir Masa
Periode**

22

- 56 SOROTAN**
Melihat Kesiapan Daerah Sambut Pemilu 2024
- 58 LIPUTAN KHUSUS**
Di PUIC Aljazair: BKSAP Suarakan Kepentingan Umat Islam
- 60 DAPIL**
- 70 TOKOH**
IMPIAN NOPITASARI
Bahasa Ibu (Tidak) Selalu Bahagia untuk Anak
- 72 PERNIK**
 - Perayaan Natal Parlemen Mempererat Solidaritas Kebangsaan
 - Awal Tahun Tuai Penghargaan
- 74 KIAMAT SEHAT**
Langkah Awal Lindungi Wanita dari Kanker
- 76 WISATA**
Ternate, Pesona Lampau yang Bertahan Hingga Sekarang
- 78 HOBI**
MUHAIMIN ISKANDAR
Keren dengan Bervespa
- 79 POJOK PARLE**
Gempa Cianjur Guncang Ruang Rapat

SCAN QR
UNTUK BERITA TERKINI
SEPUTAR DPR RI



Ikuti Akun Media Sosial DPR RI
Follow, Like & Subscribe

medsos@dpr.go.id



DPR RI



@DPR_RI



@DPR_RI



DPR RI

www.dpr.go.id

DPR Berhasil Turunkan Biaya Haji

Sejak tahun 2020, di Arab Saudi penyelenggaraan haji tidak hanya dilihat dari segi pelayanan. Akan tetapi juga ada aspek keekonomian.

Oleh karena itu, pengelolaan umrah saat ini dilakukan Menteri Pariwisata Arab Saudi. Karena ada aspek keekonomian, perspektif tidak murni sebuah pelayanan ibadah. Saat ini semua pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi dilakukan oleh syarikat.



“

Komisi VIII bahkan menyampaikan beberapa usulan Panja kepada pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini diantaranya pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji.



Hal tersebut semacam swastanisasi terhadap penyelenggaraan haji. Kemudian, revisi dilakukan agar regulasi

lebih kompatibel untuk menyikapi kondisi terbaru. Misalnya, pada tahun kemarin pemerintah Arab Saudi tiba-tiba menawarkan tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada beberapa hari menjelang haji.

Namun, akhirnya pemerintah menolak tawaran itu karena pertimbangan waktu persiapan yang sedikit, menjelang batas waktu dimulainya penyelenggaraan haji. Dari tahun ke tahun, penetapan biaya haji acap kali menuai polemik. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai UU BPKH saat ini menghambat ruang gerak BPKH untuk mengelola dana haji. Dampaknya pengelolaan dana haji masih belum maksimal, sehingga masyarakat dalam hal ini calon jemaah memiliki beban berat terhadap iuran haji.

Berkenaan dengan penetapan biaya haji, akhirnya Rabu malam (15/2/2023) lalu, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama (Kemenag) mengumumkan keseluruhan biaya haji 2023. DPR berhasil menekan Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp49.812.711,12 atau sebesar 55,3%.

Bipih ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta atau sebesar 70%.

"Alhamdulillah secara tegas beliau (Menag) menerima hasil kerja Panja BPIH untuk tahun 2023, tadi kita sudah melaporkan. Bapak Menteri juga sudah menyetujui," kata Marwan usai menetapkan BPIH 2023 di Gedung DPR RI. Dari sembilan fraksi, keputusan itu disetujui delapan fraksi, sementara Fraksi PKS diketahui menolak usulan biaya tersebut.

Biaya yang dibebankan meliputi biaya penerbangan, living cost, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata per jemaah sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya

“

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah digitalisasi haji dan umrah seiring dengan kebijakan Arab Saudi.

penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri. Jadi besarnya dibayarkan jemaah sekitar 55%, sedangkan dari nilai manfaat diambil 45 persen.

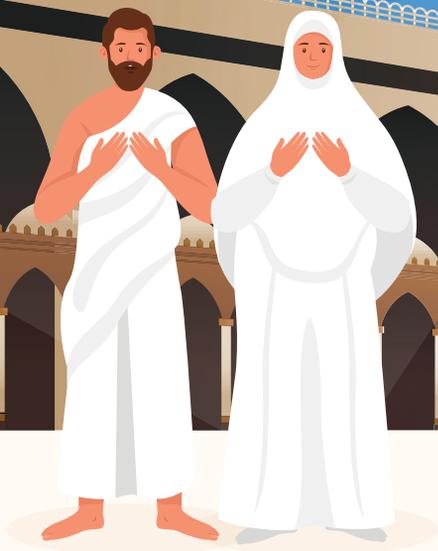
Meski dilakukan efisiensi harga di berbagai bidang, namun Komisi VIII, tetap menegaskan dan meminta pemerintah melakukan pelayanan terbaiknya pada jemaah. Komisi VIII bahkan menyampaikan beberapa usulan Panja kepada pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini diantaranya pembinaan dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji.

Sebagaimana yang telah disinggung di atas tentang pergeseran perspektif penyelenggaraan ibadah haji di Kota Suci yang saat ini dilihat dari aspek keekonomian, maka perspektif tidak murni sebuah pelayanan ibadah. Saat ini semua pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi dilakukan oleh syarikat. Bahkan, umrah saat ini dilakukan Menteri Pariwisata Arab Saudi.

Menyikapi hal tersebut Komisi VIII sedang membahas revisi UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Beberapa pasal yang akan direvisi oleh Komisi VIII DPR RI salah satunya mengenai definisi dari jemaah haji. Saat ini, jemaah haji terbagi menjadi dua yaitu, jemaah haji reguler dan jemaah haji khusus. Komisi VIII DPR RI ingin ada tambahan dengan membuat jemaah haji lainnya.

Hal lain yang juga patut menjadi perhatian adalah digitalisasi haji dan umrah seiring dengan kebijakan Arab Saudi. Kemudian, terkait kebutuhan regulasi skema B to B dalam ekosistem penyelenggaraan umrah, poin yang membahas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar menghasilkan nilai manfaat yang optimal juga menjadi sorotan. BPKH juga perlu melakukan investasi pada ekosistem pelaksanaan haji di Arab Saudi. ssb/mh

Langkah Akhir Pergulatan Penentuan BPIH



Kementerian Agama mengusulkan rerata BPIH 2023, sebesar **Rp98.893.909,11** dengan komposisi Bipih sebesar **Rp69.193.734,00 (70%)** dan nilai manfaat (optimalisasi) sebesar **Rp29.700.175,11 (30%)**. Komisi VIII DPR dan pemerintah yang diwakili Kementerian Agama sepakat membentuk **Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 1444 H/2023 M.**

8/1

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M antara Kemenag RI dengan Kementerian Umrah dan Haji Arab Saudi. **Kuota haji Indonesia sejumlah 221.000 jamaah pada 2023**, dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

26/1

Rapat Panja terkait rencana biaya penyelenggaraan ibadah haji dan rekomendasi bagi peninjauan Komisi VIII ke Arab Saudi

19/1



Jemaah haji lunas tunda tahun 1441 H/2020 M sebanyak **84.609** jemaah yang **diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M tidak dibebankan** tambahan biaya pelunasan.

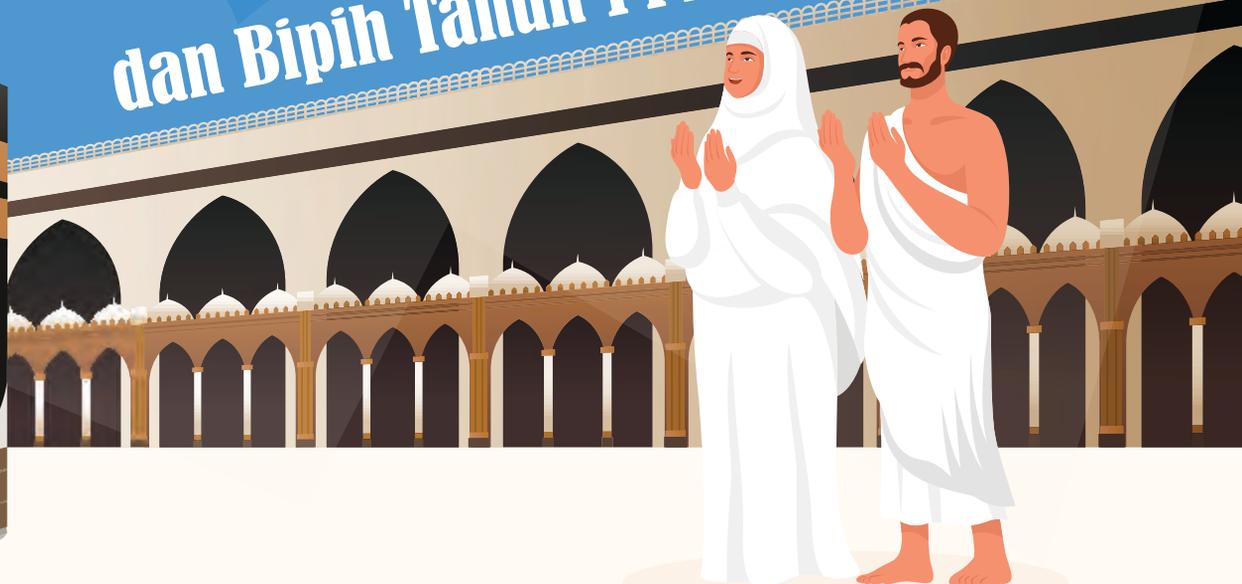


Jemaah haji lunas tunda tahun 1443 H/2022 M sebanyak **9.864** jemaah yang **diberangkatkan pada tahun 1444 H/2023 M dibebankan tambahan biaya** pelunasan sebesar **Rp9,4 juta**



Jemaah haji tahun 1441 H/2020 M sebanyak **106.590** jemaah **dibebankan tambahan biaya** pelunasan sebesar **23,5 juta**

dan Bipih Tahun 1444 H/2023 M



Kunjungan Kerja Panja BPIH ke Arab Saudi. Tindak lanjut rekomendasi dan rancangan BPIH yang diajukan pemerintah

Rapat Panja dan Rapat Kerja Komisi VIII mengenai pembahasan BPIH dengan berbagai pihak tentang rincian biaya, e isiensi harga, dan solusi untuk tahun berikutnya



Jumlah lama masa tinggal jemaah haji di Arab Saudi selama **40 hari**

Jumlah makan di Madinah sebanyak **18 kali dan di Mekkah 44 kali** (termasuk 4 kali pada dua hari menjelang Armuzna)

Urgensi Revisi UU Haji dan Umrah

DPR telah menetapkan 39 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2023. Salah satunya, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf menjelaskan, revisi UU tersebut diajukan untuk menyikapi dinamika yang berkembang di Arab Saudi terkait haji dan umrah.



Bukhori mengatakan, sejak tahun 2020, penyelenggaraan haji di Arab Saudi tidak hanya dilihat dari

segi pelayanan, akan tetapi juga aspek keekonomian. Oleh karena itu, pengelolaan umrah saat ini dilakukan Menteri Pariwisata Arab Saudi, karena ada aspek keekonomian, perspektif tidak murni pelayanan ibadah.

"Makanya ini harus diubah. Secara normatif (pembahasan revisi UU Haji dan Umrah) harus tahun ini. Sebab, ketika sudah melewati tahun 2023, dia akan direvisi apakah akan tetap prioritas atau tidak," ungkap Bukhori dalam diskusi Forum Legislasi di ruang diskusi wartawan parlemen,



FOTO: DEVI/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori saat menjadi pembicara dalam Forum Legislasi di Media Center.

“

Saat ini semua pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi dilakukan oleh syarikat. Hal ini yang membuat ada semacam swastanisasi penyelenggaraan haji. Kemudian, revisi dilakukan agar regulasi lebih kompatibel untuk menyikapi kondisi terbaru.

Nusantara III, Senayan, Jakarta pertengahan Februari 2023.

Bukhori menjelaskan, saat ini semua pelayanan haji dan umrah di Arab Saudi dilakukan oleh syarikat. Hal ini yang membuat semacam swastanisasi penyelenggaraan haji. Kemudian, revisi dilakukan agar regulasi lebih kompatibel untuk menyikapi kondisi terbaru. Misalnya, pada tahun kemarin pemerintah Arab Saudi tiba-tiba menawarkan

tambahan kuota haji sebanyak 10.000 jemaah pada beberapa hari menjelang haji.

Namun, akhirnya pemerintah menolak tawaran itu karena pertimbangan waktu persiapan yang sedikit, yakni menjelang batas waktu dimulainya penyelenggaraan haji. "Tidak fleksibel dalam menyikapi hal-hal perkembangan yang sifatnya baru," terang Bukhori. Sementara dalam diskusi ini Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Faried Aljawi mengatakan, revisi UU No. 8/2019 harus memuat digitalisasi haji dan umrah seiring kebijakan Arab Saudi.

Selain itu, Faried mendorong revisi dapat membuat Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menghasilkan nilai manfaat yang optimal. BPKH juga perlu melakukan investasi pada ekosistem pelaksanaan haji di Arab Saudi. "Kami mengusulkan tentang sinkronisasi kebijakan antarkementerian tentang penyelenggaraan ibadah haji," ucap Faried.

Dari tahun ke tahun, penetapan biaya haji acap kali menuai polemik. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menilai UU BPKH saat ini menghambat ruang gerak BPKH untuk mengelola dana haji. Dampaknya pengelolaan dana haji masih belum maksimal, sehingga masyarakat dalam hal ini

“

Intinya kita ingin meyakinkan supaya jemaah tidak gagal berangkat, namun kita juga ingin keuangan haji tidak bangkrut.

“

Ada instrumen yang menghambat BPKH untuk lincah bergerak. Oke, kita revisi UU itu, sekarang DPR mengajukan revisi UU haji dan nanti kita minta pemerintah ajukan revisi UU BPKH

Marwan Dasopang
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

FOTO: RUMI/NIR



calon jemaah memiliki beban berat terhadap iuran haji.

"Ada instrumen yang menghambat BPKH untuk lincah bergerak. Oke, kita revisi UU itu, sekarang DPR mengajukan revisi UU haji dan nanti kita minta pemerintah ajukan revisi UU BPKH," kata Marwan dalam diskusi "Hitung-Hitungan Biaya Haji 2023," pertengahan Februari 2023 lalu.

Marwan menilai, rencana kenaikan biaya haji Rp69,1 juta yang diusulkan pemerintah berpotensi menggagalkan calon jemaah untuk berangkat haji. Namun, Marwan sepakat kenaikan biaya perlu keberlanjutan pengelolaan dana haji ke depan. Ia mengusulkan, agar kenaikan dilakukan secara bertahap. Untuk tahun ini menurutnya kenaikan yang ideal adalah Rp50-55 juta per calon jemaah.

"Intinya kita ingin meyakinkan supaya jemaah tidak gagal berangkat, namun kita juga ingin keuangan haji tidak bangkrut," papar Marwan. Untuk itu, ia meminta kepada BPKH memaksimalkan kinerjanya dalam melakukan pengelolaan dana haji. "Ya, kita topang dari DPR agar BPKH bergerak lincah dengan revisi UU agar dapat menggandakan dana haji berlipat-lipat," tuturnya.

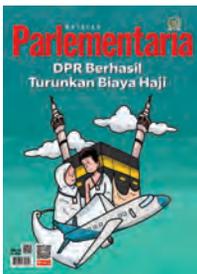
Sebelumnya, Kepala BPKH Fadlul Imansyah mengaku, BPKH memiliki ruang terbatas mengelola keuangan dana haji karena terhambat regulasi yang ada. Adanya hambatan ini, membuat BPKH tidak dapat membuat banyak kebijakan. "Semua regulasinya dikunci, belum ada ruang gerak yang bisa dilakukan. Seperti lembaga yang dilakukan oleh lembaga tabung haji," kata Fadlul.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, mengusulkan pengurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 menjadi Rp96,4. Dengan penyesuaian tersebut, artinya usulan dana haji hanya berkurang Rp2,41 juta dari usulan BPIH awal yaitu Rp98,8 juta. Hilman menyebut, masih ada potensi pengurangan BPIH, misalnya dari efisiensi tiket penerbangan.

"Kemenag juga sedang mengajukan perubahan komposisi landing Jeddah dan Madinah menjadi 55:45 atau lebih, untuk mengurangi penempatan jemaah haji pada peak season di Madinah," ujar Hilman dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR, awal Februari 2023. — **ssb/mh**

“Pekerjaan Rumah” Setelah Dana Haji Diketuk

Di balik besaran BPIH dan Bipih yang telah disepakati tersimpan catatan dan pekerjaan rumah yang masih harus dituntaskan.



DPR RI melalui Komisi VIII telah berhasil menekan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan besaran Biaya

Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh para calon jemaah. Setelah melalui diskusi dan pembahasan panjang, akhirnya disepakati BPIH dengan besaran Rp90.050.637,26 dengan Bipih Rp49.812.700,26.

Pada 19 Januari 2023, pemerintah mengajukan usulan BPIH dengan rata-rata sebesar Rp98.893.909,11 dengan komposisi Bipih sebesar Rp69.193.734,00. Angka tersebut sontak membuat banyak pihak menoleh lantaran melonjak dari besaran di tahun 2022 lalu. Sebagai gambaran pada 2022, total BPIH yang disepakati sebesar Rp81.747.844,04 dengan Bipih rata-rata sebesar Rp39.886.009.

Kini, palu sidang telah diketuk dan angka-angka terkait biaya ibadah haji pun sudah disepakati. Surat Keputusan Presiden pun sedang dinanti untuk implementasinya. Meski begitu, di balik angka yang telah disetujui, DPR masih menyisakan beberapa



Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis.

“

Bertitik tolak pada hasil survei atau hasil index yang didapatkan oleh Kementerian Agama atau pelaksana haji pada 2022 hampir sempurna. Kami berharap bahwa hasil survei atau indeks itu tetap dipertahankan,...

John Kenedy Azis
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI

catatan bagi penyelenggaraan ibadah haji ke depan.

Hal-hal tersebut disampaikan oleh beberapa anggota Komisi VII DPR RI pada rapat Rabu (15/2) lalu yang diselenggarakan di Gedung

Nusantara II, Senayan Jakarta. Hadir pula Menteri Agama dan pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M.

Harga Turun Bukan Berarti Layanan Turun

Turunnya besaran BPIH dari yang diajukan pemerintah tak lepas dari penurunan harga bagi beberapa komponen dan fasilitas. Penyesuaian terbesar terjadi pada biaya hidup (living cost), konsumsi, dan penginapan. Dalam rapat Panja Haji disepakati besaran living cost di angka 750 riyal dari sebelumnya 1.500 riyal. Selain itu untuk catering biayanya pun turun dari 18,5 riyal ke kisaran 17,2 riyal.

Anggota Komisi VIII DPR RI, John Kenedy Azis menyampaikan bahwa dengan pengurangan harga dan fasilitas diharapkan penyelenggaraan ibadah haji 2023 tetap memiliki kualitas sebaik tahun 2022. Terlebih indeks kepuasan jemaah haji 1443



FOTO: RUMI/ANR

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq.

“

Ada 62.879 lansia, kami mohon petugas-petugas hajinya harus memahami psikologi lansia. Mohon ada waktu untuk memberikan manasik lebih kepada hal-hal bersifat teknis.

Maman Imanulhaq
Anggota Komisi VIII DPR RI

H/2022 M mencapai 90,45 atau pada taraf sangat memuaskan.

"Bertitik tolak pada hasil survei atau hasil index yang didapatkan oleh Kementerian Agama, pelaksana haji pada 2022 hampir sempurna. Kami berharap bahwa hasil survei atau indeks itu tetap dipertahankan, dalam arti kata mutu pelayanan dalam pelaksanaan ibadah haji ini walaupun komposisinya berkurang tetap dipertahankan karena merupakan kewajiban bagi kita semua untuk menyenangkan, membuat nyaman untuk membahagiakan calon jemaah

haji menghadap Baitullah," ujar politisi Partai Golkar dari Dapil Sumatera Barat II itu.

Perhatian Ekstra Bagi Lansia

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Maman Imanulhaq meminta kepada Kementerian Agama agar memperhatikan dan memberikan pendampingan kepada calon jemaah haji lanjut usia. Selain itu, ia berharap

ada pembekalan hal-hal teknis karena menurutnya banyak calon jemaah yang menjadikan keberangkatan kali ini sebagai pengalaman pertama kali ke luar negeri, bahkan pertama kali naik pesawat dan pertama kali menginap di hotel.

"Ada 62.879 lansia, kami mohon petugas-petugas hajinya harus memahami psikologi lansia. Mohon ada waktu untuk memberikan manasik lebih kepada hal-hal bersifat teknis. Jangan sampai ada jemaah haji

“

Kami juga menyarankan kepada BPKH agar melakukan kontrak Hotel 10 atau 20 tahun sehingga dari sisi akomodasi dapat ditekan untuk ke depan.

Achmad
Anggota Komisi VIII DPR RI



FOTO: RUMI/ANR

Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad.

nangis, tidak bisa turun dari pesawat lalu meratapi dosanya. Padahal, bukan soal dosa tapi soal *seat belt* yang enggak dibuka. Begitu pula ketika mereka (kaget) harus kekucur air panas (saat mandi)," tutur Maman sambil berkelakar menyampaikan realita yang mungkin terjadi.

Mempersiapkan Penginapan dan Katering

Fluktuasi mata uang tak jarang berdampak pada penghitungan biaya penginapan, katering, dan penerbangan. Komponen-komponen tersebut tak ayal menjadi pemantik alotnya pembahasan besaran dana haji setiap tahun.

Politisi Partai Demokrat, Achmad menyarankan BPKH agar melakukan kontrak hotel dalam jangka panjang. Selain untuk "mengamankan" penginapan, Menurutnya hal tersebut juga dapat digunakan bagi jemaah umrah serta menambah nilai manfaat dari dana yang dikelola BPKH.

"Kami juga menyarankan kepada BPKH agar melakukan kontrak Hotel 10 atau 20 tahun sehingga dari sisi akomodasi dapat ditekan untuk ke depan. Demikian juga hotel dapat dimanfaatkan untuk jemaah-jemaah umrah kita yang setiap tahunnya ditargetkan Pemerintah Saudi sebanyak 5 juta. Ini cukup menambah nilai manfaat bagi BPKH. Kami harapkan BPKH lebih berani mengadakan terobosan dan inovasi," kata legislator Dapil Riau I itu.

Hal serupa juga diutarakan Anggota Komisi VIII DPR RI Delmeria dari Fraksi Partai Demokrat. Dalam rapat tersebut, ia menyampaikan bahwa perlu ada rencana jangka panjang untuk melakukan sewa hotel lengkap dengan katering yang dikelola oleh orang Indonesia. Menurutnya, dengan hal tersebut dapat mempersingkat perbincangan naik-turun harga katering.



FOTO: RINI/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI Delmeria.



Perlu ada rencana jangka panjang untuk melakukan sewa hotel lengkap dengan katering yang dikelola oleh orang Indonesia.

Delmeria
Anggota Komisi VIII

Transparansi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pada 2023 ini jemaah haji reguler tak lagi ditangani oleh muassasah (organisasi pemandu jemaah di Arab Saudi), namun oleh syarikah atau perusahaan yang diberi izin operasional di lapangan atas mandat dari muassasah.

Perubahan tersebut menjadikan pelaksanaan haji bersifat bisnis ke bisnis dan digadang berpengaruh pada biaya haji. Untuk itu, anggota dewan meminta pelaksana haji agar bisa mendorong syarikah

memberikan laporan keuangan secara tertulis

"Kami sudah menyarankan kepada Pak Dirjen supaya ada (laporan) tertulisnya dari 6 syarikah yang ada. Supaya ini membuat biaya perjalanan ibadah haji menjadi transparan," ujar John Kenedy Azis.

Kebijakan Pemerintah Arab Saudi menaikkan biaya masyair pada 2022 lalu membuat banyak pihak terperangah. Sebelumnya, biaya masyair sekitar 1.800 riyal menjadi 5.656 riyal di tahun 2022. Biaya ini merupakan biaya prosesi ibadah haji di Arafah, Mina, dan Muzdalifah selama empat hari. Sebagai catatan, pada 2023 biaya masyair yang ditetapkan sebesar 4.632,87 riyal atau setara dengan Rp18,7 juta.

Terkait dengan besaran biaya masyair, Maman Imanulhaq menyarankan agar pemerintah bisa mendorong Kementerian Haji Arab Saudi mengaudit biaya masyair. Ia berharap apabila ada kelebihan dana maka bisa diambil atau dikembalikan menjadi dana efisiensi BPKH.

Hal yang sama juga dilontarkan politisi Partai Gerindra, Abdul Wachid yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintah harus berani

“

Meminta agar BPKH mempersiapkan Renstra tahun 2023 dan 2027 terkait penempatan dana haji, kemudian rencana jangka panjang serta blueprint penggunaan nilai manfaat serta penggunaan nilai manfaat yang harus dijabarkan dengan jelas.

Selly Andriany Gantina
Anggota Komisi VIII DPR RI

meminta audit bagi syarikah yang bertugas. Hal ini diungkapkannya agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menentukan harga.

"Arab Saudi atau syarikah tidak bisa sewenang-wenang. Kementerian Agama atau Pemerintah Indonesia harus berani minta diaudit itu syarikah yang ada di Arab Saudi, sehingga mereka, tuh, nanti tidak akan bisa mengenakan seenaknya biaya masyair," tegasnya.

Penguatan BPKH dan Kementerian Agama

BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Keuangan Haji yang saat ini memiliki saldo mencapai Rp166,01 triliun yang didapatkan dari dana setoran awal calon jemaah. Dana yang dikelola tersebut kemudian akan dirasakan nilai manfaatnya oleh para calon jemaah untuk menanggung sebagian BPIH di tahun keberangkatan. Untuk meningkatkan nilai manfaat dan dana kelola BPKH, beberapa fraksi secara gamblang telah memberikan persetujuan ketaikan

setoran awal. Bersamaan dengan itu, BPKH juga diminta memiliki perencanaan yang lebih matang, seperti yang diungkapkan oleh anggota fraksi PDI Perjuangan Selly Andriany Gantina.

"Meminta agar BPKH mempersiapkan Renstra tahun 2023 dan 2027 terkait penempatan dana haji, kemudian rencana jangka panjang serta blueprint penggunaan nilai manfaat serta penggunaan nilai manfaat yang harus dijabarkan dengan jelas," kata Selly.

dewan pelaksana yang ditunjuk pemerintah. Ini orang-orang yang hebat. Orang-orang muda harus bekerja lebih baik. Bagaimana meraih nilai manfaat lebih tinggi," tambahnya.

Selain BPKH, anggota dewan juga memberikan perhatian pada Kementerian Agama. Maman Imanulhaq menambahkan bahwa sebaiknya Kementerian Agama memiliki sumber daya manusia yang mumpuni soal negosiasi. "Saya minta Kementerian Agama



FOTO: RUMUN/IR

Anggota DPR RI Selly Andriany Gantina.

Dalam kesempatan yang sama, Abdul Wachid juga memberikan penilaiannya terkait besaran nilai manfaat yang dihasilkan oleh BPKH. Menurutnya hasil tersebut masih terbilang stagnan jika dibandingkan dengan pengelolaan yang dahulu dilakukan langsung oleh Kemenag. Oleh karena itu, Wachid meminta BPKH bekerja lebih baik agar dapat meraih nilai manfaat yang lebih tinggi.

"Kami nilai BPKH masih stagnan belum bergerak secara baik, artinya belum mempunyai nilai manfaat yang cukup besar masih tetap sama dengan dulu yang dikelola oleh Kemenag. BPKH adalah

memiliki sumber daya manusia terutama soal negosiasi baik negosiasi komponen penerbangan, maktab, catering, fasilitas di Armuzna, dan lain sebagainya," ujar Maman.

Terkait dengan kurangnya negosiasi juga sempat disinggung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori - politisi PKS itu menyayangkan tidak ada negosiasi yang kuat saat pihak Arab Saudi menaikkan biaya masyair. Padahal, menurutnya, apabila berhasil dilakukan tawar-menawar maka bukan tak mungkin ada penghematan puluhan hingga ratusan miliar.

uc/mh

Tiga Babak Penentuan Biaya Haji

Babak pertama dimulai dengan polemik kenaikan biaya haji 2023.

Sempat mandek karena pandemi Covid-19, tahun 2022 Indonesia kembali mengirimkan jemaahnya untuk berhaji. Namun, wacana kenaikan biaya haji yang signifikan hampir dua kali lipat menimbulkan polemik. Tahun 2022, total biaya haji yang dikenakan per orang Rp39,88 juta.

Tetapi, Pemerintah mengusulkan kenaikan biaya menjadi Rp69,19 juta untuk 2023 ini.



Kemenag mengungkapkan, usulan kenaikan ini untuk mengantisipasi perubahan harga transportasi dan akomodasi di Arab Saudi.

Biaya haji reguler yang diwacanakan naik menjadi Rp69,19 juta ternyata 70% dari jumlah total Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang totalnya mencapai Rp98,89 juta. Dan sisanya diambil dari nilai manfaat pengelolaan dana haji sebesar Rp 29,7 juta. Sebagai perbandingan BPIH 2022 sebesar Rp98.379.021.09 dengan komposisi Bipih yang ditanggung jamaah sebesar Rp39.886.009.00 (40,54%) dan nilai manfaat sebesar Rp58.493.012.09 (59,46%).



FOTO: RUMI/ANR

Ketua Panja BPIH Komisi VIII Marwan Dasopang saat konferensi pers usai RDP Penyelenggaraan Haji.

Menanggapi hal ini, Panitia Kerja (Panja) BPIH Komisi VIII sendiri sudah melakukan pengecekan langsung ke Arab untuk melakukan sejumlah uji lapangan. Alhasil, pihak Komisi VIII DPR RI mengusulkan pembagian besaran pembiayaan haji tak harus memiliki skematik pembiayaan 70-30 persen.

"BPKH menjelaskan kondisi keuangan kita, supaya kita tahu membuat proporsi yang seimbang, tidak terkunci menjadi 70-30. Saya kira saran dari para anggota tadi sudah jelas, ada yang mengatakan 60:40," ujar Ketua Panja BPIH Komisi VIII Marwan Dasopang usai Rapat Dengar Pendapat Penyelenggaraan Haji di Jakarta, awal Februari lalu.

"Kami menduga bila seperti itu, proporsi pembiayaan haji kita, akan banyak jemaah yang gagal berangkat. Karena kita mendapatkan waktu pelunasan andaikan panja ini bisa menyelesaikan di tanggal 14, waktunya paling panjang hanya satu bulan saja. Satu bulan dengan pelunasan 44 juta bagi jamaah, bagi kami itu tidak terbayangkan dari profil jamaah," terangnya.

Babak II: Menyoal Fungsi BPKH

Babak II dimulai ketika banyak temuan selama di Arab Saudi. Marwan meyakinkan bahwa harga sejumlah item seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi masih bisa dinegosiasikan turun untuk menekan biaya haji 2023. Termasuk lokasi pemilihan hotel di kawasan Misfalah, Makkah, yang dinilainya tidak tepat. Menurutnya, hotel di sana tak bisa menampung jemaah dalam jumlah banyak.

Upaya lain yang kemudian dikaji Panja BPIH adalah pengurangan durasi pelaksanaan ibadah haji 2023. Dari perhitungan kebutuhan haji yang dilakukan Komisi VIII, tampak pelaksanaan haji bisa dilaksanakan cukup 30 hari. Jemaah bisa memanfaatkan sembilan hari di Madinah, enam hari tasyrik, dan 15 hari di Makkah. Berdasarkan komunikasi dengan berbagai pihak, Panja BPIH juga mendapat masukan, pelaksanaan haji memungkinkan dilaksanakan selama 35 hari saja.

Meski belakangan wacana pengurangan durasi ini tidak

bisa dilakukan karena minimnya ketersediaan fasilitas penerbangan yang ada di Arab Saudi, sehingga akan berpengaruh pada kesiapan dari pengaturan jadwal penerbangan bagi negara-negara yang mengirimkan lebih dari 30.000 jemaah haji. Namun, Komisi VIII sudah sempat membahas serius wacana ini dengan berbagai pihak penyelenggara haji.

Marwan mengkritik, BPKH harusnya mampu menggandakan nilai manfaat haji. Menurutnya, apabila beban biaya haji yang harus ditanggung jemaah sebesar 70 persen, sedangkan BPKH hanya mensubsidi sebesar 30 persen, maka ini tidak menunjukkan kinerja yang baik dari BPKH. Bila itu yang terjadi, sebaiknya dibubarkan saja.

"Kalau hanya mengandalkan 70:30 persen saja, yang akan dilakukan subsidi bagi jemaah haji kita, tidak perlu ada BPKH. Bubarkan saja. Karena tanpa BPKH juga berjalan dengan sendirinya. Maka kalimat-kalimat yang menyebutkan istita'ah baru bisa berangkat, itu menyakitkan karena membebani dan mendzolimi masyarakat kita," tegas Marwan.

Marwan menilai faktor BPKH masih belum memiliki kemampuan yang ideal untuk menaikkan nilai manfaat keuangan haji hingga dua digit karena hingga saat ini BPKH



FOTO: JAKA/NR

Komisi VIII DPR RI dan Kemenag saat menyepakati dan menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2023 di Gedung Nusantara II.

masih bertahan dalam investasi di sukuk dan penyertaan modal. "Karena BPKH masih bertahan pengembangan uangnya di sukuk dan penyertaan modal. Ya segitu-gitu aja, andaikan tidak ada BPKH, ya segitu juga," jelas Marwan.

la memaparkan, dalam catatan keuangan haji sebelum BPKH, keuangan haji telah menghasilkan sekitar Rp5 triliun hingga Rp7 triliun. Tahun 2013-2015 merupakan masa-masa yang sangat ideal dalam keuangan haji, yakni 70 persen ditanggung oleh jemaah dan 30 persen ditopang oleh nilai manfaat, dengan setoran awal Rp25 juta. Kemudian tahun-tahun berikutnya sudah mulai timpang, proporsinya naik menjadi 65:35, lalu 60:40 dan bahkan pada beberapa tahun belakangan ini nilai manfaat atau subsidi yang menopang lebih besar ketimbang yang ditanggung jemaah.

Babak III: DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2023

Rabu malam (15/2/2023) lalu, Komisi VIII DPR dan Kemenag mengumumkan keseluruhan biaya haji 2023. DPR berhasil menekan

biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp49.812.711,12 atau sebesar 55,3%. Bipih ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menag Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta atau sebesar 70%.

"Alhamdulillah secara tegas beliau (Menag) menerima hasil kerja Panja BPIH untuk tahun 2023. Tadi kita sudah melaporkan, Bapak Menteri juga sudah menyetujui," kata Marwan usai menetapkan BPIH 2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, 15 Februari lalu. Dari sembilan fraksi keputusan itu disetujui delapan fraksi, sementara Fraksi PKS diketahui menolak usulan biaya tersebut.

la pun menjelaskan, jemaah haji lunas tunda tahun 2020/2021 sebanyak 84.609 yang diberangkatkan pada tahun 2023, karena pandemi Covid-19 tidak dibebankan biaya tambahan. Sedangkan, jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp9,4 juta dan Rp23,5 juta.

we/mh



FOTO: RUNI/NR

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang.



Oleh:

Abubakar Sidik

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah
Palembang

Mengembangkan Dana Haji ke Sektor Riil

Sejak tahun 2017 hingga 2019 (haji terakhir sebelum pandemi) bipih yang dibebankan kepada jemaah sekitar Rp35 Juta. Di tahun 2023 dari hasil rapat DPR RI dengan pemerintah telah memutuskan besaran ongkos haji adalah Rp49.800.000. Mungkin munculnya angka tersebut sudah dihitung dengan cermat dan rasional, tapi usulan menaikkan biaya haji yang harus dilunasi hanya tiga bulan menjelang keberangkatan tentunya akan memberatkan para calon jemaah haji.

Pemerintah mengurangi subsidi tentunya memiliki dasar pemikiran. Di tahun 2022 lalu, Saudi menaikkan biaya layanan masyair secara mendadak sehingga total biaya haji yang dibutuhkan membengkak. Tentu pemerintah tidak ingin memberatkan jemaah haji reguler yang telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) maka pada tahun 2022, 60% biaya haji ditanggung dari nilai manfaat, sementara jemaah hanya membiayai 40% dari total biaya haji. Muncul pertanyaan, apakah skema ini akan terus diterapkan tentu tidak.

Maka, jika diterapkan 60% nilai manfaat dan 40% dari Bipih dapat diprediksi tahun 2027 dana nilai manfaat akan habis. Pada tahun 2028 dan seterusnya jemaah haji harus membayar 100%. Dengan dasar pemikiran tersebut pemerintah mengambil nilai masalah, pada tahun ini menaikkan Bipih dan menekan penggunaan nilai manfaat dengan tujuan melindungi hak jemaah haji yang masih dalam masa tunggu.

Tentu pemerintah membuat kebijakan piramida dalam pembayaran



ongkos haji. Bagi jemaah haji lunas tunda tahun 2020 sebanyak 84.609 orang tidak lagi dibebankan biaya pelunasan haji. Dan jemaah haji lunas tunda tahun 2022 sebanyak 9.864 orang dibebankan tambahan biaya pelunasan haji sebesar 9,4 juta. Jumlah jemaah tahun 2023 sebanyak 106.590 dengan dibebankan biaya sebesar Rp23.500.000. Jika dinaikkan dengan waktu tiga bulan sebelum keberangkatan, dapat dipastikan ada beberapa jemaah yang menunda keberangkatan, karena mayoritas jemaah haji reguler didominasi kaum petani, pedagang, dan sudah berusia lanjut, maka akan terjadi paradoks.

Sehingga, dengan permasalahan tersebut terjadi pro kontrak, baik di kalangan elit politik, jagat dunia maya, media massa, dan elektronik. Dari kalangan elit politik ada yang berpendapat Bipih dipengaruhi oleh 4 komponen, karena biaya penerbangan, akomodasi, catering, dan biaya masyair dengan usulan menekan biaya dan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Di sisi lain ada yang berpendapat bawah biaya akomodasi hotel-hotel di Arab Saudi yang sejak akhir tahun 2022 lalu sudah merangkak naik hingga 300 persen.

Belum lagi naiknya biaya transportasi pesawat dan depresiasi rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) dan Riyal Saudi Arabia (SAR). Menurut informasi, harga konversi mata uang tahun lalu hanya Rp14.425 per dollar dan Rp3.846 per riyal, sedangkan tahun 2023 ini diasumsikan mencapai kisaran

Dalam memanfaatkan dana haji dalam masa tunggu jemaah, hendaknya dikembangkan kegiatan sektor-sektor riil minim risiko, agar dana haji tetap stabil dan nilai manfaat tidak tergerus habis.

Rp15.300 per dollar dan Rp4.080 per riyal.

Belum lagi kebijakan pemerintah Arab Saudi yang tetap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga 15% untuk komoditi barang. Otoritas pajak Arab Saudi yang bernama General Authority of Zakat and Tax (GAZT) menetapkan zakat sebagai semacam Pajak Penghasilan (PPh) perseorangan sebesar 2,5% dan PPh Badan mencapai 20%. Oleh karenanya, dinilai rasional adanya peningkatan BPIH tahun ini di banding tahun 2022 lalu.

Permasalahan ini tentunya bisa dilihat dari berbagai perspektif, misal yurisprudensi Islam (fiqh), dasarnya QS. Ali Imran ayat 97, haji kewajiban manusia terhadap Allah, bagi mereka yang sanggup melakukan perjalanan ke Baitullah. Kata mampu (istitiah)

dalam artian sehat jasmani rohani, faktor keamanan, memiliki harta yang cukup, baik ongkos dan bekal keluarga yang ditinggalkan. Mayoritas ulama sepakat bahwa bekal biaya dan kendaraan termasuk syarat mampu (istitiah).

Dari beberapa literatur, konsep berhaji pada dasarnya lebih kepada individu masing-masing dan tidak ada campur tangan pemerintah, tapi karena perkembangan zaman, sehingga pemerintah ikut andil mengurus ritual ibadah haji agar terpusat satu kebijakan. Pesan yang perlu disampaikan kepada pemerintah agar menerapkan konsep efisiensi keberangkatan ritual ibadah haji, agar tidak dikapitalisasi, karena berhaji beda konsepnya dengan agent tour and travel.

Dalam memanfaatkan dana haji dalam masa tunggu jemaah, hendaknya dikembangkan kegiatan sektor-sektor riil minim risiko, agar dana haji tetap stabil dan nilai manfaat tidak tergerus habis. Dari berbagai fenomena pro kontra dari kebijakan pemerintah, menaikkan ongkos haji di tahun 2023 tentu pemerintah telah memikirkan dari berbagai aspek. Tetapi akan muncul pertanyaan apakah masyarakat keberatan, tentu jawabannya ya.

Batasan kuota jemaah akan semakin memperpanjang masa tunggu berhaji dan akan mempengaruhi akumulasi biaya. Dan kenaikan ongkos haji adalah keniscayaan. Kondisi ini menuntut kehadiran eksekutif dan legislatif. Tentu harapan haji di tahun 2024, pertama; dapat bekerja pada fungsinya masing-masing dengan menghadirkan regulasi untuk pelayanan yang lebih prima berbanding lurus dengan kebutuhan biaya. Kedua, Lembaga Pengelola Keuangan Haji (LPKH) bisa mengelola dana haji yang lebih profesional atau optimalisasi (investasi) sehingga dana nilai manfaat semakin besar persentasinya dengan Bipih. 🐾

Dari beberapa literatur, konsep berhaji pada dasarnya lebih kepada individu masing-masing dan tidak ada campur tangan pemerintah, tapi karena perkembangan zaman, sehingga pemerintah ikut andil mengurus ritual ibadah haji agar terpusat satu kebijakan.

Dilematis BRIN: Tata Kelola Buruk di Tengah Harapan yang Besar

Sejak terbentuk melalui amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus menuai polemik di masyarakat hingga kini. Pasalnya, lembaga ini terbentuk melalui peleburan dari sejumlah lembaga riset, termasuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dari 34 (tiga puluh empat) kementerian/lembaga. Dampaknya, sangat signifikan, tidak hanya konsolidasi anggaran, namun juga sumber daya manusia para cerdas cendekia harus berubah status dan penghasilan mereka.

Kemampuan RB. Kemudian selanjutnya dilakukan pengadministrasian oleh lembaga yang mengurus administrasi kepegawaian.

Ombudsman RI juga menemukan adanya ketidaksiapan BRIN dalam menerima peralihan pegawai. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peneliti yang tidak dapat melaksanakan kegiatan penelitian karena terkendala dengan aset, struktur organisasi dan anggaran. Selanjutnya, dalam proses peralihan aset dari kementerian atau lembaga ke BRIN tidak melalui koordinasi kelembagaan yang

Pada hal, jika merujuk pada semangat pembentukannya, BRIN didirikan untuk membangun pusat riset nasional yang dapat berdaya saing global dengan SDM riset unggul. Terlebih, BRIN merupakan implementasi operasional dari amanat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (UU Sistas Iptek)

Dalam salah satu sasaran strategisnya, BRIN pun memiliki capaian untuk menjadi lembaga yang memiliki tata kelola efektif, efisien, dan akuntabel. Termasuk, salah satu tujuan didirikannya BRIN adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang baik dan bersih.

Namun, malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut menemukan jalan terjalnya untuk diwujudkan. Lembaga Ombudsman, disampaikan Komisioner Robert Na Endi Jaweng, misalnya, menemukan sejumlah masalah di BRIN, khususnya

“

Berarti anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat di bawah dan terkait riset hanya kurang lebih Rp2 triliun, yang di dalamnya ada Rp800 miliar itu, yang ternyata realisasinya hanya Rp100 miliar. Ke mana itu semua.

Maman Abdurahman
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI



FOTO: OJI/NR

mengenai proses peralihan pegawai, peralihan aset, dan kesejahteraan pegawai.

Pada proses peralihan pegawai, Ombudsman menemukan penyimpangan prosedur oleh pihak BRIN. Hal itu, karena peralihan pegawai merupakan amanat UU yang seharusnya merupakan kewenangan

berwenang dalam hal ini Kementerian Keuangan, melainkan langsung dilakukan permintaan oleh BRIN kepada kementerian atau lembaga terkait.

Ombudsman juga menyoroti temuan dampak kesejahteraan pegawai. BRIN dinilai tidak optimal dalam pelayanan hak administrasi

kepegawaian terhadap pegawai yang sedang berproses naik golongan atau jabatan.

Sorotan Kinerja BRIN

Temuan-temuan permasalahan di atas pun tak luput dari pengawasan DPR, khususnya Komisi VII. Puncaknya, terjadi per akhir Januari 2023 silam. Dalam Rapat Kerja bersama BRIN membahas realokasi anggaran tahun 2023 dan evaluasi anggaran tahun 2022, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurahman mempertanyakan anggaran total Rp6,38 triliun di tahun 2022, di mana Rp4 triliunnya dinilai full dipakai untuk operasional belanja kepegawaian.

"Berarti anggaran yang dialokasikan untuk menyerap kondisi masyarakat di bawah dan terkait riset hanya kurang lebih Rp2 triliun, yang di dalamnya ada Rp800 miliar itu, yang ternyata realiasasinya hanya Rp100 miliar. Ke mana itu semua?" ucap Maman kala itu.

Diketahui, alokasi anggaran BRIN pada tahun 2022, berjumlah Rp6,38 triliun. Untuk belanja operasional kepegawaian habis kurang lebih Rp4 triliun. Adapun dari Rp2 triliun sisanya, anggaran Rp800 miliar untuk

program Masyarakat Bertanya BRIN Menjawab (MBBM). Namun, dalam temuan Maman, realisasi program tersebut hanya menghabiskan anggaran Rp100 miliar. Sehingga, Rp700 miliar sisanya menjadi kejanggalan yang perlu dilakukan audit khusus dengan tujuan tertentu terkait penggunaan pagu anggaran BRIN T.A. 2022 oleh BPK RI.

Kecurigaan terhadap Program MBBM ini, juga disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Berdasarkan pengecekan di lapangan yang dilakukan oleh politisi Fraksi Partai Golkar itu, program tersebut justru ada kerugian mencapai Rp270 juta.

"Di Dapil saya, telah dikomunikasikan, pelaksanaan MBBM setiap titik Rp300 juta. Sedangkan realisasi di lapangan setelah saya hitung-hitung karena dilaksanakan di 18 titik, dan ada sebuah kerugian sebesar Rp270 juta yang seharusnya kita berikan ke masyarakat," lanjutnya.

Senada, Anggota Komisi VII DPR RI Ratna Juwita mengkritik program unggulan BRIN lainnya, yaitu Program Bantuan Riset Talent (Barista). Politisi Fraksi PKB itu mempersoalkan program ini yang dianggapnya tidak inklusif bagi masyarakat yang berada

di luar pulau dengan akses internet minim. Ia menyoroti program tersebut lantaran bersikap diskriminatif terhadap masyarakat yang berada di kepulauan atau daerah terpencil yang minim akses internet.

"Terkait Barista, sistem pendaftaran online. Fix, tidak boleh dinego. Teman-teman kami di luar pulau nangis, Pak. Mereka tidak bisa mengakses. Boro-boro internet, listrik aja byarpet loh. Kami menyampaikan supaya bagaimana caranya ini bisa diolah biar aksesnya mudah," kata Ratna.

Penggantian Kepala BRIN

Karena itu, selain permintaan audit khusus, rekomendasi Komisi VII DPR RI lainnya adalah meminta pemerintah mengganti Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko. Penggantian Laksana dinilai akan menjadi pintu masuk dalam menyelamatkan BRIN

Syaikhul Islam menjelaskan sebagai lembaga baru, BRIN harusnya fokus pada program konsolidasi kelembagaan. Apalagi BRIN merupakan lembaga yang terbentuk atas berbagai entitas riset dan inovasi yang jumlahnya belasan hingga puluhan.

"Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti Kepala BRIN. Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN. Yang ada malah kontroversi dan ketidakprofesionalan dari para pejabat BRIN," ujar Syaikhul

Meskipun demikian, hingga berita ini diturunkan, Kabiro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Friyantoni mengatakan, desakan mundur dari DPR RI tak mengganggu kinerja Kepala BRIN. Menurut Driszal, Laksana tetap beraktivitas kerja seperti biasa.

rdn/mh



“

Kami mendukung penuh putusan rapat Komisi VII DPR untuk mengganti Kepala BRIN. Kami menilai hingga hampir dua tahun waktu berjalan belum ada kemajuan signifikan terkait konsolidasi kelembagaan maupun kebijakan dari BRIN

Syaikhul Islam
Anggota Komisi VII DPR RI

Insentif Kendaraan Listrik, Bijakkah?

Dalam misi memberikan kontribusi pencapaian zero carbon pada tahun 2060, pemerintah membuat kebijakan memberikan insentif atau subsidi bagi kendaraan listrik baik motor dan mobil yang direncanakan dimulai pada Maret 2023.

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan, pemerintah harus mengkaji ulang subsidi kendaraan listrik. Ia menilai masih banyak prioritas kebijakan lain yang seharusnya diurus oleh pemerintah, terutama untuk penganggaran dengan jumlah besar seperti subsidi motor listrik.

"Kami sudah banyak memberikan masukan terkait pemberian subsidi ini. Bahkan, Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan tidak ada alokasi anggaran APBN 2023 untuk anggaran subsidi motor listrik ini. Banyak prioritas lain yang harus diurus oleh pemerintah. Tidak sebanding dengan program perlindungan sosial untuk rumah tangga miskin," ujarnya dalam keterangan persnya Februari lalu.

Tambahnya, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum kebijakan subsidi ini dikeluarkan, seperti aspek keadilan, aspek demand, dan aspek produksi yang seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu. "Aspek keadilannya. Ini buat siapa subsidi ini. Tentu saja bukan untuk golongan masyarakat miskin subsidi motor listrik ini. Kemudian, demand-nya, apakah sudah banyak atau belum, dan terakhir produksinya apakah sudah lengkap dan siap? Jangan sampai menggelontorkan uang yang begitu



MENTARI/PIR

efektivitas dari kebijakan yang akan dibuat," pungkasnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi VII DPR RI Abdul Kadir Karding menilai kebijakan subsidi kendaraan listrik ini bukan merupakan langkah yang jitu dalam upaya mendorong transisi energi baru ke terbarukan. Ia menganggap hal ini malah hanya akan menghabiskan banyak anggaran sementara dampak yang dihasilkan cenderung kurang baik.

"Menurut saya, kebijakan ini sekali lagi kebijakan yang semangatnya



Kami sudah banyak memberikan masukan terkait pemberian subsidi ini. Bahkan, Badan Anggaran DPR RI juga menegaskan tidak ada alokasi anggaran APBN 2023 untuk anggaran subsidi motor listrik ini.

Anis Byarwati
Anggota Komisi XI DPR RI

besar, tetapi tidak efektif. Amanat undang-undang untuk mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan kita masih tinggi, loh," tegasnya.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu terus menegaskan agar pemerintah mengkaji ulang, agar kebijakan ini tepat sasaran dan memperhatikan prioritas dan efektivitas dalam pembuatan kebijakan. "Pemerintah harus mengkaji ulang kebijakan insentif ini. Kebijakan yang diwacanakan itu besar banget insentifnya. Padahal masih banyak masalah-masalah kemiskinan, stunting, dan permasalahan lainnya, harusnya ada yang lebih prioritas, dan penting untuk memperhatikan

bagus, tapi faktanya merusak banyak hal. Subsidi ini, kan, subsidi terbuka, mau siapa saja yang beli motor dan mobil kena (dapat) subsidi. Jadi, tidak ada miskin, tidak ada kurang mampu, semua bisa dapat. Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada," papar Karding, awal Februari lalu saat mengikuti rapat denga PT. PLN.

Lanjutnya, uang negara begitu banyak terbuang. Dimana subsidi motor listrik sebesar Rp7 juta dan

mobil listrik Rp80 juta. Kalau satu orang Indonesia beli satu juta mobil listrik dengan subsidi Rp80 juta itu berapa banyak subsidi yang dikeluarkan oleh negara. Sehingga, mobilnya bertambah banyak, dan jalanan pun tambah macet.

Sehingga Politisi Fraksi PKB itu pun menilai jika kebijakan subsidi motor dan mobil listrik itu menjadi salah satu upaya untuk mendorong transisi energi ke Energi Baru dan energi Terbarukan (EBET), menurutnya hal itu merupakan kebijakan yang sangat terburu-buru dan tidak menarik. Hal ini dikhawatirkan akan terjadi ledakan jumlah motor dan mobil di Indonesia, tanpa mengurangi polusi yang ada. Oleh karenanya ia berharap kebijakan tersebut perlu untuk dikaji ulang.

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah juga turut meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan ini. Ia mengatakan rencana pemberian subsidi ini tidak ada dalam APBN tahun 2023. Terlebih pada tahun 2023, Indonesia harus bersiap menghadapi situasi ekonomi global yang tidak menentu sehingga membutuhkan ketangguhan fiskal pada APBN.

"Apakah patut, di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi

“
Apakah patut, di tengah situasi kita akan menghadapi ekonomi global yang sulit, yang efeknya tentu akan berdampak pada ekonomi domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu?”

Said Abdullah
Ketua Badan Anggaran DPR RI



domestik lantas kita memikirkan subsidi untuk rumah tangga mampu? Apalagi, masih lebih dari separuh jumlah rakyat kita yang belum memenuhi standar makanan bergizi, dan prevalensi stunting balita kita masih tinggi, tentu hal ini keluar dari batas kepatutan. Mandat utama konstitusi dan bernegara kita adalah mengentaskan rakyat dari kemiskinan. Hal inilah yang harus jadi kacamata utama kita dalam merumuskan kebijakan prioritas," tegasnya.

Said menambahkan, telah banyak insentif yang diberikan pemerintah kepada industri kendaraan listrik. Oleh sebab itu, rencana untuk memberikan subsidi mobil dan motor listrik

hendaknya dipertimbangkan dengan matang dan seksama, agar akselerasi Indonesia menuju transportasi rendah emisi, agenda mengurangi impor minyak bumi, usaha menyehatkan APBN dan kebijakan berkelanjutan mengurangi tingkat kemiskinan dapat berjalan seimbang.

Diketahui pemerintah telah mengeluarkan kebijakan insentif perpajakan untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) melalui berbagai kebijakan, antara lain tax holiday 20 tahun, super deduction hingga 300 persen atas biaya penelitian dan pengembangan pembangkit tenaga listrik, baterai, dan alat kelistrikan, pembebasan PPN atas bahan baku pembuatan baterai, pembebasan PPN atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik untuk industri KBLBB.

Perbedaan tarif PPnBM untuk KBLBB sebesar 0 persen sedangkan yang BBM berkisar 15-70 persen. Sementara bea masuk impor mobil incompletely knocked down maupun completely knocked down sebesar 0 persen. Pengurangan bea balik nama kendaraan bermotor hingga 90 persen. Jika ditotal keseluruhan insentif perpajakan ini mencapai 32 persen dari harga jual mobil listrik dan 18 persen dari motor listrik.

gal/mh

“
Artinya apa? mobil di Jakarta (kita ambil contoh Jakarta) akan bertambah macet. Karena dengan beli mobil baru, tidak mengurangi mobil lama, karena bukan konversi atau bukan penggantian, jadi asap emisinya tetap akan ada.”

Abdul Kadir Karding
Anggota Komisi VII DPR RI



FOTO: JAKA/NR

Pengesahan RUU Minol Akan Jadi Kado Akhir Masa Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI berkomitmen menuntaskan pembahasan RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) di periode DPR 2019-2024. Karena itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi meyakini RUU tersebut akan menjadi kado akhir masa jabatan DPR kepada masyarakat untuk mengatur Minol lebih komprehensif.



FOTO: RIDWAN/NR

Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi saat mengikuti Kunker Baleg DPR RI ke Provinsi Gorontalo.

"Kita berharap periode (DPR) ini sudah selesai. Sehingga, nanti di penghujung

ada kado dari kami kepada masyarakat Indonesia bahwa tentang Minol sudah ada ketentuan yang berlaku setingkat UU," ujar Baidowi kepada Parlemenaria di Rumah Dinas Gubernur usai pertemuan Kunjungan Kerja Baleg DPR RI ke Provinsi Gorontalo, awal Februari lalu.

Dari aspirasi masyarakat yang disampaikan, salah satunya melalui Pemprov Gorontalo, terbukti bahwa ada semangat mempercepat pembahasan RUU yang telah diinisiasikan sejak 2009 itu. Bahkan, menurutnya, Provinsi Gorontalo yang terkenal dengan julukan 'Serambi Madinah' tetap memiliki angka

“

Kami pastikan tidak ada sama sekali niatan untuk membunuh industri miras, tapi kami lebih kepada pembatasan agar tidak merajalela.

Achmad Baidowi
Wakil Ketua Baleg DPR RI

kejahatan kriminalitas tinggi karena konsumsi miras yang tak bisa dikendalikan.

Dibutuhkan peraturan yang keras, bukan untuk membunuh industri miras, tapi lebih kepada mencegah eksekusi yang ditimbulkan dari miras

yang sangat meresahkan dan merusak hal-hal yang bermanfaat. "Kami pastikan tidak ada sama sekali niatan untuk membunuh industri miras, tapi kami lebih kepada pembatasan agar tidak merajalela," tegas Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Larangan Minol ini.

Kearifan Lokal Diperhatikan

Senada, RUU Minol juga menjadi salah satu masukan yang diusulkan dalam kegiatan sosialisasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Baleg DPR RI di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah mengungkapkan, kearifan lokal dalam mengatur Minol jadi perhatian.

Sebagaimana diketahui, khusus di Provinsi NTT, Sopi menjadi salah satu minol yang digunakan sebagai simbol

penyambut sekaligus dihidangkan untuk upacara-upacara adat. Sopi mengandung alkohol berkualitas baik dengan kadar mencapai 40 persen. Tak hanya NTT, misalnya di Papua, Maluku, dalam hal-hal tertentu, minol ini juga digunakan untuk upacara adat.

Oleh karena itu, perlu pengaturan spesifik dalam RUU Minol khususnya yang menyangkut kearifan lokal. "Sebagai Anggota Baleg, saya mengharapkan masukan-masukan yang ada ini juga mewakili daerah kepulauan yang lain," jelas Sulaeman usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Baleg DPR RI ke Provinsi NTT, akhir Januari silam.

“

Sebagai Anggota Baleg, saya mengharapkan masukan-masukan yang ada ini juga mewakili daerah kepulauan yang lain.

Sulaeman L. Hamzah
Anggota Baleg DPR RI



Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon saat mengikuti Kunspek Baleg DPR RI ke provinsi NTT.

Hal senada juga diungkapkan Anggota Baleg DPR RI Sondang Tiar Debora Tampubolon yang menilai aspek kearifan lokal perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU Minol. Misalnya di NTT, selain menjadi daerah tujuan pariwisata, kearifan lokalnya adalah sebagai penghasil minuman beralkohol tradisional. Minol ditegaskannya bukanlah sesuatu yang harus dilarang, namun bagaimana merumuskan aturan-aturan pembatasannya.

"Intinya, saat kami sedang melakukan penyusunan, kami melihat adanya pembatasan, sehingga benar-benar mulai dari produksi,

“

"Intinya, saat kami sedang melakukan penyusunan, kami melihat adanya pembatasan, sehingga benar-benar mulai dari produksi, distribusi, sampai penggunaannya itu jelas tidak ada jalur-jalur yang tidak dikuasai oleh negara.

Sondang Tiar
Anggota Baleg DPR RI



Anggota Baleg DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat mengikuti Kunspek Baleg DPR RI ke provinsi NTT.

distribusi, sampai penggunaannya itu jelas tidak ada jalur-jalur yang tidak dikuasai oleh negara. Dan bagaimana juga minuman-minuman beralkohol produksi dari luar negeri itu tidak secara bebas masuk ke Indonesia yang mengakibatkan tingkat kejahatan dan sebagainya itu meningkat," jelasnya. **pun/mh**



Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana menerima kunjungan Kelompok Masyarakat Sipil Ukraina di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023). Kedatangan delegasi bersama Duta Besar Ukraina untuk RI Vasyi Hamianin juga disambut Pimpinan DPR RI Sufmi Dasco Ahmad didampingi Anggota DPR RI Mohamad Hekal dan Sugiono.

FOTO: RUNI/MAN



Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang Rachmat Gobel menerima Koalisi Masyarakat Sipil serta Jaringan Advokasi Nasional yang mendesak pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PRT) di Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

FOTO: AZKA/MAN



Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng di Ruang Delegasi, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
FOTO: DEP/MAN

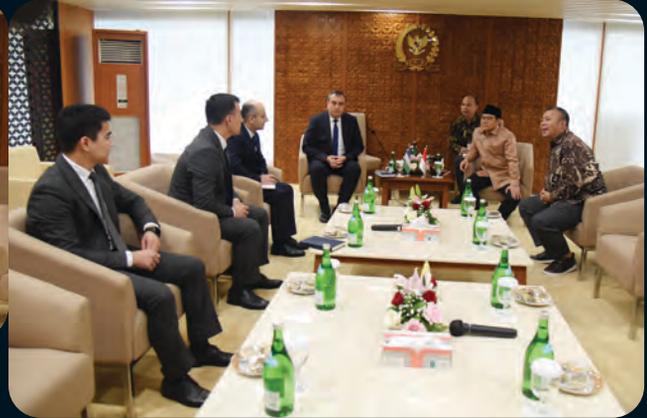


Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama belasan anggota dewan lintas komisi melakukan kunjungan langsung ke kawasan pembangunan Apartemen Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (14/2/2023).
FOTO: JAKA/MAN





Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat bertukar cenderamata usai menerima kunjungan Head of Department of The General Directorate of Tourism and Cultural Heritage of Samarkand Region, Mr. Mahmud Ahmedov di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat, (3/2/2023).
FOTO: DEP/MAN



Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menerima courtesy call Duta Besar (Dubes) Swiss H.E. Mr. Olivier Zehnder di Ruang Delegasi, Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (22/2/2023).
FOTO: OJI/MAN





Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Jerman Sarifuddin Sudding menerima courtesy call (kunjungan kehormatan) Duta Besar (Dubes) Jerman Mrs. Ina Lepel di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Jumat (10/2/2023). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak membicarakan hubungan kerja sama bilateral seperti bidang perdagangan ekonomi, pendidikan, pariwisata dan memperkuat hubungan kerja sama Indonesia-Jerman. Turut hadir Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi.
FOTO: JAKA/MAN



Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan dalam foto bersama usai Komisi XI DPR RI menerima audiensi dari Pemerintah Kabupaten Blora di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (09/02/23).
FOTO: OPIE/MAN



Anggota DPR RI Herman Khaeron (dua dari kiri) dalam sesi foto bersama usai saat hadir dalam konferensi pers KWP Cup 2023 di Senayan, Jakarta, Jumat (17/2/2023).
FOTO: RUNI/MAN



Parle Fun Bike 2023 PCC Launching Jersey Baru

NARASI: RUNI, MENTARI • FOTO: KRESNO/MAN

Komunitas PCC (*Parle Cycling Community*) Sekretariat Jenderal berdiri pada tanggal 15 Februari 2020 hingga sekarang. PCC pertama kali *gowes touring* ke Baduy Provinsi Banten. PCC beranggotakan 85 orang yang terdiri dari, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara (PPNASN), maupun pensiunan. Setiap tahunnya komunitas sepeda parlemen selalu menyelenggarakan *launching jersey*.

Di tahun 2023, dalam rangka *launching jersey* baru, PCC melakukan kegiatan *gowes* bersama, pada Minggu 19 Februari. Rute dimulai dari Gedung DPR-Sudirman-Thamrin-GajahMada-KotaTua-Sudirman-Senopati-DPR. Jumlah jersey yang di-*launching* pada Minggu berdasarkan

anggota yang aktif, ada 50 *jersey* itu belum termasuk *jersey* untuk pejabat eselon 1 dan 3.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar berfoto bersama dengan Ketua PCC Indra Pahlevi usai melaunching *jersey* baru di halaman Gedung DPR RI, Minggu, (19/02/2023) lalu.

Dalam rangka *launching* baru *jersey*, PCC menyelenggarakan *gowes* bersama ke Kota Tua. Dalam kurun waktu 2020 hingga sekarang 2023, PCC sudah berganti kepemimpinan dua kali, awal mula berdiri dipimpin Lukman Nulhakim yang bekerja sebagai peneliti di DPR RI. Namun, sejak tahun 2022 beliau berpindah tugas ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia, sehingga kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Indra Pahlevi. 🐦





Di mana ada kemauan di situ ada jalan. Itulah yang terus diyakini Cucun Ahmad Syamsurijal hingga kini. Ketika mengunjungi politis Fraksi PKB ini, tim Parlementaria berkesempatan mendengarkan rekam jejak Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut.

Sejak kecil, berdasarkan penuturannya, Cucun adalah anak yang jujur, disiplin, dan kompetitif. Tak heran, anak bungsu dari pasangan H. Burhan dan Hj Halimah yang lahir pada tanggal 8 November 1972 itu, menjadi sangat kompetitif dalam setiap hal. Pasalnya, enam kakaknya adalah anak berprestasi yang memicu semangat Cucun untuk rajin dan disiplin belajar.

Cucun dan keenam kakaknya tumbuh besar di kawasan agraris, Desa Sumber Sari, Ciparay, Kabupaten Bandung. Meski menjadi anak bungsu, Cucun tidak memiliki sifat yang manja. Ia justru merupakan anak yang penurut, apalagi ketika diperintah orangtuanya.

Syahdan, seorang bidan tradisional bernama Embah Barsih meramalkan masa depan Cucun kecil. Katanya, ia akan menjadi orang

sukses dan mampu naik haji. "Kata ibu saya, Embah Barsih meyakini masa depan saya akan cerah karena saat lahir kepala saya didselimuti ari-ari," ungkapnya.

Cucun memulai jenjang pendidikan formal di Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) pada 1979. Kegiatan Cucun kecil tak berbeda dengan anak desa lainnya. Selesai menjalani pendidikan formal, malam hari Cucun kecil rajin mengaji kitab

bersama salah satu gurunya, Usatad Ujang Zaenal Abidin. Cucun tumbuh di tengah keluarga Nahdatul Ulama yang kental. Namun, beberapa keluarga lainnya merupakan poros Muhammadiyah yang juga kental

"Tumbuh besar dilingkungan regilius membentuknya menjadi sosok yang religius pula. Berada di dua poros keluarga besar yang berbeda membuat saya menjadi sosok yang memiliki motivasi tinggi terhadap kompetensi yang positif hingga memupuk jiwa kepemimpinan," katanya.

Jiwa kepemimpinan Cucun berdasarkan cerita orangtua dan guru tampak sejak ia kecil. Baik di sekolah maupun tempat ngaji, ia selalu ingin menjadi ketua kelas, bahkan saat bermain bola. Cucun kecil harus mejadi kapten. "Sejak kecil saya selalu memposisikan diri menjadi leader. Saat menjadi ketua, saya



Cucun Ahmad Syamsurijal

Santri yang Mengabdikan



Cucun kecil (kiri) saat masih sekolah.

sangat menekuni bagaimana cara menang saat beramin” katanya.

Kemudian, lanjut Cucun bercerita, ketika masuk SMP, jiwa kepemimpinannya semakin terpujuk. Hal itu tampak dari keterlibatannya dalam organisasi sekolah. Ia menjadi Ketua Osis di SMP Negeri 2 Ciparay sekaligus aktif dalam kegiatan Pramuka. Cucun remaja juga aktif di organisasi Himpunan

Pemuda-Pemudi Masjid Al Hidayah (HIPPMA).

Mengejar Berkah Kiai

Singkat cerita, setelah menyelesaikan pendidikan di SMP, ia memutuskan mengikuti jejak kakaknya melanjutkan sekolah di SMA Pondok Pesantren Cipasung, pada 1988. Cucun melanjutkan pendidikan di Pesantren berkat rasa bangganya terhadap sang kakak Zaenal Abidin Fikri yang merupakan sosok santri hebat di pesantren.

Saat itu, Cucun Remaja betul-betul memberanikan diri masuk Pesantren Cipasung walaupun bekal ilmu agama, utamanya pemahaman Bahasa Arab-nya relatif pas-pasan. “Kakak saya, kan, pesantren, dia sudah jadi guru dan kepala sekolah sukses dan memang orangtua saya tiba-tiba berkata, ‘enggak, kamu pesantren saja’, karena saya punya keinginan kuat ya. Saya datang ke sana sendiri, enggak dianterin orang tua. Seminggu saya nangis tinggal di pesantren,” kenangnya.

Meski awalnya merasa berat karena harus jauh dari kedua orangtuanya, namun Cucun akhirnya dapat menikmati waktu-waktunya di pesantren. Berbekal ilmu yang pas-pasan, ia pun mengenal banyak kitab di Pesantren Cipasung. Baginya, kiai-kiai di Cipasung memang sosok ulama yang mumpuni.

Ia menyebutkan bahwa para masyayikh merupakan guru dalam mengajar ilmu pesantren sekaligus mengajarkan kedisiplinan organisasi.

Hari-hari menjadi santri semakin menyenangkan. Bagi Cucun, kehidupan di pondok adalah cara untuk mengejar berkah kiai. Ia yakin doa guru akan menghasilkan keberkahan baginya. Untuk mengejar berkah kiai itulah, Cucun yang saat itu tidak bisa mengendarai mobil, lantas belajar mengendarai mobil agar bisa menjadi supir kiai dan mengantarkannya ke mana saja kiai pergi.

Dari pengalamannya melekat dengan kiai, ayah empat anak ini semakin mengenal banyak orang hebat, jejaring pertemanan dan pengetahuannya pun menjadi semakin luas. Menurutnya, ia betul-betul banyak belajar dari pengalaman hidupnya menemani kiai.

“Jadi halaqah di PBNU itu membikin saya mendapatkan ilmu lebih dulu ketimbang teman-teman saya di pondok, karena, kan, mereka terus saja dari bab ke bab. Kalau saya menemukan cara menggabungkan ilmu dari sini (kegiatan selama menemani kiai),” cerita Cucun.

Bahkan, tak hanya mengendarai mobil, Cucun saat itu juga belajar komputer. Sehingga, saat anak muda seusianya belum mengenal komputer, ia sudah menguasainya



Cucun saat menjadi santri.

Ketika lulus SMA dan melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Cipasung (IAIC), Cucun belajar berorganisasi. Ia betul-betul memanfaatkan organisasi untuk belajar tentang pengembangan dan pengelolaan pesantren.

Salah satu yang dikenang Cucun adalah saat ia diberi amanah untuk menjadi utusan pesantren dalam pelatihan manajemen produksi di Balai Latihan Kerja Ciracas. Saat itu, Cucun belajar ilmu tentang manajemen produksi, bahan baku, proses produksi, dan bahan jadi. Sedangkan ilmu marketing, ia pelajari ketika menjadi pengurus kopontren.

Membangun Bisnis Bersama Istri

Singkat cerita, di tengah kesibukannya berorganisasi, Cucun mendapat kesempatan beribadah ke Tanah Suci. Usai naik Haji pada 1996, tahun berikutnya Cucun memutuskan menikahi pujaan hatinya Eneng Sumiati. Eneng adalah putri salah satu pengusaha di daerah Majalaya. Keduanya menikah pada Agustus 1997. Eneng juga merupakan salah satu santri di Pesantren Cipasung. Masa perkenalan antara Cucun dan Eneng tidak layaknya anak muda pada umumnya. Sebab, mereka berada di pesantren.

Setelah menikah, Cucun dan Eneng memulai kehidupan baru. Mereka mulanya masih menumpang di rumah orangtua Eneng. Cucun yang saat itu masih belum memiliki pekerjaan tetap, lalu ditanya oleh ayah mertuanya. "Saya ditanya, 'kamu mau jadi pegawai negeri atau mau jadi apa?'" Dengan gigih Cucun menjawab ingin menjadi pengusaha.

Gayung bersambut, dari situlah akhirnya Cucun diajak mertuanya menekuni wirausaha produksi handuk yang dikelola mertuanya, hingga kemudian usaha tersebut diserahkan kepada Cucun. Salah satu pesan mertua kepada istrinya saat keluarga kecil tersebut mulai merintis usaha



Cucun saat menikah.

adalah agar sebagai seorang istri, Eneng harus dapat menjadi lampu yang menyinari langkah Cucun.

"Kamu harus jadi lampu buat suami kamu. Jangan sampai padam karena suami kamu ini kiai, dia butuh bensin. Yang dia butuhkan adalah lampu petromak. Jadi, harus selalu diisi terus minyak tanah dan sumbunya," kenang Cucun. Meski bisnisnya tidak selalu berjalan mulus, bahkan Cucun sempat terjat

pinjaman bank dan mengalami cobaan bertubi-tubi akibat gempuran produk dari Negeri Tirai Bambu.

Namun, sebagai *risk taker*, Cucun terus maju dengan melakukan berbagai inovasi dalam bisnisnya. Meski mengalami berbagai kesulitan, Cucun adalah sosok yang tidak ingin memperlihatkan kesulitan dan kesusahan dalam hidupnya. "Saya berprinsip begini, apapun yang



namanya dunia tidak selalu ketawa. Kadang ada cobaan, segala macam," ujarnya.

Di samping menekuni bisnisnya, Cucun juga terus menekuni dunia organisasi dengan aktif berkecimpung baik di NU maupun PKB. Tahun 2008 ia bahkan dipercaya memegang kendali di DPC PKB Jawa Barat. Padahal, saat itu sedang ada konflik di tubuh partai berlambang sembilan bintang tersebut.

Dari Pesantren ke Senayan

Sejak muda, Cucun telah menduduki posisi strategis di PKB. Berbekal pengalaman dan keberaniannya ia kemudian memberanikan diri maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, pada Pemilu 2009.

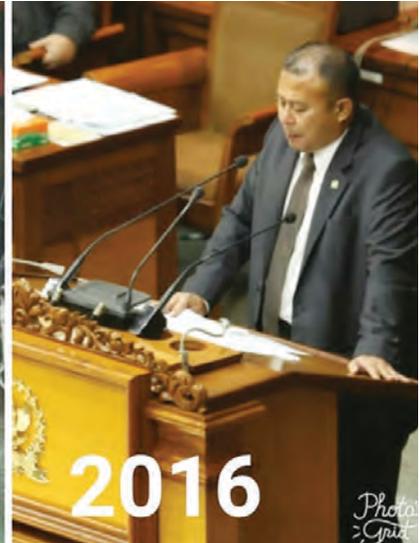
"Tahun 2009 satu pabrik saya jual. Padahal, itu sudah saya rintis sendiri. Saya punya tiga pabrik, satu saya jual. Tidak hanya itu, mobil box saya juga dijual karena berjuang ingin jadi anggota DPR. Saya jual habis itu," ingatnya. Meski kemudian gagal melenggang ke Senayan, Cucun tak lantas berputus asa, ia kembali mendapatkan kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai Anggota DPR RI Dapil Jabar II, pada Pemilu 2014.

Kali ini, Cucun pun lolos dengan perolehan suara 37.763 suara. Dua momen dalam hidup Cucun yang dikenangnya adalah saat dilantik menjadi Anggota DPR dan saat mendapatkan gelar doktor. Ia merasa haru karena mengingat orangtua yang tidak bisa menyaksikan pelantikannya. "1 Oktober 2014 saya menangis di sini karena orangtua saya tidak menyaksikan saya menjadi anggota DPR. Kemarin saya mendapat gelar doktor, semua menangis ketika saya bilang 'saya yakin orangtua saya hadir di sini menyaksikan saya anaknya menjadi doktor'," kenang Cucun.

Kerja keras Cucun dan kepeduliannya kepada masyarakat



1988



2016

mendapat balasan setimpal. Saat mencalonkan kembali pada Pemilu 2019, Cucun berhasil kembali ke Senayan dengan perolehan suara fantastis, 108.452 suara. "Modal saya 2014 dan 2019 adalah ceramah. Saya enggak pernah kenal lelah dari ujung Dapil saya Kecamatan Nanggung sampai ke Cipatat sini perbatasan dengan Cianjur. Saya enggak pernah berhenti berangkat pagi pulang subuh ceramah di sini, hanya modalnya itu, silaturahmi. Jadi, kalau ditanya kenapa jadi Anggota DPR karena saya spiritnya di organisasi NU itu harus membagi manfaat," tutur Cucun.

Mengarsiteki UU Pesantren

Sebagai seorang santri, Cucun mendapat dorongan dari guru dan partainya memperjuangkan keberpihakan negara pada pesantren. Bersama seniornya Ida Fauziyah yang saat itu menjadi Anggota DPR Dapil Jawa Tengah, ia memperjuangkan RUU Pesantren untuk masuk ke dalam Prolegnas. Dari sinilah ia dipercaya menjadi anggota Badan Anggaran (Banggar).

Awalnya, kata Cucun, RUU Pesantren akan disusun dengan nama RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren. Hal tersebut agar

RUU ini dapat diterima usulannya oleh fraksi lain. Sebab, untuk menuntaskan RUU Pesantren, pihaknya harus melobi-lobi kepada fraksi lain yang sudah pasti mengurus tenaga, pikiran, dan waktu. Sebab, masih ada fraksi lainnya di DPR yang menolak RUU tersebut.

Cucun terus berjuang, RUU tersebut kemudian diusulkan masuk Prolegnas pada 2016. Setelah proses panjang membuat naskah akademik RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren, pada 2019 Cucun mendapatkan kabar gembira, bahwa Presiden Joko Widodo saat itu mengeluarkan Surpres yang menyebut bahwa RUU yang sedianya bernama RUU Pendidikan Keagamaan dan Pesantren kemudian diusulkan menjadi RUU Pesantren.

Perjuangan tak berhenti, Cucun mengusulkan 2 persen dari total anggaran pendidikan untuk pesantren. Meski tidak mencapai persetujuan, Cucun terus berusaha agar RUU Pesantren setidaknya dapat disahkan. Perjalanan panjang Cucun dan fraksinya pun akhirnya terbayar. Dalam Rapat Paripurna yang saat itu dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, RUU Pesantren akhirnya disahkan menjadi UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. [bia/mh](#)

Mengapresiasi Lantamal VIII Menjaga Kedaulatan Negara



FOTO:RIA/ANR

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid saat bertukar cenderamata usai pertemuan Kunspek Komisi I DPR RI di Manado.

Menjaga kedaulatan perairan di utara Indonesia dipandang sangat strategis dan krusial. Kinerja para prajurit di Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) VIII, Manado, Sulawesi Utara pun diapresiasi. Setidaknya inilah yang disampaikan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.

“Kami mengapresiasi dan mendorong Lantamal VIII untuk terus meningkatkan pengamatan dan pengamanan guna menangkal berbagai kerawanan dan ancaman sesuai dengan tugas Lantamal VIII,” kata Meutya di Manado, Kamis (26/12/2023) lalu. Sinergitas dengan pihak terkait tentu jadi keniscayaan dalam menjaga kedaulatan.

Di sinilah perhatian terhadap kesejahteraan prajurit juga dipandang penting. Komisi I DPR, ujar Meutya, selalu konsisten menyuarakan kesejahteraan prajurit, karena telah berperan sebagai penjaga kedaulatan. Kesejahteraan yang dimaksud, misalnya, kebutuhan perumahan, pendidikan, dan perumahan.

Selain kesejahteraan prajurit, politisi Partai Golkar itu, juga memberi perhatian khusus terhadap kebutuhan alutsista untuk melaksanakan

kegiatan operasional di wilayah kerja. “Pemenuhan kebutuhan alutsista untuk melaksanakan tugas pengawasan di wilayah kerja, agar tercapai kekuatan ideal juga menjadi perhatian kami,” terangnya.

Sebelumnya, Komandan Lantamal VIII Laksamana Pertama TNI Nouldy J Tangka mengatakan, kelangsungan hidup sebagai bangsa maritim membutuhkan jaminan keamanan pada jalur distribusi ekonomi lewat laut, jaminan keamanan bernavigasi, dan jaminan atas terbukanya akses yang sama pada sumber daya alam. “Semuanya membutuhkan kekuatan TNI Angkatan Laut modern, profesional, dan tangguh,” serunya lebih lanjut.

Danlantamal VIII mengatakan dalam merespons tantangan tersebut, TNI Angkatan Laut khususnya Lantamal VIII berupaya memodernisasi kemampuan,



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat mengikuti pertemuan Kunsplik Komisi I DPR RI.

FOTO: BUNGA/NR

kelengkapan sarana prasarana, serta dukungan logistik terpadu bagi setiap unsur TNI Angkatan Laut yang beroperasi di wilayah Lantamal VIII.

Sementara di Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengungkapkan keprihatinannya atas kekurangan alutsista di Komando Resor Militer (Korem) 072/Pamungkas yang dikomandani Brigjen Puji Cahyono.

"Setelah mendengar seluruh paparan dari Danrem 072/Pamungkas terkait kekurangan alutsista dan sarpras, salah satunya kendaraan sarana transportasi dan

angkut prajurit yang sangat terbatas, bahkan ada yang sudah 20 tahun, kami sebagai anggota dewan sangat prihatin dan akan memperjuangkan alokasi anggaran dengan Kemenhan dan TNI AD agar dapat mengoptimalkan fungsi serta kinerja Korem," ujar Utut di Yogyakarta, Kamis, (26/01/2023) silam.

Kondisi serba kekurangan ini tentu berdampak pada mitigasi ancaman potensial. Apalagi di Yogyakarta banyak isu strategis mengemuka, seperti kebencanaan, bibit radikalisme, keamanan, dan persiapan pemilu serentak 2024.

Korem 072/Pamungkas tetap bekerja sebaik mungkin di tengah keterbatasan.

Komisi I, lanjut politisi PDI Perjuangan ini, mengapresiasi kinerja Korem 072/Pamungkas karena telah melaksanakan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga dan mencegah gangguan maupun ancaman di wilayah D. I. Yogyakarta.

Hal yang sama juga jadi perhatian Komisi I di Jawa Tengah, saat berkunjung ke Korem 074/Warastrama, Kamis (26/1/2023) lalu. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari berharap, Korem 074/Warastratama mampu meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait guna terpeliharanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Kesejahteraan prajurit juga tetap menjadi sorotan.

"Komisi I DPR RI meminta Korem 074/Warastratama terus meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait guna terpeliharanya kondisi wilayah yang aman dan kondusif. Kami juga akan menindaklanjuti usulan kebutuhan Korem 074/Warastratama yang belum terdukung sebagaimana disampaikan dalam dokumen paparan dan menjadi dokumen yang tidak terpisahkan untuk ditindaklanjuti dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI, serta Kepala Staf TNI AD," urai Kharis.

Sementara itu Danrem 074/Warastratama Surakarta, Anan Nurakhman berterima kasih atas kehadiran dan perhatian Komisi I DPR RI sebagai mitra kerja. Dalam kesempatan tersebut Anan menjelaskan kondisi sarana dan prasarana KOREM 074. Banyak alutsista yang tidak layak dan perlu perhatian. "Kami berterima kasih atas dukungan Komisi I DPR RI memperjuangkan perbaikan sarana dan prasarana serta kesejahteraan prajurit TNI di KOREM 074," pungkasnya. **rnm, bff, oji/mh**



Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari saat mengikuti pertemuan dengan jajaran Korem 074/Warastratama Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

FOTO: OJI/NR

Meninjau Persiapan Pemilu 2024



FOTO: AISYAH/NIR

Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus saat mengikuti pertemuan Kunspik Komisi II DPR RI.

Persiapan pemilu 2024 terus menjadi pantauan Komisi II DPR RI di berbagai daerah. Pemutakhiran data pemilih jadi hal krusial yang harus terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan.

Anggota Komisi II DPR RI Ihsan Yunus, saat mengikuti kunjungan kerja ke Jambi, Rabu (25/1/2023) silam, menyatakan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendapatkan akses penuh dalam penggunaan Sistem Pendataan Pemilih (Sidalih). Sidalih digunakan untuk proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih yang telah terintegrasi dengan sistem informasi administrasi kependudukan.

"Artinya, Bawaslu juga bisa mengawasi ke Dukcapil. Kemudian

proses pemutakhiran data dan penyesuaian daftar pemilih melalui Sidalih tidak menghilangkan dan/atau menggunakan hak milik warga negara Indonesia," ujar Ihsan. Komisi II bersama Kemendagri, KPU, dan DKPP telah menyetujui tiga rancangan Perbawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, serta Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD. Hal ini, menurutnya, bentuk perhatian positif Komisi II kepada Bawaslu.

"Kemarin kita sudah menyetujui perubahan Perbawaslu yang baru. Ada tiga hal, yaitu permasalahan di DPD, kemudian Gakkumdu, dan permasalahan lain," ungkapnya. Pada Januari ini di berbagai daerah termasuk Jambi sedang menjalankan pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu provinsi dan daerah. Proses pemilihan ini diharapkan tidak mengganggu tahapan pemilu 2024.

"Jangan sampai kinerjanya kemudian jadi mundur. Siapa pun yang nanti akan terpilih, kita harapkan memang betul-betul orang yang berintegritas dan berkapasitas. Kalau misalnya ada intervensi, Komisi II siap memastikan netralitas dari pemilihan itu sendiri," pungkas politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Di Bengkulu, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai persiapan pelaksanaan

tahapan pemilihan umum (pemilu) 2024 Provinsi Bengkulu sudah cukup baik. "Ada beberapa hal tadi yang kita berikan catatan, yaitu soal penetapan daftar pemilih tetap (DPT). Ini harus ada koordinasi yang lebih intensif lagi antara KPU dengan pemerintah daerah terutama Dinas Dukcapil," ujar Doli di Kantor Gubernur Bengkulu usai, Rabu (25/1/2023) lalu.

Lebih lanjut, politisi Partai Golkar ini, mendorong agar KPU, Bawaslu, maupun penyelenggara pemilu secara umum terus melakukan sosialisasi pendidikan politik. Apalagi, pemilu 2024 nanti, dilakukan secara serentak. "Pemilu 2024 ini, kan, pemilu yang berbeda dengan pemilu sebelumnya, seluruh tiga jenis pemilu akan dilakukan secara bersama dan berdekatan di tahun yang sama. Oleh karena itu, masyarakat perlu diberi informasi yang cukup supaya mereka siap," seru Doli.

Sementara di Provinsi Aceh, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal mengatakan, "Kita ingin melihat dari dekat tahapan pemilu yang ada di Aceh ini, karena kita maklumi pemilu yang ada di Aceh sedikit agak berbeda dengan persiapan pemilu di provinsi lain." Rabu (25/1/2023) lalu Komisi II DPR melihat dari dekat persiapan pemilu di Aceh. Perbedaanya, di Aceh ini ada enam



FOTO: ANNE/NR

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Syamsurizal saat memimpin pertemuan dengan Ketua KIP, Ketua Panwaslih Provinsi Aceh.

partai lokal yang ikut berkompetisi pada pemilu 2024, selain 17 partai nasional. Keenam partai lokal Aceh tersebut adalah Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera (PAS) Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Nangroe Aceh, dan Partai Solidaritas Independen Rakyat (SIRA) Indonesia.

"Jadi total yang akan bertarung di sini ada 24 partai. Karena itu, kita ingin melihat persiapan Komisi Independen Pemilihan (KIP) di sini. Mereka juga mengacu kepada penyelenggara pemilu sebagaimana tahapan yang disiapkan oleh KPU secara

keseluruhan. Sampai dengan hari ini, mereka sudah melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual," jelas Syamsurizal.

Ia menambahkan, banyak hal yang menjadi catatan Komisi II DPR RI dalam pelaksanaan tahap partai politik seperti verifikasi partai politik peserta pemilu dan masukan terhadap sistem SIPOL yang diakses terbatas bahkan oleh Bawaslu. "Dalam laporan KIP kepada kami, masih ada sedikit kendala yang terjadi terkait SIPOL-nya. Ini akan kita laporkan dalam rapat Komisi II berikutnya," ungkapnya.

Sementara itu terkait kuota 120 persen bagi partai politik lokal, Syamsurizal menyampaikan bahwa aturan tersebut sesuai berdasarkan Qanun Aceh. Sehingga, KIP dapat mengusulkan calon sebanyak 120 persen dari jumlah kursi DPRD dan DPRD. "Karena ini sudah diatur dalam Qanun Aceh, maka harus ada ketentuan seperti itu. Jadi menurut saya, ini tidak masalah hanya saja tergantung masyarakatnya ingin memilih siapa. Apakah akan tetap memilih partai nasional untuk duduk sebagai anggota dewan atau partai lokalnya. Jadi sama saja," kilahnya. **ais, skr, aam/mh**



FOTO: SINGGIH/NR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat mengikuti pertemuan Kunspek Komisi II DPR RI.

Komisi III DPR Prihatin Atas Tragedi PT. GNI



FOTO: MENTARI/ANR

Anggota komisi III DPR RI Sarifudin Suding saat mengikuti pertemuan Kunspik Komisi III DPR RI.

Tragedi yang menewaskan pekerja PT. GNI di Sulawesi Tengah jadi keprihatinan Komisi III DPR RI. Keselamatan dan kenyamanan bekerja harus diperhatikan. Tragedi seperti ini sudah pernah terjadi pula sebelumnya. Jadi, ini bukan tragedi yang pertama.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifudin Suding menyesalkan dua korban meninggal dunia atas demonstrasi para pekerja lokal di PT GNI. Hal ini ia ungkapkan saat melakukan pertemuan dengan Kapolda Sulawesi Tengah, perwakilan gubernur, manajemen PT GNI, serta serikat pekerja perusahaan.

"Terkait masalah kejadian sampai ada dua korban meninggal dunia

ini, sangat kita sesalkan. Kejadian ini ternyata bukan baru pertama kali. Sebelumnya juga ada kejadian-kejadian seperti itu," jelas Suding di ruang pertemuan Polda Palu, Sulawesi Tengah, Kamis (19/1/2023) lampau. Ia menekankan masalah keselamatan dan kesehatan kerja (K3) harus betul-betul menjadi perhatian, karena ini menyangkut hak-hak pekerja.

Berdasarkan keterangan Polda Sulteng, sudah ada 17 orang yang

“

Agar dilakukan *restorative justice*, jangan ada perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dan lokal. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan pada akhirnya muncul letupan konflik. PT. GNI harus memperhatikan persoalan ini.

Sarifudin Suding
Anggota komisi III DPR RI



Anggota komisi III DPR RI Supriansa saat mengikuti pertemuan di Polda Palu.

FOTO: MENTARI/NR

lokal diawali aksi unjuk rasa pekerja lokal dengan berbagai tuntutan. Politisi Dapil Sulawesi Selatan II ini, mempertanyakan, PT GNI sebelumnya sudah menyepakati tuntutan para pekerja untuk menyiapkan APD K3. Tetapi belum juga terealisasi, hingga para pekerja kembali berdemostrasi. Isu perbedaan gaji pun akhirnya mengemuka dalam tuntutan berikutnya.

"Dalam bekerja ini menurut pengakuan yang kita dengarkan, ini sudah pernah disepakati antara manajemen GNI dengan para pekerja untuk disiapkan APD K3 dan lain sebagainya. Tetapi realisasinya belum karena terlambat realisasinya sehingga terjadi demonstrasi. Ada lagi isu yang menyatakan bahwa demonstrasi ini dipicu perbedaan gaji antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja asing," ungkap Supriansa.

la menambahkan belum selesai isu perbedaan gaji antara pekerja asing dan lokal, timbul kembali dugaan ada pemotongan gaji. Ia dengan tegas meminta pihak manajemen untuk menelusuri jika ada pihak-pihak yang dengan sengaja membuka isu-isu sensitif seperti ini. Terakhir Supriansa menyayangkan sebelum terjadinya bentrokan tenaga kerja ini, sudah ada peristiwa atau kecelakaan kerja yang menewaskan *operator crane* dan anak magang yang terpenggang dalam ruang kendali *crane*. Ini menjadi salah satu pemicu tuntutan para pekerja dalam demonstrasi agar segera direalisasikan APD K3 dalam bekerja.

"Kalau dibiarkan, maka ini menjadi persoalan bukan hanya di GNI, tapi bisa menjadi persoalan juga di tempat-tempat lain atau perusahaan lain. Pemerintah harus ada di sini supaya tidak terulang. Rugi kalau terjadi bentrokan di situ. Terganggu ekonomi, terganggu produksi, terganggu yang lainnya," pungkasnya.

mri/aha

menjadi tersangka. Suding berharap, agar dilakukan *restorative justice*. Politisi Dapil Sulawesi Tengah ini juga berharap, jangan ada perbedaan gaji antara tenaga kerja asing dan lokal. Ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial dan pada akhirnya muncul letupan konflik. PT. GNI harus memperhatikan persoalan ini.

"Jangan ada perbedaan antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal. Itu bisa memunculkan kecemburuan dan menjadi pemicu terjadinya konflik," ujar politisi PAN tersebut. dijelaskan Suding, PT GNI sudah berkomitmen membangun smelter selain untuk menggerakkan roda ekonomi, juga untuk membuka lapangan kerja. PT GNI juga telah membuka ruang dengan serikat pekerja Indonesia (SPI) untuk berdialog dengan para pekerja.

Sementara itu, Anggota komisi III DPR RI Supriansa yang juga ikut berkunjung ke Sulawesi Tengah, melihat bahwa bentrokan tenaga kerja asing dengan tenaga kerja

“

Kalau dibiarkan, maka ini menjadi persoalan bukan hanya di GNI, tapi bisa menjadi persoalan juga di tempat-tempat lain atau perusahaan lain. Pemerintah harus ada di sini supaya tidak terulang. Rugi kalau terjadi bentrokan di situ. Terganggu ekonomi, terganggu produksi, terganggu yang lainnya.

Supriansa
Anggota komisi III DPR RI

Komisi IV DPR Temukan Produksi Arang Ilegal di Batam



FOTO: HUSEN/NR

Ketua Komisi IV DPR Sudin saat melakukan sidak pada Kunker Komisi IV DPR.

Pada inspeksi mendadak (sidak) di Kepulauan Riau (Kepri), Komisi IV DPR RI menemukan produk arang ilegal yang bahan bakunya diambil dari mangrove. Produk arang itu tersimpan dalam gudang yang memuat begitu banyak tumpukan karung arang yang siap dipasarkan.

Temuan ini mendapat perhatian serius Komisi IV DPR di tengah upaya pemerintah merehabilitasi hutan mangrove dengan menggelontorkan anggaran hingga Rp1 triliun lebih. Tentu temuan ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah tersebut. Ketua Komisi IV DPR Sudin yang memimpin sidak ini, Rabu (25/1/2023) lalu, menyerukan, agar gudang penyimpanan arang ilegal tersebut disegel. Gudang arang ini berada di Pulau Galang, Batam, Kepri.

"Berapa ratus ribu batang mangrove yang dipotong. Pemerintah menggelontorkan anggaran Rp1 triliun lebih untuk penanaman mangrove. Sementara di Kepri ini mangrove ditebang untuk bikin arang. Pemiliknya harus segera di-BAP. Kita juga akan sidak tempat-tempat lainnya. Semua produk arang ini diekspor ke Singapura dan Malaysia," ungkap Sudin.

Kerugian negara segera dihitung oleh tim Penegakkan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang

ikut dalam sidak tersebut. Ternyata tak hanya satu gudang, masih ada gudang lainnya di Pulau Galang yang juga jadi sasaran sidak Komisi IV. Ketika melihat produk arangnya, ternyata batang arangnya cukup besar. Menurut Sudin, batang arang itu didapat dari menebang pohon mangrove yang berusia sekitar 50 tahun.

Sudin sudah memerintahkan Gakkum KLHK menyegel gudang-gudang ilegal tempat penyimpanan arang mangrove tersebut. Setidaknya ada tiga gudang yang berhasil disidak Komisi IV DPR bersama Gakkum KLHK. Informasi seputar produk arang berbahan mangrove ilegal ini, lanjut Sudin, sudah didapat satu bulan sebelumnya. Ketika masuk masa sidak, Komisi IV pun segera menyidak gudang-gudang penyimpanan arang ilegal tersebut.

"Kita akan cek, apakah ada izin reklamasinya apa tidak. Izin reklamasi ada di KKP. Kalau tidak ada izin, kita perintahkan disegel, karena merusak hutan mangrove. Kita juga pernah menyegel PT. Kayla di Batam. Saya katakan segel, karena itu merusak hutan bakau. Kita enggak peduli siapa backing-nya. Kalau melanggar hukum, ya kita akan tegakkan hukum," tandas politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara di Kutai Kartanegara, Kaltim, Komisi IV DPR juga menemukan perusahaan tambang batu baru yang beroperasi di kawasan hutan. Ada PT Mulia Persada Kartanegara yang beroperasi di kawasan tersebut. Perusahaan ini beroperasi di kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) yang berlaku.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyesalkan



FOTO: DIPA/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin saat meninjau kawasan tambang batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara.

eksploitasi tambang batu bara telah yang merusak lingkungan dan ekosistem alam, dan pastinya merugikan negara. Ia menyerukan, butuh kehadiran negara untuk turun tangan, menegakkan hukum.

"Keluhan masyarakat, seperti sumber air yang bermasalah, jalan yang berlubang dan berbahaya buat masyarakat. Kita mendorong kepada pemerintah agar dengan tegas menindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, memberikan ruang lingkup pemerintah dan aparatnya untuk melakukan penertiban dan penindakan secara perdata ataupun pidana," pungkas Andi, Rabu

(25/1/2023) lalu di Kaltim.

Anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono juga menambahkan bahwa tidak boleh ada pihak yang bermain, baik itu pemerintah, kepolisian, bahkan kejaksaan. Diperlukan sinergi yang sigap dari seluruh instrumen terkait. Salah satu kasus yang ditemui ialah perusahaan belum memiliki IPPKH. Ia harap agar kasus ini bisa cepat diproses secara hukum.

"Tadi saat kami tinjau salah satu kawasan tambang batu bara di sini, salah satu operator menjelaskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) sudah ada. Namun, kami melihat kesalahan dimana perusahaan seharusnya memiliki IPPKH-nya

terlebih dahulu, kemudian IUP baru dikeluarkan. Karena itu, hari ini pun kita langsung berikan penyegelan di kawasan ini," tegasnya.

Sedangkan di Sumut, Komisi IV DPR menyorot soal kawasan hortikultura berbasis koperasi. Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat menilai pengembangan kawasan *Food Estate* (FE) hortikultura berbasis korporasi di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumut, belum berjalan optimal. Pengembangan kawasan FE merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi yang dikembangkan pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.

"Kita tahu bahwa tahun 2020 dicanangkan FE salah satunya di Humbahas ini yang merupakan program strategis nasional. Setelah berjalan tiga tahun, kita evaluasi ternyata hasilnya belum optimal tidak seperti yang kita harapkan. Baru terealisasi sekitar 165 hektar dari 215 hektar luas area yang telah dikembangkan melalui dukungan APBN Ditjen Hortikultura. Tindak lanjut untuk bisa mengembangkan sampai dengan 215 hektar itu menurut saya berat," ungkap Djarot di kawasan FE, Desa Ria Ria, Kecamatan Pollung, Kabupaten Humbahas, Kamis (30/1/2023) silam.

Belum lagi, lanjutnya, saat dilakukan peninjauan, ditemukan sejumlah varietas komoditi hasil panen lain di kawasan FE yang tidak hanya berfokus pada komoditas hortikultura yang rentan menyumbang inflasi nasional seperti bawang merah, bawang putih, dan kentang industri. Menyikapi hal tersebut, Djarot meminta Kementerian Pertanian hadir meneliti varietas komoditi yang paling bagus untuk ditanam khususnya di kawasan FE kabupaten Humbahas.

mh, dip, tra/mh



FOTO: TIARA/NR

Anggota Komisi IV DPR RI Djarot Saiful Hidayat saat memimpin Kunspik Komisi IV DPR RI ke lokasi pengembangan kawasan FE di Desa Ria Ria.

Bencana Rob dan Pembangunan Jalan Jadi Sorotan

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR kali ini, banyak menyorot soal bencana rob dan pembangunan jalan di daerah. Di Demak, Jateng, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz mendorong pemerintah pusat dan daerah kolaboratif dalam mengatasi banjir dan rob yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah.



Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz saat mengikuti pertemuan di kabupaten Demak.

Menurutnya, selama ini langkah-langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Demak, lebih kepada langkah-langkah jangka pendek dan menengah. Sementara pemerintah pusat berjangka panjang. Oleh karenanya, ia turut meminta perlu ada kajian yang terintegrasi bersifat multisektoral dari berbagai perspektif yang tidak hanya berbasis infrastruktur namun juga berbasis geografis dan sosiokultur.

"Saya lihat, *sih*, koordinasi antara pusat dan daerah sudah ada, tapi belum optimal. Kalau pemerintah daerah lebih kepada keluhan dari masyarakat, sedangkan langkah pemerintah pusat lebih fokus kepada infrastrukturnya. *Nah*, ini saya kira kurang *matching*. Memang tadi

usulan (kepada) pemerintah pusat adalah ditangani (banjir rob) dengan dibangunnya tanggul. Namun, apabila ketersediaan anggaran dalam menangani hal ini minim, maka strategi yang tepat harus seperti apa. Apakah relokasi bisa menjadi salah satu opsi yang memungkinkan. Nah, ini harus betul-betul dihitung secara matematis," ungkap Neng Eem di Demak, Kamis (19/1/2023) lampau.

Politisi PKB itu menambahkan, apabila opsi relokasi dilakukan, pemerintah juga harus memikirkan dampak terjadinya konflik masyarakat yang menolak dan setuju untuk direlokasi berikut sisi anggarannya. Apabila, tidak direlokasi, maka perlu dipikirkan juga pembangunan infrastruktur yang didesain n bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Sementara, sebagian

masyarakat yang terdampak banjir dan rob di Kabupaten Demak bergantung pada tempat pelelangan ikan (TPI). Namun, akses jalan-jalan untuk TPI turut terendam banjir. Maka, menurutnya perlu ada kajian yang mendalam.

"Karena relokasi itu pasti akan dihadapkan masalah yang mungkin menolak dan semacamnya. Tapi ketika mereka diberikan jaminan apabila direlokasi dan ketika tinggal di lokasi yang baru itu akan lebih kondusif, kemudian dari sisi ekonomi mereka dijamin kesejahteraannya, sumber pencaharian mereka juga ada tetap dekat, saya kira masyarakat nantinya tidak akan menolak. Karena sebenarnya kan masyarakat ketika mereka enggan untuk direlokasi itu permasalahan utamanya adalah sumber mata pencaharian yang mereka tidak tahu



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhammad Iqbal saat memimpin Kunspik Komisi V DPR RI ke Kota Pariaman.

ketika pindah itu akan makan dari mana," tandas Neng Eem.

Di Jambi, Komisi V DPR menyorot soal pembangunan jalan yang bisa diakses angkutan batu bara. Menurut Sudewo, angkutan batu bara yang melintas di jalan nasional merupakan pelanggaran hukum. Jalan nasional berfungsi sebagai jalan umum yang digunakan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dan Pemerintah Provinsi Jambi harus menegakkan aturan.

"Mengacu pada undang-undang lalu lintas, (melintasnya angkutan batu bara di jalan nasional) ini merupakan pelanggaran hukum. Tinggal bagaimana aparat penegak

hukum utamanya dari kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian PUPR, termasuk Gubernur Provinsi Jambi menegakkan aturan," ungkap Sudewo kepada **Parlementaria** usai mengikuti pertemuan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi, Kamis (19/1/2023).

Oleh karena itu, legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah III itu menyarankan untuk dilakukannya pembangunan jalan khusus angkutan batu bara. Hal ini untuk mengurangi kemacetan yang diakibatkan rusaknya jalan nasional yang disebabkan kendaraan pengangkut

batu bara yang melebihi tonase.

"Kalau dilihat dari tambang yang beroperasi di provinsi-provinsi lain, itu tidak ada yang semacam ini. Hampir semua tambang yang ada di wilayah Indonesia ini punya jalan khusus. Maka sebaiknya di Provinsi Jambi juga memiliki jalan khusus," jelas politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Berdasarkan data dari Polres Batang Hari, terdapat 157 angka kecelakaan lalu lintas sepanjang Januari hingga Desember 2022. Kecelakaan itu didominasi oleh kendaraan roda enam, salah satunya kendaraan pengangkut batu bara. "Nyawa siapapun itu sangat berharga, satu nyawa itu juga sangat berharga. Apakah itu yang menjadi korban mahasiswa atau kah yang lain, itu harusnya tidak boleh terjadi dan ini memang sangat memprihatinkan. Maka saya berharap, dari para penegak hukum punya keprihatinan yang sama. Segera bertindak, duduk bersama dengan para pengusaha," tutupnya

Sementara di Pariaman, Sumatera Barat, Komisi V DPR melihat dari dekat pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi. Kunjungan yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V M. Iqbal itu, meninjau langsung beberapa titik seperti Pasar Pariaman, Terminal, Proyek Pembangunan Rusunawa, serta Jembatan Gantung.

Iqbal mengatakan, beberapa usulan pembangunan dari pemerintah Kota Pariaman dapat ditindaklanjuti dan dikordinasikan, agar pembangunan tersebut segera dimanfaatkan oleh masyarakat. "Tentu kita sama-sama mengharapkan agar pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat dapat mempercepat bergeraknya sektor ekonomi dan sektor lainnya, yang akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Pariaman," ujar legislator Dapil Sumatera Barat II itu.

tra, ais, aha/mh



Anggota Komisi V DPR RI Sudewo saat mengikuti pertemuan di Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batang Hari.

LRT Harus Terkoneksi ke Berbagai Moda Transportasi



FOTO: PUNTHO/NR

Tim Kunspik Komisi VI DPR RI saat meninjau kesiapan LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti, Depok.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung mengingatkan Light Rail Transit (LRT) yang menghubungkan beberapa kota meliputi Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodebek) harus terkoneksi dengan berbagai moda transportasi yang ada di sekitar wilayah tersebut. Mengingat, LRT nanti melintasi wilayah Jakarta hingga Depok dan Bekasi dimana fasilitas transportasi yang dimiliki berbeda-beda di tiap kota, seperti angkot, Trans Jakarta, dan transportasi lainnya.

Martin menyampaikan ini dalam sambutannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI yang meninjau kesiapan LRT Jabodebek di Stasiun Harjamukti, Depok, Provinsi Jawa Barat, Jumat (27/1/2023) silam. "Satu catatan saya,

jangan lupa ke depan LTR ini harus bisa terkoneksi dengan berbagai moda transportasi yang ada di kota lainnya seperti angkot, Trans Jakarta, dan lainnya. Nah, ini *challenge* tersendiri ke depan agar LRT kita sama dengan LRT di luar negeri yang tidak perlu repot-repot membeli karcis yang berbeda-beda," ujar Martin.

Tak hanya itu, Martin menegaskan aspek keselamatan LRT Jabodebek wajib menjadi aspek terpenting. Tujuannya, tandas Martin, agar *trust* masyarakat terhadap transportasi publik nasional semakin bagus. "Dan tentu kalau berhasil, maka ini akan mengurangi kepadatan dan tingkat kemacetan yang ada di Jabodebek," tandas politisi Fraksi Partai Nasdem ini.

Lebih lanjut, Martin menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sambutan segenap mitra kerja BUMN yaitu PT ADHI Karya (Persero), PT Industri Kereta Api atau PT INKA (Persero) dan PT KAI (Persero) saat Komisi VI DPR RI meninjau LRT Jabodebek itu. "Dan tentu kita harapkan ini menjadi satu kisah sukses kedepan agar negara kita ini juga memiliki sistem transportasi LRT yang melengkapi keseluruhan moda transportasi lainnya," pungkas Martin.

Sementara itu, Direktur Operasi PT INKA (Persero) I Gede Agus Prayatna menjelaskan bahwa 1 *trainset* atau rangkaian LRT Jabodebek terdiri dari 6 kereta yang mampu memuat 1300 ketika *full load*. "Satu *trainset* LRT ini terdiri dari 6 kereta, jumlah penumpang yang bisa diangkut 170 orang duduk dan 566 berdiri. Dalam keadaan *full load* bisa mengangkut penumpang hingga 1300 orang," ungkap Gede.

Gede juga menambahkan bahwa LRT Jabodebek sudah mendapat sertifikasi dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) untuk GOA3 yakni sistem kereta tanpa masinis. "Dari 31 *trainset* sudah di sertifikasi DJKA. Untuk next GOA 3 kami sudah menyiapkan *engineering*. Selanjutnya sudah mendapat penugasan untuk kontrak MSA (*Maintenance Service Agreement*) sampai 5 tahun dan kita juga akan siapkan," papar Gede.

Sementara itu, tim Komisi VI DPR RI yang berkunjung ke Tangerang Selatan, meninjau pembangunan rumah susun (Rusun). Pembangunan Rusun yang bernama Rusun Samesta Mahata ini dipapresiasi, karena berbasis *Transit Oriented Development* (TOD) berada di Stasiun Rawa Buntu, Kota Tangerang Selatan, Banten. Ini merupakan sinergi antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan Kementerian Perhubungan, PT. KAI dan, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima pada saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI di lokasi pembangunan Rusun Samesta Mahata. "Kami sangat mengapresiasi pembangunan Rumah Susun berbasis TOD ini karena memang masyarakat sangat membutuhkan hunian yang dekat dengan sarana transportasi," ujarnya, Jum'at (27/01/2023).

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, rusun berbasis TOD merupakan hunian



Tim Kunspek Komisi VI DPR RI saat meninjau lokasi pembangunan Rusun Samesta Mahata.

alternatif selain rumah tapak yang dapat menjadi pilihan tempat tinggal masyarakat. Untuk itu, sinergi antara kementerian/lembaga pemerintah dengan BUMN sangat dibutuhkan. Nanti Rusun yang dibangun di kawasan Stasiun Rawa Buntu akan memiliki dua tower khusus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga tidak hanya untuk komersial.

Lebih lanjut, Aria menjelaskan konsep hunian berbasis TOD merupakan upaya pengembangan perkotaan yang menuntut keterpaduan antar pola dan struktur ruang wilayah. Hal itu mulai dari perumahan, komersial, dan ruang rekreasi dengan sarana transportasi umum yang dapat dijangkau masyarakat dengan berjalan kaki.

"Salah satu keuntungan tinggal bagi masyarakat di TOD adalah mereka bisa diantar jemput kereta api saat melakukan mobilisasi dari tempat tinggal ke tempat kerja. Jadi, ada integrasi antara hunian dengan transportasi massa misalnya *Commuter Line*," terang Politisi Fraksi PDI Perjuangan itu.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perumnas, Budi Saddewa Soediro mengatakan selain Rusun Samesta Mahata Serpong, saat ini juga ada beberapa Rusun

berkonsep TOD yang juga sedang dalam proses pembangunan, yaitu Rusun TOD di Stasiun Tanjung Barat, Stasiun Pondok Cina dan Stasiun MRT Lebak Bulus.

Menurutnya, terdapat keuntungan lain yang dapat diperoleh masyarakat jika nantinya memilih tinggal di rumah susun TOD. Keuntungannya adalah tersedianya hunian layak, transportasi murah-mudah, dan yang paling penting bisa ikut serta dalam mengurangi polusi udara karena penggunaan kendaraan pribadi bisa berkurang.

Budi Saddewa Soediro menerangkan Rusun TOD Rawa Buntu merupakan proyek sinergi BUMN, di mana penyediaan lahannya dilakukan oleh PT. KAI dan pembangunannya oleh Perumnas dengan kontraktor PT. Adhi Karya. Rusun berbasis TOD dibangun oleh Perum Perumnas di kawasan Stasiun Rawa Buntu Serpong, Tangerang Selatan.

Rusun tersebut berada di atas lahan seluas 24.626 meter persegi dan dibangun sebanyak enam tower dengan total hunian sebanyak 3.632 unit. Pada tahap pertama dibangun sebanyak tiga tower terdiri dari 1.816 unit terbagi menjadi 330 hunian subsidi dan 1.486 hunian non subsidi.

— pun, man/mh

Menutup Impor Bauksit

Pada kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Tanjung Pinang, Riau, sempat terwacanakan menutup impor bauksit. Pemerintah pun diserukan membantu persoalan teknis perusahaan tambang, agar pasokan bauksit lancar.

Setidaknya inilah yang disampaikan oleh Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari, Kamis (19/1/2023) lalu. Anggota

Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari mengeritik persoalan impor bauksit yang diusulkan PT. Bintang Alumina Indonesia (BAI) saat Komisi VII DPR berkunjung ke Riau. Minimnya pasokan bauksit sebagai bahan baku alumina harus diatasi sendiri oleh pemerintah, bukan mengeluarkan kebijakan impor.

Hal itu disampaikan Diah, usai pertemuan dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bupati Kabupaten Bintan, dan Direktur PT BAI. "Opsinya adalah pemerintah membantu menyelesaikan persoalan izin usaha pertambangan, sehingga pasokan terhadap perusahaan ini bisa berjalan dan bisa memproduksi dengan baik," jelas Diah.

Diah menerangkan yang dikeluarkan PT BAI sejak tahun lalu, pasokan bauksit berkurang, sehingga target produksi satu juta ton per tahun terkendala. Apalagi, kelak akan ada penambahan target menjadi dua juta ton. Investasi di sektor ini sangat besar, sekitar Rp17 triliun. Saat ini produksi bauksit hanya sekitar



FOTO: ARIEF/NR

Anggota Komisi VII DPR RI Diah Nurwitasari saat mengikuti pertemuan.

500.000 ribu ton. Fakta ini memang membuat perusahaan alumina kesulitan memproduksi ketika pasokan bauksitnya rendah.

Anggota Fraksi PKS itu juga menambahkan, dari ini ada dua persoalan. Pertama, sinkronisasi aturan. Pemerintah kerap membuat peraturan yang sulit dieksekusi di lapangan. "Aturan harus direncanakan secara komprehensif dan tidak berpihak kepada salah satu sektor, karena ini masih dalam satu konstruksi pemerintah yang sama," harap Diah.

Kedua, tambang tidak bisa lepas dari aspek lingkungan hidup. Berapa banyak lingkungan hidup rusak dengan aktivitas tambang. "Jangan sampai demi meraih keuntungan dari pertambangan, kita merusak alam yang dampaknya lebih mahal dibandingkan keuntungan yang kita dapatkan ketika kita mengeksploitasi sumber daya alam itu," seru Diah lagi.

Di Kota Bandung, Jawa Barat, Komisi VII DPR berkunjung ke PT Papandayan Cocoa Industries (Barry

Callebaut). Dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Komisi VII mendorong pengembangan industri pengolahan kakao di wilayah tersebut. Sekitar 15 tahun lalu, Indonesia pernah berjaya menjadi produsen bahan baku cokelat terbesar di dunia, yaitu biji kakao. Produksinya pernah mencapai 600 ribu ton per tahun dan sekarang tersisa hanya 200 ribu ton per tahun.

"Terjadi penurunan produksi kakao. Sementara tingkat konsumsi cokelat masyarakat kita justru kian meningkat, karena perbaikan taraf hidup, kelas menengahnya semakin kuat dan UMKM-nya semakin berkembang," ungkap Eddy, Kamis (19/1/2023) lalu. Ia menambahkan, imbas dari menurunnya produksi kakao nasional itu, maka terjadilah impor bahan baku cokelat, yaitu biji kakao. Impor tersebut jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun untuk memenuhi kebutuhan produksi pabrik pengolahan kakao di Indonesia.

Komisi VII DPR ingin memberi dukungan pada industri kakao di

Indonesia, Para produsen pengolah kakao harus kembali mendapat perhatian, agar komoditas kakao nasional bisa mengekspor lagi ke luar negeri. Di Bandung itu, Komisi VII mendiskusikan penurunan produksi kakao sebagai bahan baku industri cokelat, terutama sektor makanan (food sector) kelas UMKM, seperti usaha kue rumahan, cafe, resto minuman coklat, dan sebagainya.

"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita untuk tidak saja menguatkan industri hilirnya (sektor industri pengolahan), tetapi juga menjamin suplai bahan baku dari dalam negeri. Perlu ada kombinasi antara cokelat impor dengan cokelat dalam negeri supaya rasanya bisa masuk di konsumen Indonesia," tandasnya.

Legislator Dapil Jawa Barat III (Kabupaten Cianjur dan Kota Bogor) ini menilai, peta pengembangan industri cokelat di Kementerian Perindustrian sudah cukup baik. Meskipun demikian, tetap diperlukan penguatan, peningkatan kapasitas, dan inovasi produk terus menerus, karena selera konsumen terus berubah. "Industri ini berorientasi ekspor, maka kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri supaya basis ekspor kita besar, sehingga meningkatkan nilai perdagangan kita dan surplus," pungkas Eddy.



FOTO: JIWA/NR

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI saat meninjau secara langsung terkait kegiatan dan produksi Batubara di PT Bukit Asam Coal Terminal di Bandar Lampung.

Sementara itu, di PT. Bukit Asam, Lampung, delegasi Komisi VII DPR RI melihat dari dekat persoalan produksi batu bara. Kamis (19/1/2022) silam di Lampung. Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto yang memimpin delegasi ini, meninjau langsung kegiatan produksinya di Bandar Lampung.

Seperti diketahui, PT Bukit Asam Coal Terminal di Bandar Lampung, PT Bukit Asam Tbk menjadi salah satu perusahaan tambang batu bara

berskala nasional dan terbesar di Indonesia. Bahkan, dalam visinya, perusahaan pertambangan batu bara ini, ingin menjadi perusahaan energi kelas dunia yang sekaligus peduli terhadap lingkungan.

Jaringan bisnis dan wilayah operasi perusahaan plat merah ini tercatat 68.777 ha yang berlokasi di beberapa daerah di pulau Sumatera dan Kalimantan. Total produksi batu bara PT Bukit Asam Tbk hingga Kuartal III 2022 mencapai 27,7 juta ton, meningkat 21 persen dibanding Kuartal III 2021 yang sebesar 22,9 juta ton.

Sedangkan penjualan batu bara perusahaan ini sampai dengan Kuartal III 2022 sebanyak 23,5 juta ton, tumbuh 12 persen secara tahunan. Pelabuhan Tarahan merupakan dermaga terbesar yang dimiliki PT. Bukit Asam Tbk. Beroperasi sejak tahun 1986 sebagai terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS), yang pada awalnya disiapkan untuk pengapalan batu bara hasil produksi tambang di Tanjung Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) di Suralaya, Provinsi Banten. **afr, oji, ssb/mh**



FOTO: OJI/NR

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI saat mengunjungi PT Papandayan Cocoa Industries (Barry Callebaut)

Menyorot Intoleransi di Lembaga Pendidikan Keagamaan



Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha saat mengikuti pertemuan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

FOTO: RIA/NR

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyoroti soal paham-paham intoleransi di lembaga pendidikan keagamaan, seperti madrasah dan pesantren. Bibit intoleransi yang diajarkan itu kelak akan menjadi paham radikalisme ke depan.

“**A**da beberapa lembaga atau pondok pesantren yang mengajarkan tentang intoleransi yang kemudian dapat memicu radikalisme,” ungkap Ali usai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/1/2023) silam. Ia menyebut, ajaran ini dapat menimbulkan perpecahan, baik di

komunitas Islam maupun antarumat beragama. Paham ajaran itu menyalahi ajaran agama itu sendiri.

Perpecahan yang ditimbulkan dari paham tersebut mengakibatkan pertumpahan darah antarsesama umat Islam. Di daerah pemilihannya sendiri, misalnya, di Pamengkasan, Madura. Warga setempat marah dengan paham ajaran tertentu, karena membida'ah ajaran Nabi Muhammad SAW. Ali mempertanyakan Kakanwil Provinsi Jawa Timur soal pesantren

“

Oleh karena itu, kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan lebih selektif dalam memberikan izin kepada lembaga pendidikan keagamaan, agar kasus yang terjadi di Pamekasan tidak terjadi di tempat lain.

Muhammad Ali Ridha
Anggota Komisi VIII DPR RI

yang mengajarkan paham intoleransi tersebut ternyata belum memiliki izin.

"Nah, itu kemudian kami pertanyakan, kenapa bisa ada lembaga yang belum memiliki izin lantas mereka beroperasi," ungkap Ali. Oleh karena itu, Ali meminta kepada pemerintah meningkatkan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan lebih selektif dalam memberikan izin kepada lembaga pendidikan keagamaan, agar kasus yang terjadi di Pamekasan tidak terjadi di tempat lain.

Masih di tempat yang sama, Anggota Komisi VIII DPR My Esti Wijayati menyorot soal kekerasan terhadap anak di sekolah keagamaan. Harus ada regulasi yang mengatur soal ini, agar anak-anak tak menjadi korban kekerasan di sekolah.

"Kemenag dirasa perlu membuat regulasi untuk melakukan pengawasan lebih mendalam dan secara detail bisa memberikan penilaian dan kontrol, agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di beberapa tempat menjadi dan mengemuka di media massa, menjadi keprihatinan mendalam bagi kita semua," tandas Esti.

Regulasi itu, kata Esti, tidak hanya mencakup lembaga pendidikan keagamaan Islam saja, namun di seluruh lembaga pendidikan agama yang ada di bawah Kemenag. "Kita tidak hanya membuat untuk yang Islam, Budha juga punya pendidikan keagamaan, Hindu ada, Katholik ada itu seminari-seminari yang juga berasrama di bawah Kemenag," ungkap Esti.

Kemudian terkait penanganan kekerasan terhadap anak di lembaga pendidikan keagamaan, Esti mendorong agar Kanwil Kemenag Jawa Timur membuat modul untuk guru dan anak didik. "Seharusnya kita sudah punya modul untuk memberikan pemahaman kepada guru maupun anak didik. Mungkin kita bisa adopsi sejumlah undang-undang



Anggota Komisi VIII DPR RI My Esti Wijayati saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR.

FOTO: KIKI/ANR

“

Seharusnya kita sudah punya modul untuk memberikan pemahaman kepada guru maupun anak didik. Mungkin kita bisa adopsi sejumlah undang-undang yang mengatur tentang tindak pencegahan kekerasan seksual. Kanwil Jawa Timur bisa menjadi percontohan mendahului membuat modul pemahaman kekerasan seksual.

My Esti Wijayati
Anggota Komisi VIII DPR RI

yang mengatur tentang tindak pencegahan kekerasan seksual. Kanwil Jawa Timur bisa menjadi percontohan mendahului membuat modul pemahaman kekerasan seksual," harap Esti.

Terakhir, politisi PDI Perjuangan ini, menyoroti akurasi validitas data anak didik di lembaga pendidikan keagamaan yang dimiliki Kanwil Kemenag Jawa Timur. Mengingat akurasi data itu sangat penting terhadap program-program pendidikan keagamaan yang diberikan Kemenag terhadap Kanwil Kemenag Jawa Timur.

"Jadi ini supaya akurasi data program-program yang diberikan melalui Kemenag tidak terjadi *double* data. Ingat *double* data itu implikasinya tidak sekadar menerima uangnya *double*, tetapi implikasi hukum terkait dengan pengelolaan keuangan, harus bisa kita pastikan dari tujuh lembaga di Jawa Timur ini, tutup Esti. — qq/mh

Komisi IX Fokus Awasi FKTP



Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena saat bertukar cenderamata usai pertemuan Kunspek Komisi IX DPR RI.

Komisi IX DPR RI kali ini memberi perhatian serius pada pelayanan kesehatan di setiap Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di berbagai daerah. Pemetaan masyarakat atas akses kesehatan jadi objek pembahasan dengan para mitra kerja dan Pemda.

DI Yogyakarta, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengapresiasi pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah setempat. "Mereka bisa mengoptimalkan betul agar masyarakat menggunakan program pemerintah dan pergi ke FKTP untuk mengenali dirinya sehat atau sakit," jelas Melki di Yogyakarta, Kamis (19/1/2023) lampau.

Melki menekankan, setiap

Puskemas harus komprehensif dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang dilayani. "Tentu kita harus memastikan bahwa seluruh Puskemas itu bisa mempunyai data dan peta tentang latar belakang masyarakat yang dilayani. Itu akan memperkuat dan memeperjelas layanan kesehatan di lapangan," terangnya.

Legislator Dapil NTT II itu melanjutkan, dalam menyukseskan program pemerintah di bidang

kesehatan, semua FKTP harus yang disiapkan secara optimal. Kemudian soal pembiayaan dari pemerintah pusat melalui DAK untuk sektor kesehatan maupun anggaran Pemda harus berpadu dan bersinergi.

Yogyakarta termasuk yang terbaik dalam pelayanan akses kesehatan bagi warganya. Angka UHC (*universal health coverage*) sudah di atas 97%. Index pembangunan manusia juga sudah bagus. Politisi Partai Golkar itu berharap, semua provinsi bisa menyontoh Yogyakarta. Dikatakan Melki, FKTP menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi pelaksanaan agenda transformasi kesehatan nasional. Namun, secara nasional, kualitas layanan di FKTP dinilai belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan minimal.

Sebaliknya di Langkat, Sumatera

FOTO: AARON/NERA

Utara, layanan kesehatan FKTP-nya dinilai belum memenuhi standar pelayanan. Demikian penilaian yang disampaikan Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene di hari yang sama, Januari lalu. Felly menambahkan, usai pandemi Covid-19 saat ini Indonesia sedang menyiapkan transformasi pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat.

"Sistem kesehatan kita saat ini masih harus diperbaiki. Kini, Indonesia tengah mengupayakan transformasi kesehatan. Salah satu pilar utamanya adalah transformasi layanan primer yang dijalankan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pencapaian indikator kesehatan nasional," katanya.

Karenanya, terobosan dan kebijakan yang dapat mengakselerasi pelaksanaan agenda transformasi kesehatan primer di seluruh Indonesia adalah penguatan upaya promotif preventif, termasuk deteksi dini FKTP.

Plt Bupati Kabupaten Langkat Syah Afandin memaparkan, saat ini Kabupaten Langkat yang terdiri dari 1.084.108 jiwa penduduk, hanya memiliki satu rumah sakit umum daerah yang ada di Kecamatan Tanjung Pura serta enam rumah sakit umum swasta.

Ia juga menyampaikan, saat ini daerahnya masih memiliki Puskesmas yang belum sesuai standar fasilitas



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat mengikuti pertemuan dengan Wakil Bupati Sidoarjo.

FOTO: KIKI/ANR

kesehatan, diantaranya Puskesmas Marike, Bukit Lawang, Stabat, Karang Rejo, Secanggang, Pantai Cermin, Stabat Lama, Sei Bamban, dan Pematang Jaya.

Pihaknya berharap, dapat dibangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kota Stabat, sebagai ibu kota Kabupaten Langkat. "Saya memohon kepada Komisi IX DPR RI untuk membangun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di pusat ibu kota Kabupaten Langkat, yakni di Stabat," harapnya.

Komisi IX DPR juga berkunjung

ke Sidoarjo, Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh yang memimpin tim ini menyatakan, Puskesmas terdepan dalam melayani masyarakat di Kantor Bupati Sidoarjo, Jawa Timur, Sidoarjo, Kamis, (19/1/2023) lalu.

Ninik menjelaskan, Puskesmas mempunyai tiga fungsi pokok, yaitu sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat, membina peran masyarakat di wilayah kerjanya, dan meningkatkan kemampuan hidup sehat dan memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Namun, nilai Ninik, Puskesmas saat ini terbebani pada persoalan administrasi. "Kalau Puskesmas ini pegawainya hanya sibuk ngurusin administrasi yang numpuk, bagaimana Puskesmas memberikan upaya preventif, promotif, dan kuratifnya. Ia menyerukan, agar Kementerian Kesehatan mengembalikan tugas dan peran sejatinya puskesmas. "Tolong kembalikan fungsi Puskesmas sebagai fungsi preventif, promotif dan kuratif," tutup Ninik.

✉ aar,ann,qq/mh



Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene saat mengikuti Kunspek Komisi IX.

FOTO: ANNE/ANR

Mewujudkan Visi Indonesia 2045



FOTO: JULFI/ANR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian saat memimpin pertemuan kunker Panja Perguruan Tinggi Komisi X.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi X DPR RI memfokuskan diri pada program Visi Indonesia 2045. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian yang memimpin kunjungan kerja ini ingin melihat dari dekat visi Indonesia 2045 pada sektor pendidikan di Sulawesi Selatan.

Menurut Hetifah, Visi 2045 ini akan berdampak pada kemampuan menghasilkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Namun, SDM yang berpengetahuan dan berketerampilan itu tidak cukup. Yang lebih penting, menurutnya, bagaimana SDM Indonesia memiliki mental, karakter, moral yang kuat, jujur, disiplin, peduli, dan bertanggung jawab.

"Kami di komisi X, sudah membentuk satu Panja terkait dengan

Perguruan Tinggi. Karena perguruan tinggi adalah satu institusi yang sangat penting untuk menghasilkan SDM yang memang berkualitas, bukan hanya dari segi pengetahuan tapi juga karakter dan mental. Ini membutuhkan dukungan kebijakan yang kondusif dengan anggaran yang memadai," papar Hetifah di Makassar, Kamis (26/1/2023) lalu.

PTN dan PTS diimbau mengetahui apa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Sehingga, tujuan dan cita-cita perguruan tinggi bisa menghasilkan

SDM yang berkualitas dapat terwujud. Ditambahkan politisi Partai Golkar itu, salah satu masalah yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan anggaran. Saat ini, banyak sekali yang butuh dukungan anggaran, yang mungkin tidak dirasakan cukup bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi swasta.

Perguruan tinggi membutuhkan peningkatan akreditasi dan itu butuh biaya. Para dosennya juga butuh jam terbang lebih banyak dengan melanjutkan studi yang lebih tinggi. Di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Komisi X juga menyorot hal yang sama. Anggota Komisi X DPR RI Sodik Mudjahid yang memimpin tim Komisi X berkunjung ke Universitas Lambung Mangkurat.

Dikatakan Sodik, saat ini diperlukan penguatan kemampuan perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS, dalam mencetak

SDM yang berpengetahuan dan trampil, berkarakter, bermoral dan bermental kuat, peduli, serta bertanggungjawab.

"Perbaiki sistem dan peningkatan kesejahteraan untuk para dosen, Perbaiki sistem dalam seleksi siswa mandiri. Kami mendapat usulan dan aspirasi. Kami menangkap ada beberapa masalah dari Rektor Universitas Lambung Mangkurat, yaitu masalah dosen-dosen yang belum naik pangkat," papar Sodik di Banjarmasin, Kamis (26/1/2023) silam.

Perguruan tinggi dituntut mampu mencetak SDM unggul, trampil, dan berkarakter. Tapi, perguruan tinggi masih menghadapi masalah mutu, relevansi, akses, daya saing, dan tata kelola. Komisi X pun memahami bahwa saat ini perlu dukungan dan keberpihakan terhadap penyelenggaraan PTS sebagai penanggung jawab pendidikan tinggi yang dominan di Indonesia.

Permasalahan seperti *dis-equalities, quality, relevancy*, dan *competitiveness* yang berlangsung pada PTS, agar segera mendapatkan solusi. Selain itu juga diperlukan *refocusing* kinerja PTN, yang didukung oleh peningkatan



FOTO: DEP/NR

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf saat memberikan sambutan pada diskusi dengan rektor dan jajaran sivitas akademika Unimed dan beberapa universitas lainnya.

mutu, relevansi, akses, daya saing dan tata kelola, untuk mendapatkan *output* yang maksimal.

Sementara di Sumatera Utara, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf melakukan diskusi dengan rektor dan jajaran civitas akademika Universitas Negeri Medan (Unimed) dan beberapa universitas negeri dan swasta lainnya.

"Hari ini kita mendengarkan dari perguruan tinggi, baik swasta, negeri, maupun politeknik di Kota Medan dan Sumatera Utara. Banyak hal terkait kebijakan-kebijakan yang mungkin dirasa belum bisa disesuaikan dengan

yang ada di daerah, terutama dari sisi kebijakan anggaran, akreditasi, biaya, dan lain-lain," ungkap Dede di Medan, Sumut, Kamis (26/1/2023) silam.

Ia menyatakan, program yang baik sering kali tidak didukung oleh faktor anggaran yang besar dan masih banyak terjadi kendala di lapangan. Di satu sisi, ada beberapa perguruan tinggi yang bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan yang baru, tetapi banyak juga kampus-kampus swasta yang belum bisa mengadopsi kebijakan-kebijakan baru tersebut.

"Ini butuh proses dan butuh keberpihakan anggaran. Kita tentu akan mendorong lebih banyak lagi kebijakan yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jangan sampai kebijakannya terlalu tinggi tetapi anggarannya tidak mencukupi," kata Dede.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Negeri Medan (Unimed) Syamsul Gultom menyampaikan bahwa Unimed saat ini memiliki 29.037 mahasiswa, 1058 dosen dan 464 tenaga kependidikan. UNIMED memiliki 82 Program Studi dengan akreditasi 61 persen akreditasi Unggul/A, 33 persen terakreditasi Baik Sekali/B/Baik dan 6 persen prodi baru yang sedang menunggu proses visitasi BAN-PT.

[upi,ssb,deb/mh](#)



FOTO: JIWA/NR

Tim Kunker Komisi X DPR RI saat foto bersama usai pertemuan kunker di Banjarmasin.

Produk UMKM Harus Berorientasi Ekspor

Pada kunjungan kali ini, Komisi XI DPR RI memberi perhatian penuh pada produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang berorientasi ekspor. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP mendukung para pelaku UMKM berorientasi ekspor. Di sinilah perlu dukungan pemerintah, salah satunya lewat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

Dolfie menyampaikan hal ini saat memimpin kunjungan kerja Komisi XI DPR ke Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/1/2023) silam. "LPEI ini dibentuk pemerintah untuk mendukung UMKM yang berorientasi ekspor. Kita bisa melihat bahwa sekarang ini pemulihan ekonomi sedang berjalan, sehingga ekspor kita pun sangat tergantung pada pemulihan ekonomi global. Dan dampaknya sudah terlihat. Ini dapat memperluas hubungan bagi UMKM yang berorientasi ekspor," kata Dolfie usai mengunjungi PT Pearland di Boyolali. Ia menambahkan, peran LPEI adalah membina UMKM agar mampu menghasilkan produk-produk yang bernilai jual tinggi dan berorientasi ekspor. Ini sekaligus dapat mendukung percepatan peningkatan



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat memimpin Kunjungan Spesifik mengunjungi PT Pearland di Boyolali.

ekspor nasional, membantu peningkatan produksi nasional yang berdaya saing tinggi, serta memiliki keunggulan ekspor.

"LPEI sekarang terus membina hubungan UMKM berorientasi ekspor dan kami ingin lebih diperluas lagi semakin banyak mitra UMKM yang dibina oleh LPEI untuk mendukung ekspor," terang Dolfie. Lebih lanjut, berbagai guncangan dunia yang diproyeksikan terjadi di masa mendatang turut berdampak besar terhadap keberlangsungan perekonomian. Ini menjadi kunci dalam menjawab tantangan ekonomi masa depan untuk membawa negara keluar dari situasi sulit menuju Indonesia maju.

"Resesi ekonomi jelas bukan sesuatu yang diharapkan dalam perekonomian, dengan ini harapan dunia usaha bisa bergerak dan LPEI

bisa berperan dalam mendukung UMKM yang berorientasi ekspor," tutupnya.

Di Kalimantan Selatan, delegasi Komisi XI DPR mengapresiasi PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mendukung pembiayaan infrastruktur nasional. Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro yang memimpin tim ini, mengatakan, PT SMI sebagai Badan Layanan Umum (BLU) yang bernaung di bawah Kementerian Keuangan, harus bisa berperan aktif bagi kemajuan dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

"Nah, PT SMI telah membantu di beberapa kabupaten di Kalsel, seperti Hulu Sungai Utara, Kota Banjar berupa pembangunan pasar, rumah sakit, dan sebagainya," jelas Fauzi kepada **Parlementaria** usai mengikuti pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Bappenas, Perwakilan

Pemprov Kalsel, dan *stakeholder* di Banjarmasin, Kamis (2/2/2023) lampau.

Diketahui, PT SMI telah menyalurkan fasilitas pembiayaan publik kepada Pemprov Kalsel. Di antaranya pembangunan pasar tradisional di Kota Banjarbaru, pembangunan RSUD di Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Utara, serta pengembangan Bandara Syamsuddin Noor.

Fauzi menekankan dengan kondisi kesehatan keuangan PT.SMI, perusahaan pelat merah tersebut harus bisa memberi *multiplier effect* terhadap progres proyek strategis nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Ia pun berharap, kehadiran PT SMI dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, termasuk juga terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur. "PT SMI ini dengan kondisi keuangan yang sangat luar biasa terlebih dengan nilai proyek yang sudah digelontorkan hampir senilai Rp819 triliun harus memberikan *multiplier effect* khususnya di Kota Banjarmasin," tutup politisi Fraksi Partai Nasdem itu

Sementara di Sidoarjo, Jawa Timur, Anggota Komisi XI DPR RI



FOTO: AYU/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Indah Kurniawati saat mengikuti kunspek ke Kawasan Berikat Mandiri.

Indah Kurniawati mengapresiasi perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang memproduksi sepatu merek internasional dengan menempatkan salah satu pabrik terbesarnya di Sidoarjo, Indonesia. Ia juga mencermati perusahaan ini yang merekrut sebagian besar tenaga kerja lokal dan penyandang difabel.

"Saya baru pertama kali masuk ke PT Ecco Indonesia ini. Saya surprise, bangga dan berterima kasih, karena perusahaan ini mampu memperlakukan Kawasan Berikat

Mandiri ini dengan sangat baik. Merekrut 7000 lebih karyawan lokal, yang mayoritasnya perempuan. Bahkan, banyak di antara mereka penyandang difabel, yang mereka sebut *physical challenge*. Tadi kami lihat ada yang tuna wicara, namun mereka bekerja berdasarkan keahliannya," ungkap Indah, di Kawasan Berikat Mandiri, Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (19/1/2023) lampau.

Dijelaskan politisi Fraksi PDI Perjuangan ini, perusahaan tersebut menjadi salah satu perusahaan di Kawasan Berikat Mandiri yang mendapat insentif berupa kebijakan bebas bea impor dan ekspor. Meski demikian, negara tidak hanya mampu memberikan kontribusi berupa devisa negara dari kegiatan perdagangan perusahaan tersebut, namun juga menyerap tenaga kerja lokal.

"Kita mendukung seluruh kebijakan pemerintah, yang sebelum memutuskan kebijakan, pasti sudah melakukan observasi dengan rapat-rapat kerja yang intensif dengan berbagai pakar atau ahli, sehingga dibuat keputusan yang lebih besar untuk negara. Dan hasilnya kita lihat sendiri, semua melebihi target," pungkasnya.

gys,srw,ayu/mh



FOTO: FITRI/NR

Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi Amro saat mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi XI.

Melihat Kesiapan Daerah Sambut Pemilu 2024

Satu tahun lagi, tepatnya 14 Februari 2024 mendatang bangsa ini tidak hanya akan menggelar pesta demokrasi biasa. Namun akan menjadi tahun politik terakbar bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, di tahun itu untuk pertama kalinya pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar secara serentak di seluruh Indonesia. Lantas, bagaimanakah kesiapan daerah dalam menyongsong even terakbar lima tahunan ini?

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memantau persiapan menjelang pemilu 2024 di Provinsi Bengkulu mengungkapkan, sejatinya daerah-daerah sudah menyatakan kesiapannya untuk menggelar pemilu serentak. Bahkan, persiapan yang dilakukan daerah sebenarnya sudah berlangsung sejak dimulainya tahap awal pendaftaran partai politik.

Meski demikian, masih ada beberapa catatan yang memang harus dibenahi. Pada data pemilih misalnya, terdapat beberapa persoalan yang muncul seperti



FOTO: ED7/NR

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

terbatasnya akses informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan input data pemilih dari instansi induk belum maksimal.

"Permasalahan krusial lainnya, seperti penyediaan data pemilih, pemutakhiran dan penyusunan data dan daftar pemilih, penyusunan daftar pemilih tambahan dan daftar pemilih khusus," ungkap Doli saat meninjau persiapan pemilu di Provinsi Bengkulu, beberapa waktu lalu. Karenanya, politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta agar KPU (komisi pemilihan umum) dan Bawaslu (badan pengawas pemilu) Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi secara berkelanjutan untuk melakukan pendataan dan perekaman pemilih.

Selain itu, diharapkan peran serta atau keterlibatan masyarakat

saat ini. Karena pesta demokrasi ini akan menjadi pendidikan politik bagi masyarakat. Hingga pada akhirnya harapan pemilu yang berkualitas akan semakin mendekati kenyataan. Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Irwan Ardi Hasman yang mengatakan, daerah-daerah masih terus berbenah dalam mempersiapkan pemilu serentak di tahun 2024 mendatang.

Saat meninjau persiapan pemilu di Kota Bogor, Jawa Barat, Irwan mengingatkan bahwa tingkat partisipan pemilu difabel masih tergolong rendah, yakni sekitar 84 persen dari target awal yang ditetapkan sekitar 90 persen. Tentu ada kendala yang dihadapi kaum difabel untuk ikut menggunakan hak pilihnya dalam kontes pesta demokrasi tersebut. Selain belum massifnya sosialisasi, pemilu untuk

kaum difabel, sarana dan prasarana pendukung terbilang masih kurang. Seperti kontur tanah dan padatnya wilayah Kota Bogor yang harus diantisipasi membantu para difabel dalam melaksanakan hak politiknya pada pemilu 2024 mendatang.

"Saya berharap ke depan di 2024 ini TPS-TPS (tempat pemungutan suara) dirancang sedemikian rupa, dipilih lokasi-lokasi yang familiar untuk orang-orang difabel. Jadi, tidak menyulitkannya, seperti naik tangga dan sebagainya," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini di Kantor Wali Kota Bogor. Begitu juga dengan

“

Saya berharap ke depan di 2024 ini TPS-TPS (tempat pemungutan suara) dirancang sedemikian rupa, dipilih lokasi-lokasi yang familiar untuk orang-orang difabel. Jadi, tidak menyulitkannya, seperti naik tangga dan sebagainya.

Irwan Ardi Hasman
Anggota Komisi II DPR RI



FOTO: KRESNO/NR

“

Begitu juga dengan persoalan data pemilih dan warga negara yang belum mendapatkan elektronik KTP. Saya berharap agar segera diselesaikan. Sehingga, saat penyelenggaraan pemilu besok tidak ada lagi dipersoalkan

Agung Widiartoro
Anggota Komisi II DPR RI



FOTO: OJI/NR

huruf braille untuk penyandang tuna netra. Hal ini tentu sangat membantu dalam menggunakan hak politiknya di pemilu serentak nanti.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI Agung Widiartoro memberikan catatan penting terkait persiapan pemilu 2024 di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Isu mengenai data pemilih masih menjadi persoalan yang harus segera dibereskan. Karena, tidak sedikit orang yang sudah meninggal dunia masuk dalam data pemilih. Begitupun dengan persoalan kepemilikan KTP pemilih, yang akan menjadi syarat penting dalam pemungutan suara.

Politisi dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX ini minta kepada pemerintah Kabupaten/Kota setempat untuk segera jemput bola, bekerja sama dengan kepala desa, RT dan RW, maupun pemuka-pemuka agama. Pihaknya meyakini mereka punya data yang lebih valid terkait warganya yang sudah meninggal.

"Begitu juga dengan persoalan data pemilih dan warga negara yang belum mendapatkan elektronik KTP. Saya berharap agar segera diselesaikan. Sehingga, saat penyelenggaraan pemilu besok tidak ada lagi dipersoalkan," harapnya. Baik Doli, Irwan, dan Agung berharap, sisa waktu yang tinggal sebentar

lagi ini dapat terus digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan berbagai persiapan jelang pemilu serentak tahun 2024 mendatang.

Pemilu serentak ini meliputi pemilihan presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Dilanjutkan pada 27 November 2024, pemilihan kepala daerah, seperti gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Daniel Mebri. Dikutip dari ANTARA, Jayapura yang mengatakan, tahapan mulai dari proses pendaftaran partai, verifikasi, sampai penetapan partai politik, sudah berjalan dengan baik. "Rangkaian persiapan jelang pemilu 2024 itu sudah kami lakukan sejak 2022. Pemetaan daerah pemilihan (dapil) dan kursi sudah dilaksanakan sejak Oktober 2022 hingga Februari 2023," ungkap Daniel.

Sebelumnya, lanjut daniel, pada 2019 telah ditetapkan 25 kursi yang akan diperebutkan pada pesta demokrasi ini. Pada 2024 terjadi penambahan lima kursi lagi, sehingga menjadi 30 kursi dengan lima dapil di Papua. Sedangkan secara nasional tercatat 18 partai politik yang sudah resmi terdaftar di KPU RI. — ayu/mh

Di PUIC Aljazair: BKSAP Suarakan Kepentingan Umat Islam

Delegasi DPR RI menyuarakan banyak kepentingan umat Islam pada Forum PUIC yang diselenggarakan di Algiers, Aljazair (26-31 Januari 2023) silam. Di antaranya terkait kemerdekaan di Tanah Palestina, Islamophobia, hingga partisipasi perempuan di negara-negara muslim.



FOTO: BKSAP

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendukung Palestina saat mengikuti sesi forum 17th Session of the Parliamentary Union of the OIC (PUIC) Conference and other Related Meetings.

Konflik yang terjadi di tanah Palestina hingga kini masih terus berlanjut. Tak ada perkembangan yang signifikan, masyarakat sipil Palestina masih terintimidasi dan kian terpojokkan di tanah airnya sendiri. Hal ini tak luput dari perhatian delegasi DPR RI, yang dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penghentian intimidasi dan kekerasan yang dilakukan Israel kepada rakyat Palestina, disuarakan

dengan lantang oleh delegasi DPR RI. Berbicara di salah satu sesi forum 17th Session of the Parliamentary Union of the OIC (PUIC) Conference and other Related Meetings, Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon mendukung Palestina memutus kerja sama keamanan dengan Israel di Jenin. Apalagi pada Kamis (26/1) pasukan Israel kedatangan menyerang kamp pengungsian di Jenin yang menewaskan sedikitnya 10 warga sipil Palestina dan melukai beberapa lainnya.

"Ini saatnya otoritas Palestina lebih mandiri, berani, dan bersatu, terutama setelah Deklarasi Aljazair tentang rekonsiliasi antara faksi-faksi Palestina," tegas Fadli Zon. Serangan terhadap kamp Jenin dirasa sangat memilukan dan sangat tidak manusiawi, sehingga harus dihentikan. Fadli berpandangan serangan tersebut sudah mengarah tindakan genosida. Dengan kata lain, Israel bertujuan membuat Palestina punah.

"Ini bukan hanya pembantaian. Sekali lagi, ini adalah genosida. Tidak diragukan lagi. Hal yang paling memilukan di antara para korban terdapat seorang wanita berusia 61 tahun," urai Fadli. Berkaca pada kejadian ini, Fadli juga prihatin dengan masa depan perdamaian Palestina dan Israel. Sehingga, sangat penting memastikan pertanggungjawaban Israel atas semua pelanggaran hak asasi manusia. "Mahkamah Internasional perlu menggalang dukungan dari dunia internasional untuk menekan Israel agar mematuhi hukum internasional," pungkasnya.

Di sesi 'Standing Specialized Committee on Cultural and Legal Affairs and Dialogue of Civilizations and Religions', Wakil Ketua BKSAP DPR RI Gilang Dhielafararez melabeli intervensinya dengan judul Melindungi Masjid Al-Aqsa dari Ancaman Israel. Judul tersebut bukan tanpa alasan. Gilang berpandangan bahwa kunjungan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir ke kompleks Masjid Al-Aqsa di Palestina awal tahun 2023 ini merupakan tindakan provokatif.

"Kami berpandangan, tindakan Menteri Keamanan Israel tersebut berpotensi mengancam status quo Masjid Al-Aqsa. bahkan dapat menimbulkan ketegangan dan memicu kekerasan. Kita tidak ingin melihat hal ini terjadi, apalagi jika sampai menyebabkan pelanggaran HAM terhadap warga sipil," tutur Gilang.

Desakan kepada Israel untuk

menghentikan provokasinya di Tanah Palestina tak bisa dilakukan sendiri. Dunia internasional harus satu pandangan yang sama untuk memastikan agar provokasi-provokasi Israel kepada Palestina segera dihentikan. Komunitas internasional harus menekan Israel bertanggung jawab atas semua tindakan tidak manusiawi, provokatif, serta melanggar HAM terhadap warga Palestina.

Untuk itu, resolusi dari sidang PUIC ini harus berisikan desakan agar Israel menjalankan resolusi Majelis Umum PBB yang terbaru berkenaan dengan praktik-praktik pelanggaran HAM yang dilakukannya atas rakyat Palestina di wilayah pendudukan Palestina. "Saya menggarisbawahi bahwa sangat penting menghormati situs atau tempat yang dianggap suci oleh kalangan masyarakat (Al-Aqsa) serta menahan diri dari tindakan-tindakan yang provokatif," tegas Gilang.

Tindakan Provokatif Pemicu Islamophobia

Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan ujaran kebencian berbeda dengan kebebasan berkespresi. Apalagi menjadikan atribut suatu agama sebagai objek dari suatu ujaran kebencian akan sangat sensitif dan provokatif bagi pemeluk agama tersebut. "Sangat memprihatinkan jika pernyataan atau pernyataan tersebut juga dibuat oleh politisi negara lain, yang dapat menyebabkan kekerasan, kebencian, dan perpecahan di antara warga sipil. Dan lebih jauh lagi, menciptakan ketidakstabilan yang dapat berdampak pada perekonomian," terang Didi.

Baru-baru ini, umat muslim terhenyak melihat tindakan seorang politisi Swedia yang membakar Alquran di depan Kedutaan Besar Turki di Swedia. Didi berharap, partai politik di semua negara wajib melarang anggotanya menyampaikan komentar atau pernyataan yang menghina dan



FOTO: BKSAP

Anggota BKSAP DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin dan Anggota BKSAP DPR RI Dewi Coryati saat mengikuti Forum PUIC.

anti-Islam baik di depan umum maupun pribadi.

"Sejalan dengan rekomendasi Laporan Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang berjudul "Melawan Islamofobia/kebencian anti-muslim untuk menghapuskan diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama atau keyakinan," tuturnya.

Ia mengimbau parlemen yang hadir dalam Forum PUIC memastikan pejabat pemerintah di semua negara memahami standar dan prinsip HAM. Sehingga, membuat mereka menyadari bahwa menghasut kebencian agama tidak diperbolehkan dalam semua keadaan.

Partisipasi Perempuan dalam Penyelesaian Konflik

Parlemen Indonesia mendukung partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian. Hal ini pula yang menjadi harapan Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 on

Women, Peace and Security (UNSCR 1325), yang sudah diadopsi hampir 23 tahun yang lalu.

Dukungan itu disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Dewi Coryati pada sesi 10th Session of the PUIC Conference of Muslim Women Parliamentarians, Sidang Umum PUIC. "Memastikan dan meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan merupakan prasyarat bagi perdamaian dan stabilitas dunia," tegas Dewi.

Ada suatu penelitian yang menunjukkan bahwa dengan adanya partisipasi perempuan, dapat meningkatkan kemungkinan kesepakatan damai bertahan lebih lama. Setidaknya dalam dua tahun sebesar 20 persen, dan 35 persen bertahan selama 15 tahun.

"DPR RI juga menyambut baik kerja sama dan kolaborasi, berbagi informasi dan bertukar pikiran, serta memfasilitasi kegiatan dan/atau program dengan Parlemen Anggota PUIC. Tentunya upaya tersebut untuk memperkuat dan memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi penuh dan memiliki peran substantif dalam penyelesaian konflik dan proses perdamaian," pungkasnya.

 bksap/mh



**DAERAH PEMILIHAN
(DAPIL)**



Hendrawan Supratikno

Gelar Penyuluhan Literasi Keuangan

Tidak ingin masyarakat Indonesia terjebak pinjaman online (Pinjol) ilegal, politisi Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menggelar penyuluhan jasa keuangan dengan tema ‘Waspada Investasi’ di Pekalongan. Baginya, penyuluhan ini bisa membuka ruang sekaligus akses untuk masyarakat mengetahui tata cara investasi uang secara legal dan aman.

Untuk menjelaskan penyuluhan ini merupakan bagian dari program kemitraan dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki literasi keuangan yang mumpuni. Dirinya sepakat penyuluhan yang efektif adalah penyuluhan dengan konsep jempot bola. Di mana, lembaga-lembaga terkait terjun ke dalam masyarakat untuk memberikan edukasi.

"Banyak korban-korban investasi ilegal atau investasi bodong kerugiannya sampai triliunan rupiah. Anehnya, korban-korban itu dari tokoh-tokoh masyarakat seperti kepala daerah, camat, kejaksaan, ada kepolisian. Dengan adanya penyuluhan ini biar masyarakat melek dan mengerti bahwa investasi bodong yang sangat merugikan uang kita," papar Hendrawan.

Jika hanya mengandalkan

masyarakat saja untuk menekan sekaligus mencegah terjadinya kembali kasus terjebak pinjol ilegal adalah mustahil. Karena itu, dukungan *stakeholder* menjadi kunci. Sehingga, edukasi literasi keuangan yang berkelanjutan tetap terlaksana. "Kami berupaya memberikan *support* harus bisa memilah-milah mana yang investasi bodong dan mana yang investasi legal," tandas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah X itu.

Tampak hadir dalam penyuluhan tersebut di antaranya Kepala OJK Tegal Novianto Utomo, Bupati Pekalongan Riswandi yang didampingi oleh perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kabupaten Sragi, para Kepala Desa Kecamatan se Sragi, dan para pengurus partai PDI-Perjuangan Kecamatan Sragi.

ts/mh



Anggota DPR RI Hendrawan Supratikno saat menggelar penyuluhan jasa keuangan.

Mukhtarudin Resmikan Bantuan Pasang Baru Listrik

Mukhtarudin ikut menghadiri peresmian sekaligus penyalan pertama Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kalimantan Tengah. Anggota Komisi VII DPR RI yang membidangi energi dan sumber daya mineral ini mengungkapkan bahwa BPBL merupakan keadilan dan pemerataan yang diupayakan pemerintah untuk mendapatkan akses listrik bagi masyarakat hingga ke daerah-daerah terdalam dan tertinggal.

DPR terus berupaya mendukung pemerintah memperluas program kelistrikan untuk masyarakat melalui program ini. Harapannya masyarakat di Kalimantan Tengah bisa merasakan listrik supaya masyarakatnya lebih produktif dan maju. "Program ini merupakan hasil sinergitas Kementerian ESDM dengan DPR RI khususnya komisi VII yang membidangi energi dan mineral. Mengingat listrik menjadi kebutuhan dasar yang akan berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan suatu daerah," ujar Mukhtarudin.



Mukhtarudin bersama Kementerian ESDM menyerahkan paket konversi BBM ke BBG untuk para petani dan nelayan.

Dijelaskannya, pemerintah menargetkan di tahun 2024 seluruh masyarakat di Indonesia dapat merasakan jaringan listrik hingga ke pelosok daerah. Selain BPBL, Mukhtarudin juga mendistribusikan paket konversi BBM ke BBG untuk para petani dan nelayan. Di masa reses kali ini, politisi Fraksi Partai Golkar itu, berusaha mewujudkan aspirasi masyarakat di dapilnya, yang sebagian besar merupakan petani dan nelayan.

Mukhtarudin bersama Kementerian ESDM menyerahkan 1045 pompa konversi petani dan nelayan di Kotawaringin Barat. Distribusi paket konversi dari BBM ke BBG ini sebagai upaya untuk kesejahteraan nelayan dan petani. Karena dari konversi BBM ke BBG ini, petani dan nelayan bisa menghemat biaya sampai 30 persen.

Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan bahwa program tersebut sangat berdampak pada ketahanan pangan dan kesejahteraan

petani dan nelayan. Oleh karenanya, ia berharap program tersebut dapat terus berlanjut setiap tahunnya.

Di lain hari, Mukhtarudin menyerahkan bantuan berupa dua unit mesin pemipil jagung yang merupakan program CSR dari beberapa perusahaan yang disalurkan olehnya, khusus untuk para petani di Kotawaringin Barat.

ayu/mh



Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin saat menghadiri peresmian sekaligus penyalan pertama Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) di Kalimantan Tengah.

Djohar Arifin Husin

Menyosialisasikan PIP di Langkat

Anggota DPR RI Djohar Arifin Husin menyosialisasikan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMK Swasta Gebang Jalan Pringgandan Dusun I, Desa Pasar Rawa, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumut, Senin (9/1/2023) lalu.

Kepala Sekolah SMK Swasta Gebang. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa sekolah mendapat bantuan hampir 100 persen penerima PIP, melalui jalur aspirasi PIP. Menurutnya, hal ini menjadi bukti kinerja Djohar Arifin Husin.

Dikatakan Djohar, PIP hadir untuk meringankan beban orangtua agar anaknya dapat sekolah hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. "Aspirasi ini akan saya masukkan dalam usulan saya. Bisa diterima selama delapan semester, tinggal kemauan anak kita," ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

Dengan tersalurkannya PIP, Djohar berharap, penerima beasiswa ini

dapat menyelesaikan pendidikan sampai perguruan tinggi. "Manfaatkan PIP ini agar anak menjadi sarjana. Manfaatnya bisa seumur hidup mereka," sebut Djohar yang juga legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Acara juga diselingi tari persembahan oleh murid SMK Swasta Gebang dan secara simbolis dilakukan penyerahan sertifikat PIP dari Djohar sendiri. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, yakni Suriani

"Dari sekalian caleg yang menawarkan, terbukti lewat Pak Djohar Arifin Husin murid kami mendapatkan bantuan PIP, PKH, dan kursus menjahit dan komputer," terang Suriani. Selain itu, dirinya mengungkapkan bahwa kehadiran PIP ini membantu para orangtua murid agar anak tidak putus sekolah di SMK Swasta. Terlebih di dalam kurikulumnya terdapat kursus menjahit dan komputer setiap tahunnya. — hal/mh



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Djohar Arifin Husin saat menyerahkan secara simbolis sertifikat Program Indonesia Pintar (PIP)

Fauzi Amro

Pantau Penggunaan Dana Desa

Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Fauzi Amro, melakukan reses perseorangan di tiga wilayah. Kabupaten Musi Rawas, Lubuk Linggau, dan Muratara (MLM), di tiga daerah tersebut, Fauzi memantau penggunaan dana desa.

“Tujuan reses ke tiga daerah kali ini dikhususkan untuk Musi Rawas dan Muratara dalam penggunaan Dana Desa di tahun 2023 sangat berbeda pada tahun sebelumnya,” ungkapnya. Ia menjelaskan, dana desa sangat krusial bagi para kepala desa, khususnya yang ada di Kabupaten Musi Rawas dan Muratara, terlebih sudah ada pergantian kepala desa. Oleh sebab itu, ia meminta jangan ada problem masalah hukum ke depan.

Ia memberikan pemahaman serta sosialisasi agar dana desa digunakan

untuk kepentingan masyarakat desa, bukan untuk kepentingan kepala desa. “Itu pesan dari Ibu Sri Mulyani Menkeu saat RDP dengan Komisi XI,” ujarnya. Diketahui, terdapat empat pilar penggunaan dana desa. Pilar pertama adalah penanganan kemiskinan. Kurang lebih dana desa pada tahun 2021 memiliki alokasi empat puluh persen untuk penanganan kemiskinan.

Pilar kedua adalah untuk program ketahanan pangan dan hewani untuk dana desa. Program ini memiliki sekitar dua puluh persen dari dana desa. Pilar ketiga adalah untuk penanganan Covid-19 yang

dianggarkan delapan persen. Pilar keempat adalah program prioritas pemerintah. “Dari tiga program di atas itu, kurang lebih dana desanya untuk penanganan Covid-19, serta digunakan penanganan kemiskinan yang sekarang programnya Bantuan Langsung Tunai BLT,” tambahnya.

Di sisi lain, di tahun 2023, penggunaan dana desa sangat berbeda. Pilar pertama penggunaan dana desa minimal dua puluh lima persen untuk penanganan kemiskinan. Pilar kedua adalah untuk bantuan operasional BUMDES. Pilar ketiga adalah untuk program ketahanan pangan dan hewani. Pilar keempat adalah untuk anggaran dana operasional kepala desa. “Ada nominal anggaran kemiskinan atau BLT maksimal 25 persen, sisa anggaran dana desa yang kurang lebih 65 persen bisa digunakan untuk pembangunan,” urainya.

rdn/mh



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Fauzi Amro saat menyerahkan bantuan secara simbolis pada agenda reses perseorangan.

Maman Imanul Haq Bantu Pembangunan Gedung IPHI Majalengka



FOTO: IST/ANR

Anggota DPR RI Maman Imanul haq saat meninjau pembangunan gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia di Majalengka.

Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI Maman Imanul haq memberikan bantuan pembangunan gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) di Kecamatan Sindangwangi, Majalengka, Jabar. Bantuan tersebut bersamaan dengan masa reses pada Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023.

Kedatangan legislator yang membawahi Komisi VIII itu ke Sindangwangi juga untuk meninjau pembangunan gedung IPHI yang masih belum rampung. Ia pun menyerahkan sejumlah bantuan kepada pengurus IPHI yang diperuntukkan untuk menyelesaikan pembangunan gedung tersebut.

"Tentu kita semua berharap agar pembangunan gedung yang akan dimanfaatkan untuk publik ini dapat

cepat selesai dan nantinya kehadiran gedung IPHI ini bisa memberikan kontribusi yang besar bagi kegiatan masyarakat sekitar," katanya di Majalengka, pertengahan Februari silam.

Maman tak lupa memberikan edukasi tentang proses penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 yang baru diketok beberapa waktu lalu. Maman saat yang sama juga memberikan

alasan rasionalisasi kenaikan Bipih sekitar Rp14 juta ketimbang tahun 2022 lalu.

Menurutnya, penetapan BPIH dan Bipih dilakukan melalui proses politik yang cukup panjang sejak usulan Bipih dan BPIH yang disampaikan Kementerian Agama RI, kemudian Komisi VIII DPR membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji. Kenaikan Bipih, kata Maman, tak terelakan lagi meski sejumlah komponen biaya telah dilakukan efisiensi dan Panja Haji telah menyisir seluruh komponen biaya.

"Namun demikian penetapan ini patut diberikan apresiasi karena sangat produktif dan mampu menekan berbagai komponen biaya, sehingga dari usulan Kemenag yang disampaikan, biaya perjalanan haji bisa turun cukup signifikan," kata Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat IX tersebut.

— **tn/mh**

Johan Rosihan

Buka Pelatihan Budidaya Ikan Bandeng



FOTO: IST/NE

Anggota DPR RI Johan Rosihan saat foto bersama usai menggelar pelatihan budidaya ikan bandeng di Desa Penyaring.

Anggota DPR RI Johan Rosihan membuka pelatihan budidaya ikan bandeng di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, pertengahan Februari lalu. Kawasan pesisir Desa Penyaring sebagai penghasil terbesar komoditas bandeng di Kabupaten Sumbawa, menjadi sasaran pelatihan budidaya tersebut.

Dalam sambutannya, Johan mengajak masyarakat memiliki ide dan strategi baru untuk mengembangkan produk tambak bandeng agar bisa bersaing di industri. "Melalui pelatihan budidaya ikan bandeng ini saya berharap kita semua serius menggali ilmunya. Kita sudah memiliki posisi yang bagus, masyarakat mengenal Penyaring sebagai desa yang sangat

mengandalkan sektor budidaya perikanan," ujarnya.

Kegiatan yang menghadirkan Kepala Balai Pusat Pelatihan Perikanan Banyuwangi ini diharapkan memberikan output yang membangun para petambak di Desa Penyaring. Politisi PKS ini meminta agar kesempatan tersebut dimanfaatkan secara maksimal oleh para petambak untuk mendiskusikan permasalahan dan kendala mereka

selama melakukan budidaya ikan bandeng.

"Penyaring ini salah satu desa pembudidaya sektor perikanan yang potensial. Saya lihat banyak sekali petambak di tempat ini. Karenanya, dengan mengikuti pelatihan, saya berharap bapak ibu bisa berdiskusi apa saja yang menjadi kendala di tambak, lebih bagus lagi jika bapak ibu menemukan hal baru yang sifatnya membuat usaha tambak semakin mampu bersaing. Itu tujuan kami mengadakan Bimtek ini," jelasnya.

Hadir pula dalam acara tersebut Kadis Kelautan dan Perikanan Kab. Sumbawa, Kepala Desa Penyaring, dan Kepala Balai Pusat Pelatihan Perikanan Banyuwangi. — ann/mh

Andi Yuliani Paris

Energi Ramah Lingkungan Dibutuhkan Industri Semen

Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) Andi Yuliani Paris dalam kunjungannya bertemu Direksi PT Semen Tonasa di Makassar, Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa pemanfaatan energi ramah lingkungan sangat dibutuhkan pada industri semen di Tanah Air. Lantaran selain ramah, pemanfaatan energi ini juga sangat murah.



FOTO: LIST/NIK

Anggota DPR RI Andi Yuliani Paris saat mengikuti kunjungan bertemu Direksi PT Semen Tonasa di Makassar.

“Selama ini industri semen masih memanfaatkan batu bara sebagai energi dasar untuk produksinya. Rata-rata pabrik semen, kan, masih pakai batu bara. Tadi saya tanyakan apakah akan gunakan biomassa atau energi surya. Harus ada kebijakan integratif dengan mengalihkan energi batu bara ke energi surya atau biomassa. Saya akan melihat penggunaan biomassa di Semen Tonasa ini,” ujarnya pertengahan Februari lalu

Legislator dapil Sulawesi Selatan II tersebut mengatakan, Semen Tonasa sudah menghasilkan dua jenis semen berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih ramah lingkungan. Produk ini sekaligus juga memberi kesadaran kolektif

“

Semen Tonasa sudah menghasilkan dua jenis semen berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang lebih ramah lingkungan.

untuk selalu membeli produk ramah lingkungan. Hanya saja menurutnya biaya angkut semen saat ini masih sangat mahal.

Lanjutnya, semen ini tidak saja dibutuhkan untuk industri tapi juga untuk rakyat. Maka, diusahakan harganya terjangkau. Seperti diketahui, Semen Tonasa memasok semua kebutuhan semen di kawasan Indonesia timur, seperti Maluku dan Papua. Harga semen di Papua bisa berkali-kali lipat lebih mahal daripada semen di Jawa. Biaya angkut dan produksi yang mahal, sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah.

Di sisi lain, Komisi VII DPR menyerukan moratorium pada industri semen, karena produksinya sudah over supply. Saat ini, ada sekitar 51 juta ton semen yang belum terserap oleh pasar di dalam negeri. “Komisi VII akan mendorong moratorium. Jangan ada lagi investor bidang semen yang mematikan industri semen Indonesia yang sudah ada,” pungkasnya. gal/mh



Alliza Sa'aduddin Djamal Minta Mahasiswa Berkarakter Islami



FOTO: IST/NR

Anggota DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal usai mengisi kuliah umum di Auditorium Academic Center (AAC) Ampon Chiek Peusangan.

Anggota DPR RI Illiza Sa'aduddin Djamal meminta mahasiswa Universitas Almuslim harus berkarakter islami. Menurutnya, karakter seseorang sangat penting apalagi era sekarang, era perubahan terjadi begitu cepat.

Hal itu disampaikan pada kuliah umum di Auditorium Academic Center (AAC) Ampon Chiek Peusangan, Jumat (24/2/ 2023) lalu. Kuliah umum bertema "Membangun Karakter dan Integritas Pemuda Melalui

“

Adik-adik mahasiswa harus belajar yang benar, apalagi adik-adik diberikan beasiswa, jadi harus menjadi panutan dan sukses dalam belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan mengingat Allah SWT.

“

Berperilakulah sesuai syariat islam, jangan biasakan yang salah, tapi biasakanlah yang benar.

Pendidikan, Budaya, dan Agama" dihadiri seribuan lebih mahasiswa Universitas Almuslim.

Dia mengharapkan mahasiswa agar bisa menjaga pergaulan dan berkarakter islami, karena kondisi perkembangan teknologi, jangan sampai salah dalam memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. "Adik-adik mahasiswa harus belajar yang benar, apalagi adik-adik diberikan beasiswa, jadi harus menjadi panutan dan sukses dalam belajar. Jangan lupa selalu berdoa dan mengingat Allah SWT," pesan Anggota Komisi X DPR RI ini.

Ditambahkan Illiza, integritas terlihat dari perilaku dan tindakan masyarakat dalam bersosial. Integritas menunjukkan konsistensi antara ucapan dan keyakinan yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari. "Berperilakulah sesuai syariat islam, jangan biasakan yang salah, tapi biasakanlah yang benar," ujarnya.

Kuliah umum ini dibuka Rektor Umuslim Dr. Marwan, M.Pd. Ia mengapresiasi kehadiran anggota DPR RI ini ke kampusnya. Marwan juga berharap bantuan dari Illiza agar mahasiswa yang kuliah di Umuslim bisa diberikan akses beasiswa.

ann/mh

Impian Nopitasari

Bahasa Ibu (Tidak) Selalu Bahagia untuk Anak



Impian Nopitasari dan karya-karya yang sudah ditulisnya.

Impian Nopitasari, satu sosok dari deretan penulis-penulis Indonesia yang memilih jalan hidup tidak adiluhung. Mungkin biasa saja jika dirasa panca indra, namun jika ditelisik dengan rasa, tanggung jawab melindungi bahasa ibu dari putus generasi dengan mencintai anak-anak lewat kata adalah kekuatannya. Baginya, hidup anak yang kadang ideal itu tidak apa-apa, kok.

Lahir di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Impian menjadi sosok anak perempuan yang diimpikan oleh kedua orang tuanya. Sedari dini, Impian kecil dibuat akrab dengan bahasa ibu, yaitu Bahasa Jawa. Seiring bertumbuh, Impian kecil perlahan mengenal dunia baru, tentu bahasa baru, melalui buku dan majalah bekas yang kerap dibawa pulang oleh Bapak usai bekerja.

Seperti, majalah anak bekas macam *Si Kuncung*, *Bobo*, *Belia*, buku-buku dongeng terbitan pemerintah. Lalu, buku dan majalah berbahasa Jawa seperti *Panjebar Semangat*, *Jayabaya* dan *Djaka Lodang*, hingga majalah horor dewasa. Ia menyadari semakin bertambah kosakata baru, semakin tidak sanggup ia membendungnya. Hingga, pada satu titik ia merasa bosan.

Rasa bosan ini yang menjadi

percik-percik dorongan bagi Impian untuk mencoba membiasakan diri menulis cerita sendiri. Diam-diam dongeng Simbah menjadi aliran inspirasinya. Ia pun mulai berpetualang dengan kata-kata dan imajinasi di kepala.

"Simbah saya memang suka mendongeng versi dirinya sendiri. Dari ingatan masa kecil itulah, saya ingin kembali ke masa kanak-kanak dulu dengan menulis cerita anak, semacam kerinduan saya yang lama terpendam," ungkap perempuan magister lulusan Pengkajian Bahasa Inggris itu.

Impian perlahan-lahan secara serius mulai merajut mimpinya menjadi nyata. Sebenarnya ada keunikan dibalik jalan cerita alasan ia serius menggarap cerita dalam Bahasa Jawa, bukan sekadar bosan. Ternyata, pada waktu itu, ia sedang menyukai seorang laki-laki yang seorang penulis Bahasa

Jawa. Ia berharap melalui cerita yang ia buat bisa mendekatkan dirinya pada 'gebetan'. Memang pada akhirnya jadi dekat, walaupun sebatas menjadi teman diskusi yang asyik.

Tahun 2013, cerpen berbahasa Jawa '*Dongenge Pitik karo Bebek*' (Dongeng Anak Ayam dan Bebek) karya Impian terbit di majalah tertua di Indonesia, *Majalah Panjebar Semangat*. Cerita ini yang menjadi jejak pertama bagi dirinya menulis cerita anak-anak dalam Bahasa Jawa. Dirinya mafhum, motivasi menulis cerita Bahasa Jawa tidak adiluhung, serasa seperti kecemplung. Namun, akibat serangkaian pengalaman hidup yang ia lalui, menyadarkannya bahwa ada panggilan tanggung jawab untuk melindungi Bahasa Ibu yang ia warisi, Bahasa Jawa.

"Ya *nanggung* kalau *kecemplung* saja, kan? Ya sudah sekalian menyelam, haha. Versi seriusnya, saya seperti punya tanggung jawab untuk melestarikan bahasa ibu sendiri. Apalagi, sekarang itu setelah era Didi Kempot, banyak lirik Bahasa Jawa di lagu pop atau koplo Jawa yang *ngawur* baik kata maupun ejaan. Lalu, banyak juga mural, spanduk, *plang* di kota Solo dan Yogya yang dikenal dengan kota budaya, banyak yang salah baik ejaan latin ataupun aksara Jawa. *Gemes*



FOTO: IST

Buku-buku karya Impian Nopitasari. Dari kiri atas ke kanan: wacan bocah *Si Jlitiheng: Dongeng Bocah Abasa Jawa*, kumpulan cerita anak *Payung Biru Jeta dan Tiga Kisah Lainnya*, kumpulan esai *Hidup di Zaman Konten*, kumpulan cerkak *Simbar Menjangan*, dan kumpulan cerkak *Kembang Pasren*.

banget rasanya, menulis dalam Bahasa Jawa selemah-lemahnya iman begitu lah kira-kira," tuturnya.

Bukan berarti ia menjadi pribadi yang benci dengan bahasa nasional. Bahasa Indonesia, sewaktu-waktu, bisa menjadi akses untuknya menyampaikan buah pikiran kepada berbagai ragam pembaca, tidak hanya orang Jawa. Ia mengetahui betul, Indonesia terdiri dari berbagai suku, budaya, dan tentu juga bahasa lokal. Dirinya merasa Bahasa Indonesia bisa membantu menjadi jembatan pemahaman dari perbedaan tersebut.

Dunia Anak, Antara Kelabu dan Cerah

Impian memiliki keyakinan tidak sekadar imajinasi, anak-anak itu seharusnya diizinkan untuk merasakan berbagai perasaan yang ia miliki, seperti *Si Jlitiheng*. Buku *Si Jlitiheng* adalah salah satu karya Impian bersama dengan Nai Rinaket, seorang ilustrator, yang terbit tahun 2020 melalui Penerbit Babon. Dalam judul '*Kodhok lan Bekicot*', ada kata sekaligus gambar yang menceritakan elang mencabik setiap bagian tubuh kodok.

Kritik pun berdatangan kepadanya. Sebagian dari mereka mengatakan seharusnya cerita anak tidak boleh berakhir tidak bahagia. Semua harus cerah karena anak masih seperti kanvas putih, belum

boleh tahu kerasnya hidup. Menerima kritikan tersebut, Impian sempat mempertanyakan keyakinannya, apakah anak-anak tidak boleh merasakan bahwa kadang hidup itu juga bisa jadi kelabu.

"Tapi, tidak apa-apa, yang penting bisa menjelaskan bahwa anak-anak juga berhak sedih dan melihat rantai makanan itu, ya seperti itu. Hidup tidak ideal tidak apa-apa, kok, jika diperkenalkan sejak dini," jelas Impian.

Dirinya paham betul menulis cerita anak dengan bahasa daerah seperti menjajaki jalan yang sepi karena tidak banyak kawan senasib untuk berbagi dan saling menguatkan. Akan tetapi, ia tidak ingin tantangan ini membuat ia kalah, keyakinan ini disampaikan secara subtil dalam potongan kata yang ia tulis dalam buku *Si Jlitiheng*.

Gusti ngripta titah ora mungkin ora ana gunane. Ana wadhi kang ora bisa kechandak dening nalare titah urib kang sarwa winates. (Tuhan ketika menciptakan tidak mungkin tidak ada gunanya. Ada rahasia yang tidak bisa kita nalar terkait hidup yang serba terbatas).

Harapan

Impian sebenarnya punya dimensi lain dalam kiprah kepenulisannya. Ia adalah bagian dari Komunitas Pawon Sastra Solo. Dirinya juga sebagai seorang kolumnis baik di media lokal maupun media nasional, baik daring maupun cetak. Walaupun begitu, ia lebih dekat dan dikenal sebagai seorang penulis cerita anak dalam Bahasa Jawa.

Karena dekat dengan bagian dunia ini, Impian berharap jalan menulis cerita anak dalam Bahasa Jawa tidak putus generasi, ia ingin semakin banyak memiliki kawan seperjalanan yang tetap bertahan.

Ia tahu jalan ini tidak mudah, namun ia yakin bukan berarti tidak mungkin bisa dilalui.

Untuk kawan yang baru menjajaki menulis cerita anak dengan Bahasa Jawa, dirinya ingin dalam menulis mempertajam mengamati lingkungan sekitar. Menurutnya, menulis itu harus berani mencoba, berani mengalami kesalahan, berani bangkit, berani memulai lagi. Ia menekankan menghidupkan cerita anak tidak harus memiliki akhir yang selalu bahagia karena memang tidak ada yang sempurna.

"Anak-anak itu juga usil, rasa ingin tahunya besar sampai terkadang membuat orang dewasa pusing, orangtua juga bisa salah dan tidak harus sempurna. Bisa baca cerita seri *Na Willa* oleh Mbak Reda Gaudiamo dan cerita-ceritanya Mbah Djokolelono. Untuk Bahasa Jawa, *Gleger* dan *Kethek Julig* karya Mbah Djoko ini bagus buat referensi," imbuh penggemar *Kakashi Hatake* itu.

Dari sudut pandangnya, proses belajar itu tidak akan pernah berhenti total. Ia menerangkan, selama menempuh dirinya menempuh proses tersebut, tidak ada batasan waktu untuk belajar karena ilmu semakin berkembang dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya pengalaman dan ilmu di dunia penulisan cerita anak, jangan pernah merasa cukup. Dunia anak itu unik, maka harus sering rajin dijelajah karena kadang seperti tidak punya pakem.

"Sebenarnya yang butuh cerita anak bukan hanya anak-anak, tetapi orang dewasa seperti saya juga masih suka membaca cerita anak," tutup Impian. **ts/mh**

Terhitung hingga saat ini, Impian Nopitasari telah melahirkan karya-karya berupa *cerkak* (kumpulan cerita Bahasa Jawa) *Kembang Pasren* terbit di Penerbit Garudhawaca, Agustus 2017, wacan bocah *Si Jlitiheng: Dongeng Bocah Abasa Jawa* diterbitkan oleh Penerbit Babon, Mei 2020, *Payung Biru Jeta dan Tiga Kisah Lainnya* oleh Penerbit Lingkarantarnusa, Agustus 2021, kumpulan cerkak *Simbar Menjangan* oleh Penerbit Lingkarantarnusa, Agustus 2022, dan kumpulan esai *Hidup di Zaman Konten* oleh Penerbit Tanda Baca, September 2022.



Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat menghadiri perayaan Natal Bersama MPR RI, DPR RI, DPD RI Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

FOTO: MUNICHEN/NR

Perayaan Natal Parlemen Mempererat Solidaritas Kebangsaan

Hari itu, kompleks parlemen penuh khidmat. Akhir Januari 2023 lalu, MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menyelenggarakan perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023. Kegiatan keagamaan reguler tahun ini digelar di Ruang Pustakaloka, Gedung Nusantara IV dengan tema 'Maka Pulanglah Mereka Ke Negerinya Melalui Jalan Lain' dan sub tema 'Melangkah Maju Bersama, Menyongsong Kehidupan Baru Dalam Kasih Natal'.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi segenap umat Kristiani yang senantiasa menjadikan momen perayaan Natal sebagai "momen kemanusiaan" untuk memberikan derma dan berbagi kasih kepada sesama, dalam semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan adalah narasi universal yang hidup dan berkembang dalam setiap agama, sehingga momentum perayaan Natal senantiasa dijadikan penyemangat untuk melangkah maju bersama. Bahu-membahu dan bergotong-royong, membangun sinergi dan kolaborasi, serta menyongsong tahun 2023 dengan penuh optimisme.

"Narasi tersebut memuliakan harkat dan martabat kemanusiaan yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tanpa terbelenggu oleh batasan primordial,

serta sekat-sekat keagamaan. Sebagaimana pandangan sahabat Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib bahwa setiap manusia bersaudara. Mereka yang bukan saudara seiman, adalah saudara dalam kemanusiaan," kata Bamsoet.

Menurut Politisi Fraksi Golkar itu, kuatnya ikatan solidaritas bangsa Indonesia tidak perlu diragukan.



Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph saat foto bersama dalam Perayaan Natal Bersama MPR RI, DPR RI, DPD RI Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023.

FOTO: MUNICHEN/NR

Tercermin dari laporan World Giving Index yang pada tahun 2022 kembali menobatkan Indonesia sebagai negara paling dermawan di dunia. Lebih membanggakan, pencapaian sebagai negara paling dermawan tersebut diraih selama lima tahun berturut-turut.

Sebelumnya, Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph mengungkapkan momen Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 MPR RI, DPR RI, dan DPD RI diharapkan menjadi pusat percontohan dan teladan menghayati dan memaknai Kebhinnekaan Tunggal Ika sebagai anugerah Tuhan untuk saling bergandengan tangan, bersama-sama mewujudkan dan menata kehidupan bangsa yang lebih maju, sejahtera, adil, dan bermartabat.

"Saat ini, kita memasuki tahun politik 2023 jelang tahun 2024 dimana ancaman gesekan antarsesama, antar golongan, dan antarpolisi politik bisa saja terjadi, bila tidak dikelola dengan baik. **rmm/mh**



FOTO: MUNICHEN/NR

Anggota DPR RI Willy Midel Yoseph saat melakukan pidato Laporan Ketua Panitia Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 MPR RI-DPR RI-DPD RI.

Awal Tahun Tuai Penghargaan

Menyongsong awal tahun 2023, Media Sosial DPR RI meraih lima nominasi dalam perhelatan Government Social Media Summit (GSMS) tahun 2022. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, Indra Pahlevi menekankan prestasi ini menjadi anugerah sekaligus tantangan bagi DPR RI, khususnya di biro yang dipimpinnya, untuk selalu memacu diri meningkatkan kualitas pemberitaan.



“Tentu (kami) berbangga atas prestasi ini. Ini adalah hasil kerja luar biasa, kerja teman-teman di DPR RI. Pun, ini menjadi tantangan bagi kita ke depan, agar editorial pemberitaan harus lebih baik, harus lebih bisa memenuhi kebutuhan masyarakat terkait informasi DPR,” ucap Indra saat ditemui Parlemenaria usai menerima penghargaan di Auditorium Perpustakaan Nasional RI, Jakarta, Januari lalu.

Indra menegaskan, DPR RI selalu berupaya aktif menjangkau berbagai elemen masyarakat Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke.

Harapannya, kegiatan dan kebijakan yang dilahirkan di DPR RI terkini bisa tersampaikan secara informatif di seluruh kanal berita, termasuk media sosial DPR RI.

“Saya yakin ke depan, DPR RI akan semakin dikenal, tidak hanya sekadar lembaga saja. Tetapi juga, (dikenal) juga (dari sisi) kinerja DPR RI. Ini adalah pencapaian yang luar biasa.

Kami tidak akan berhenti melakukan yang terbaik,” pungkas mantan wartawan di salah satu harian lokal di Yogyakarta ini.

Sebagai informasi, dalam GSMS tahun 2022, salah satu kanal berita DPR RI, Media Sosial DPR RI masuk ke dalam lima nominasi yang bersaing dengan berbagai lembaga pemerintah di Indonesia. Kelimanya adalah kategori Winner Most Active (Lembaga), Finalis Best Campaign (Lembaga), Finalis Best Performance in G20 Campaign (Lembaga), Finalis Best Use of Video (Lembaga), dan Finalis Best Account (Lembaga).

Dari berbagai nominasi tersebut, media sosial DPR RI dianugerahi sebagai pemenang untuk nominasi media sosial lembaga yang paling aktif (Most Active). Diketahui, GSMS merupakan sebuah perhelatan puncak tahunan untuk mengapresiasi lembaga-lembaga pemerintahan yang memiliki kinerja baik dalam mengelola media sosial berdasarkan hasil pemantauan para juri profesional di bidangnya. Adapun tema GSMS 2022 adalah Media Sosial sebagai Episentrum Komunikasi Publik Pemerintah. **rnm/mh**





Oleh:

dr. Ni Putu Indra Dewi, MARS

Pembiayaan atas kanker sendiri menurut laporan BPJS menduduki posisi nomor 2 sekitar Rp3,5 triliun, tepat di bawah penyakit jantung. Menilik dari laporan kasus kanker dunia, dinyatakan bahwa wanita adalah kelompok dengan risiko tertinggi terkena kanker. Tercatat ada 65.858 kasus kanker payudara dan 36.633 kasus kanker leher rahim. Di Indonesia sendiri, menurut laporan Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2017 lalu, dinyatakan bahwa kasus kanker payudara dan kanker serviks masih menjadi kasus kanker tertinggi di Indonesia.

Kanker dan Faktor Risiko yang Memicunya

Kanker adalah suatu kondisi terjadinya pertumbuhan sel yang abnormal di dalam tubuh penderitanya yang tidak dapat dikendalikan. Kanker merupakan kondisi yang muncul sebagai akibat dari pertumbuhan sel-sel abnormal, dimana pada umumnya sel-sel abnormal ini akan membentuk "benjolan" yang kerap dikenal sebagai

Langkah Awal Lindungi Wanita dari Kanker

Prevalensi kanker di dunia yang semakin tinggi menyebabkan kanker menduduki posisi nomor 2 sebagai penyakit penyebab kematian di dunia. Campaign "Close The Care Gap" adalah tema Hari Kanker Sedunia 4 Februari 2023 lalu sebagai bentuk atensi untuk membangun kesadaran, pengetahuan, dan tindakan atas penyakit kanker di seluruh dunia



istilah "tumor" atau "kanker jinak". Sel-sel abnormal yang mampu menginvasi dan merusak fungsi jaringan lainnya menyebabkan kanker bersifat " ganas". Kemampuan

sel ganas tersebut menginvasi dan merusak jaringan, menyebabkan sel kanker mampu menembus pembuluh darah dan pembuluh getah bening, masa inilah yang

disebut sebagai penyebaran (metastasis).

Sel kanker diawali dari peristiwa mutasi genetik, sehingga peran senyawa-senyawa yang memicu mutasi adalah faktor risiko yang terlibat di dalamnya. Ada berbagai senyawa yang dianggap dapat memicu perkembangan sel kanker dan merupakan penyebab beberapa jenis kanker, yaitu sinar UV, sinar pengion, senyawa karsinogen kimia seperti asbes, komponen asap tembakau, alkohol, aflatoksin (kontaminan makanan), dan arsenic (kontaminan air minum), serta dapat pula disebabkan oleh faktor biologis seperti halnya infeksi virus, bakteri, maupun parasit lainnya.

Giat Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Serviks

Berdasarkan data Globocan WHO Tahun 2020 silam, total penderita kanker nasional sebanyak 0,14% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan penderita kanker wanita lebih besar dibandingkan dengan penderita kanker pria. Prevalensi kasus kanker payudara menempati nomor satu tertinggi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, yakni 201.143 kasus.

Berdasarkan data Globocan WHO Tahun 2020 silam, total penderita kanker nasional sebanyak 0,14% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan penderita kanker wanita lebih besar dibandingkan dengan penderita kanker pria.

Persentase kematian pada kasus kanker payudara sendiri mencapai 18-19%.

Oleh sebab itu, muncul atensi yang tinggi akan kondisi kanker payudara dan kanker serviks oleh pemerintah yang melibatkan banyak sektor. Deteksi dini kanker payudara terbagi menjadi dua, yakni SADARI

Prevalensi kasus kanker payudara menempati nomor satu tertinggi di Indonesia dalam lima tahun terakhir, yakni 201.143 kasus. Persentase kematian pada kasus kanker payudara sendiri mencapai 18-19%.

dan SADANIS. Sedangkan, deteksi dini kanker leher Rahim (serviks) adalah pemeriksaan IVA Test.

SADARI adalah suatu pemeriksaan payudara sendiri yang dapat dilakukan dengan mudah di rumah, sedangkan SADANIS adalah suatu pemeriksaan payudara klinis yang dilakukan ahli. Hasil pemeriksaan SADARI dapat dilaporkan pada tim medis saat akan melaksanakan SADANIS.

Atensi pada Kanker Leher Rahim (Serviks) sendiri dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan IVA test, yaitu deteksi dini kanker serviks dengan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) yang dilaksanakan oleh dokter ahli. Metode ini dilaksanakan dengan

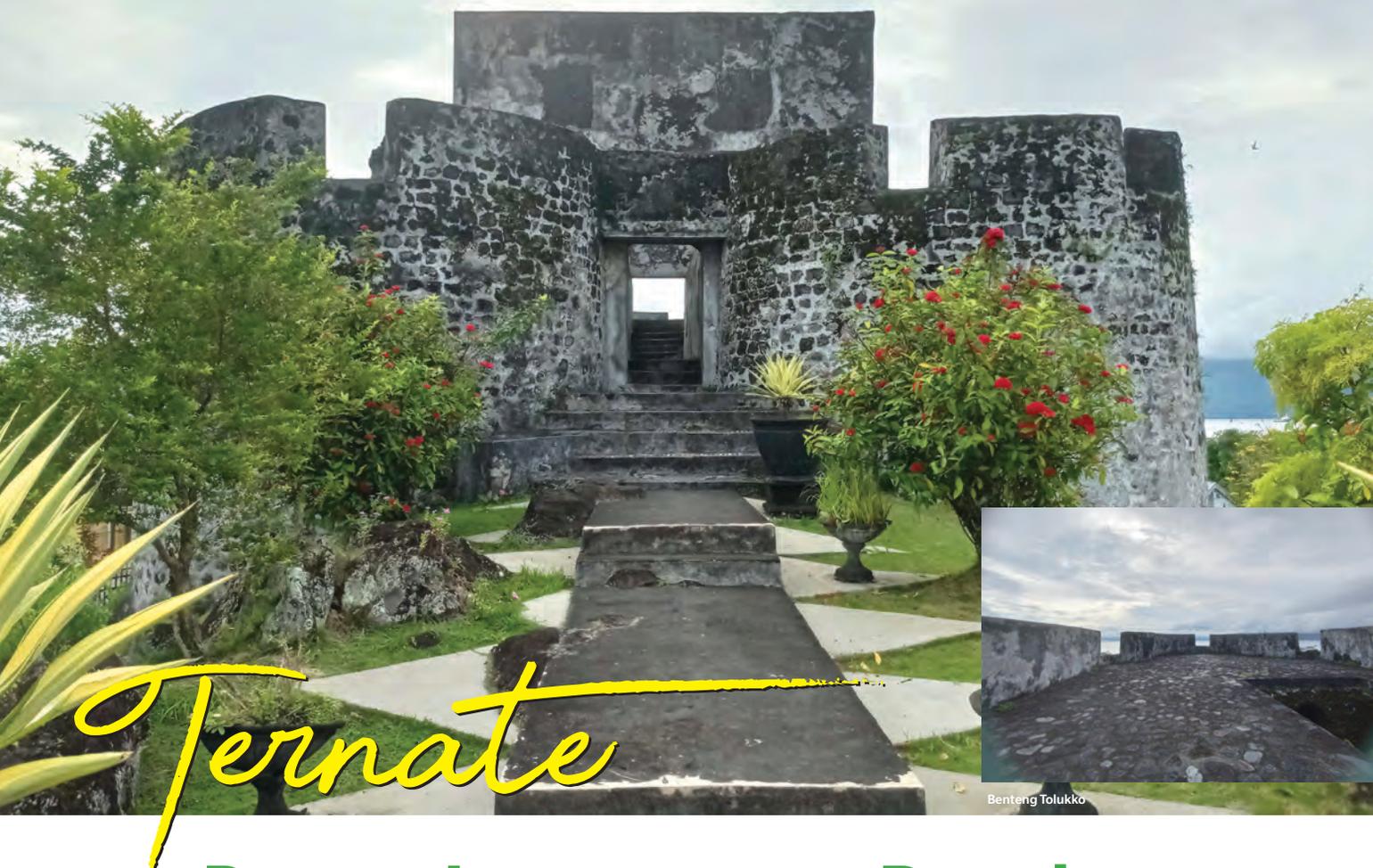
mengoleskan asam asetat pada leher rahim, dan dilaksanakan evaluasi serta penegakan diagnosa oleh dokter ahli. Pada tahun 2017 terdapat 3.700 Puskesmas di seluruh Indonesia dari sekitar 9.700 Puskesmas yang ada, telah dilatih untuk melakukan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dan payudara.

Perlu diketahui pula bahwa hingga saat ini kanker leher rahim adalah satu-satunya kanker yang dapat dicegah. Dengan melakukan vaksinasi HPV (Human Papilloma Virus) sejak dini diharapkan perkembangan kanker leher rahim dapat dicegah dan dikurangi.

Lima Hal Yang Dapat Dilakukan Setelah Terdiagnosa Kanker

Setelah ditegakannya diagnosis kanker, umumnya penderita akan merasa terpuruk dan depresi, karena kerap kali kanker didiagnosis sangat terlambat. Untuk itu, penderita perlu mengetahui ada 5 hal yang dapat dilaksanakan setelah terdiagnosa kanker, yaitu:

1. Pahami Diagnosisnya. Penting untuk mengetahui jenis kanker dan stadiumnya karena sangat mempengaruhi tata laksana selanjutnya.
2. Pelajari Opsi Perawatan. Konsultasikan tentang opsi perawatan kombinasi yang saat ini semakin berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun penting untuk mempertimbangkan efek samping dan kontraindikasi.
3. Pertimbangkan Second Opinion. Second opinion sendiri merupakan hak dari pasien sehingga tidaklah salah mempertimbangkan konsultasi dengan second opinion.
4. Kenali Tim Perawatan Medis
5. Pahami Sistem Asuransi Yang Dapat Digunakan. 🐾



Benteng Tolukko

Pesona Lampau yang Bertahan Hingga Sekarang

Pulau Ternate yang kecil itu di masa lampau menyimpan 'kekayaan' yang begitu besar. Maka tak heran, situs-situs kolonial berupa benteng-benteng batu mengelilingi pulau itu. Bangunan saksi sejarah itu tetap terawat dan mempesona para pelancong untuk menelusurinya.

Untuk memulai perjalanan hari ini saya mengisi energi dengan sarapan nasi kuning. Menu lokal ini cukup jamak ditemui di alam nusantara timur dari Manado sampai Sofifi. Nasinya dimasak bersama santan dan bumbu kunyit dilengkapi sedikit potongan mi, ubi goreng, telur rebus dan ikan berbumbu pedas. Jumlah kalorinya dirasa cukup untuk memenuhi perjalanan pagi.

Jalan kaki bisa menjadi pilihan di kota dalam pulau kecil ini. Dengan luas lebih besar sedikit dari Kota Jakarta Pusat, kita dapat mengitari pulau ini dengan mobil kurang dari

dua jam. Udara pulau pun masih sejuk lantaran angin dari Gunung Gamalama berhembus ke bibir pantai dan sebaliknya terkadang angin laut juga tak mau kalah membawa dirinya ke kaki gunung. Dengan cuaca yang tak terlalu panas saya yang inginap di kawasan Ternate Selatan bertolak ke Benteng Kalamata yang masih berada dalam satu kecamatan.

Benteng Kalamata

Bangunan berbahan andesit bercampur batu karang ini berdiri tepat di pesisir pantai. Dengan tinggi hampir 3 meter, benteng berupaya menahan gempuran lawan dan jadi media pertahanan perdagangan dari arah



FOTO: AGUNG

Benteng Kaalamata

Tidore maupun Halmahera. Awalnya benteng didirikan oleh Portugis sebelum akhirnya dikuasai Belanda.

Pemandangan belakang benteng berdiri tegak Gunung Gamalama sebagai 'paku bumi' pulau ini, sedangkan laut yang ditantanginya punya gelombang yang cukup tenang. Lokasi ini tampaknya cukup populer untuk jadi tempat foto prewedding karena keeksotisan bangunan dan citra alam yang meliputinya.

Benteng Tolukko

Selesai melihat-lihat Kalamata, saya pun bergegas menuju benteng satu lagi yang berdiri di lereng bukit. Benteng Tolukko merupakan bangunan pertahanan sekaligus pengawas Portugis, setelah mendapatkan izin dari Kesultanan Ternate pada masa itu, koloni asal semanjung Gibraltar itu perlu meningkatkan pengamanan terhadap aktivitas dagangnya. Maklum perdagangan rempah kala itu bersaing ketat dengan negeri-negeri Eropa sendiri hingga para perompak di lautan.

Bangunan benteng dibangun di atas lereng tinggi menghadap lautan. Terdapat tiga buah bastion, ruang bawah tanah, halaman dalam, lorong serta bangunan utama berbentuk segi empat. Seiring hubungan dagang yang romantis antara Kesultanan Ternate dengan Portugis memudar dan bertumpah darah, benteng pun ditinggalkan hingga akhirnya diambilalih oleh Belanda.

Keraton Ternate

Usai menikmati puncak tinggi di Benteng Tolukko, saya berjalan kaki menurun menuju Keraton Kesultanan Ternate. Bangunan yang menghadap pemandangan laut dan memunggungi gunung ini merupakan kediaman para penguasa Ternate sejak abad



FOTO: AGUNG

Keraton Ternate

pertengahan, hingga kini yang beralih fungsi menjadi museum. Untuk berkunjung melihat isi dalam keraton, saya meminta izin terlebih dahulu kepada 'abdi dalem' istana yang menjaga bangunan ini dan bertempat tinggal di area tersebut.

Saat memasuki keraton, lambang kesultanan berupa burung Goheba berkepala dua menyambut pengunjung. Makhluk mitologi lokal itu membawa pita bertuliskan "Limau Gapi", sebuah filosofi keharmonisan rakyat Ternate yang sudah diresapi sejak zaman dahulu. Di dalam keraton, berbagai instalasi dipamerkan mulai dari benda-benda pusaka kerajaan seperti panji, tombak, alat perang serta singgasana dan mahkota sultan; hingga pemberian berupa benda kolonial seperti koin eropa, senapan lontak dan baju zirah besi.

Pasar Gamalama

Tak terasa hari pun siang dan perut saya keroncongan. Saya memutuskan bertandang ke Rumah Makan Popeda, Pasar Gamalama yang tak jauh berada di muka keraton. Tempat ini menyajikan hidangan laut Ternate mulai dari Cakalang Asap, Ikan Kuah Kuning

dan berbagai hidangan ikan lainnya. Lawan makannya selain papeda yang terkenal itu ialah pisang dan umbi-umbian yang tumbuh banyak di pulau ini. Sementara karbohidrat semacam nasi juga tersedia, meskipun didapat dari luar pulau.

Makan di area ini mengakhiri perjalanan saya dimana terlihat laut secara lebih dekat. Saya dapat mengamati sebelah kiri banyak kapal nelayan bertambat, sementara di sebelah kanan tak jauh terlihat pelabuhan kapal feri. Pelabuhan sangat sibuk di hari kerja pada pagi dan sore hari. Penyeberang kebanyakan ialah pegawai negeri yang bertugas di ibu kota baru Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Pulau Halmahera. Kebanyakan pekerja itu masih bertempat tinggal di Ternate, bekas ibu kota provinsi ini.

Ternate sebagai kota, mungkin tidak punya kegiatan administratif sesibuk dulu lagi. Bukan pula jadi salah satu penguasa gugus Kepulauan Maluku seperti abad pertengahan. Namun sebagai pulau, kota bersejarah dan saksi geologis, pesona Ternate tak lekang dan masih berlanjut dalam waktu yang lama. **aha/mh**



FOTO: AGUNG

Pasar gamalama (tambatan kapal nelayan)

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Cak Imin atau Gus Ami, jatuh cinta dengan Vespa sejak 1984. Vespa telah menemani hidupnya sejak masa kuliah dulu.



Cak Imin ketika melakukan hobinya, mengendarai motor vespa bersama sang istri.

Muhaimin Iskandar

Keren dengan Bervespa

FOTO: RUNI/NR

Kepada Parlemen, Gus Ami bercerita tentang hobinya ini. Ia mengaku mulai jatuh cinta dengan motor pabrikan Italia itu sejak kuliah di Yogyakarta, tepatnya tahun 1984. "Ini perjalanan panjang saya dengan vespa. Dulu, saya waktu mau kuliah di Jogja dibekali Vespa sama orangtua. Ya, Vespa itu yang menemani saya ke mana-mana, mau kuliah sampai urusan-urusan aktivis," ujarnya.

Menurutnya, saat itu punya vespa tak hanya membuat keren, tapi juga digandrungi kaum hawa. Bahkan, ia mengaku berkat Vespa pula dirinya dipertemukan dengan jodoh yang kini menjadi istri terkasihnya, Rustini Murtadlo.

Usut punya usut, motor tersebut memiliki nama yang unik. Politisi PKB ini membeberkan nama Vespanya yang diambil dari nama bintang film kawakan, Meriam Belina. Ia telah

menggunakan 'Meriam Belina'-nya sejak masih di bangku kuliah.

Menurutnya, Vespa kendaraan yang punya desain seksi. Ia begitu jatuh cinta dengan motor asal Italia tersebut. "Vespa, kan, seksi juga belakangnya itu," tandas Gus Ami. Di media sosial miliknya, ia kerap mengunggah foto kebersamaannya dengan vespa tersebut. Salah satu unggahannya menyebut, "Naik Vespa dari Jombang ke Yogya, sempat mogok di Madiun. Sejak itu di Yogya selalu pakai vespa. Asyik dan tersiksa. Asyik, karena selalu ganti warna, tersiksa kalau mogok."

Ia pernah berkeliling dengan Vespa ke Palangkaraya dan Jakarta bersama-sama sahabat Vespanya. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, ia bersilaturahmi dengan banyak orang. Di Ibu Kota Jakarta, ia berkampanye membersihkan sampah plastik.

Dalam postingannya, ia menulis, "Vespa. Alhamdulillah bisa keliling

kota Palangkaraya, menyambung tali silaturahmi dengan warga Kalimantan Tengah," katanya.

Di Jakarta, Gus Ami memberi tajuk bervespanya dengan menulis, "Bebaskan Jakarta dari Sampah Plastik." Pada 2022 lalu, Gus Ami diangkat menjadi anggota kehormatan Scooter Owners Grop (SOG) di Bandung. Ia menuturkan, SOG merupakan sarana menambah persaudaraan dan kekerabatan, terutama bagi sesama pencinta Vespa.

"Saya sangat senang diajak jadi keluarga besar SOG, sebuah kehormatan buat saya. Ini bagi saya bisa menambah persaudaraan dan kekerabatan," katanya, seraya menambahkan, "Sampai sekarang ada cita-cita saya belum tercapai, mungkin agak norak ya, yaitu bikin Vespa limosin, tapi teman-teman bilang itu kuno," tuturnya. **hal/mh**

Gempa Cianjur Guncang Ruang Rapat

Gempa Cianjur yang berpusat di 10 km arah barat daya, Kabupaten Cianjur, beberapa waktu lalu, terasa guncangannya hingga ke gedung DPR RI.

Syahdan, Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw membuka Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati dan Kepala Basarnas Marsda TNI Henri Alfiandi.

Baru saja Rouw membuka rapat, tiba-tiba ruang rapat bergetar. Suasana panik mulai terlihat.

Kepala BMKG Dwikorita pun langsung bersembunyi ke bawah meja. Suasana yang jarang terjadi di ruang rapat DPR. Sementara staf BMKG dan Basarnas tak bereaksi seperti Dwikorita.

Suasana takut dan lucu bercampur. Rapat yang semula akan membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2022 dan antisipasi potensi cuaca ekstrem di Indonesia akhirnya harus tertunda.

"Iya, harusnya kalau gempa begini kita keluar dulu ya. Tunggu mungkin 30 menit kemudian baru kita masuk lagi, ya. Jadi, saya skors, kita keluar dululah, ya?" tanya Robert, meminta persetujuan anggota Komisi V yang hadir.

Politisi Nasdem itu, merasa heran dengan Basarnas dan staf BMKG yang sering menyosialisasikan mitigasi bencana, tetapi malah tidak menerapkannya. 



Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw

FOTO: ARIEF / NR



**SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR RI
SERTA SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI
mengucapkan**

SELAMAT MEMPERINGATI

Isra' Mi'raj

NABI MUHAMMAD SAW

27 RAJAB 1444 H/18 FEBRUARI 2023



@dpr_ri



DPR RI



@DPR RI



DPR RI



@dpr_ri